



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

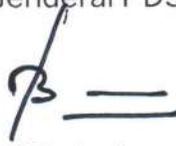
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan IV Tahun 2023 disusun sebagai salah satu implementasi atas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru KKP, Ditjen PDSPKP memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan di dalam negeri dan ekspor. Upaya memperkuat daya saing tersebut telah dijabarkan pada perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP, yang juga menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program. Secara garis besar pencapaian kinerja Ditjen PDSPKP periode Triwulan IV tahun 2023 capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 101,58.

Akhir Kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang ditetapkan kepada kami. Dengan semangat #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntable dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 29 Januari 2024
Direktur Jenderal PDSPKP



Budi Sulistiyo

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Budi Sulistiyo

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Yayuk Sukarsih

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ayu Wahdania

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Berdasarkan PK tersebut, terdapat 23 indikator kinerja yang terdiri dari 11 indikator kinerja utama (IKU) dan 12 indikator kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen PDSPKP.

Dari 23 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diperoleh dua indikator kinerja belum mencapai target Triwulan IV tahun 2023. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan IV Tahun 2023 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 101,58%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Dari 23 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 16 indikator kinerja bersifat tahunan, dua indikator kinerja bersifat semesteran, dan lima indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 16 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, (2) Konsumsi Ikan (setara utuh segar), (3) Kinerja Logistik Hasil Perikanan, (4) Nilai PNBP Ditjen PDSPKP, (5) Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP, (6) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), (7) Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP, (8) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP, (9) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP, (10) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP, (11) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, (12) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP, (13) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Ditjen PDSPKP, (14) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (15) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP, serta (16) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.

3. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan lima indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Nilai Ekspor Hasil Perikanan, (2) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan, (3) Pembiayaan Usaha KP melalui Kredit Program, (4) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP, dan (5) Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
5. Terdapat dua indikator kinerja belum mencapai target Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu nilai ekspor hasil perikanan dengan persentase capaian 83,16% terhadap target Triwulan IV Tahun 2023, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PDSPKP dengan persentase capaian 95,86% terhadap target Triwulan IV Tahun 2023.

Pada Triwulan IV Tahun 2023, anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp343.280.613,00. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp50.000.000,00. sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp343.230.613.000,00. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar Rp339.923.400.945,00 atau setara dengan 99,02% terhadap total pagu anggaran awal atau 99,04% terhadap pagu anggaran pasca blokir. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.307.212.055,00.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaaan Sumber Daya Manusia Aparatur	5
E. Permasalahan Utama	6
F. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja	17
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
1. Volume produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat	26
2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan	26
3. Konsumsi Ikan	34
Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan	38
4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	38
5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan	44
6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	50
7. Nilai PNBPDitjen PDSPKP	57
8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	58
Sasaran 4. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat	60
9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	60
Sasaran 5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	64
10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP	64
11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	66
12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	69

13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	71
14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	74
15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	77
16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	78
17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	82
18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	83
19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	85
20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP	88
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP	91
22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP	93
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	96
C. Realisasi Anggaran	99
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Permasalahan dan Rekomendasi	102
C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022	105
LAMPIRAN	106
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023	15
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2023	18
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan	26
Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan IV Tahun 2023	28
Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan IV Tahun 2023	28
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan	34
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	39
Tabel 9. Nilai Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	40
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan	45
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	50
Tabel 12. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023	52
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	57
Tabel 14. Rekapitulasi PNBP Ditjen PDSPKP sampai dengan triwulan IV tahun 2023	58
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	59
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	61
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP	64
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	67
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	69
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	71
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	74
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	77
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	79
Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	82
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	84

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	86
Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP	88
Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP	91
Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP	93
Tabel 30. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	97
Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan IV Tahun 2023	99
Tabel 32. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan IV Tahun 2023	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP	5
Gambar 3. Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2023	5
Gambar 4. NKO Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023	17
Gambar 5. Cleansing Data dan Penghitungan VPO Semester I	22
Gambar 6. Rapat Koordinasi Data Utilitas dan VPO	23
Gambar 7. Perhitungan VPO Setara Produk dan VPO Setara Bahan Baku UPI Menengah dan Besar	23
Gambar 8. Penghitungan VPO dan Utilitas Semester II	24
Gambar 9. Rapat Koordinasi Data Utilitas dan VPO UPI Menengah Besar Dengan Enumerator	24
Gambar 10. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk KP sampai TW IV Tahun 2023	25
Gambar 11. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	26
Gambar 12. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Triwulan IV Tahun 2023	27
Gambar 13. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan IV Tahun 2023	29
Gambar 14. Keikutsertaan KKP Dalam SIAL Interfood	32
Gambar 15. Tangkapan Layar Laman Bursa Pasar Ikan	33
Gambar 16. Focus Group Discussion Major Project Pembangunan International Fish Market (IFM)	33
Gambar 17. Kampanye Gemarikan di Kabupaten Purbalingga	35
Gambar 18. Kegiatan Hari Ikan Nasional.	35
Gambar 19. Kegiatan Rakor Forikan	36
Gambar 20. Penyerahan Cool Box Kepada Penerima	36
Gambar 21. Penyerahan Mobil ATI kepada Penerima	37
Gambar 22. Pasar Ikan yang Dibangun Ditjen PDSPKP	37
Gambar 23. Sentra Kuliner yang Dibangun Ditjen PDSPKP	37
Gambar 24. Angka Perkiraan Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan IV Tahun 2022-2023 (Rp Triliun)	40
Gambar 25. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara (Top 5) Periode Triwulan III Tahun 2023 (Rp Miliar)	41
Gambar 26. Kegiatan Workshop Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan di Yogyakarta	42
Gambar 27. Dokumentasi Kegiatan Identifikasi peluang investasi pengolahan ikan di Kabupaten Pati Jawa Tengah	42
Gambar 28. Dokumentasi Kegiatan Survei lapangan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Ready to Offer di Kabupaten Cilacap	43
Gambar 29. Kegiatan Forum Bisnis Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi.....	43

Gambar 30. Pelaksanaan Survey Penghitungan IKLI semester II tahun 2023	48
Gambar 31. Pendampingan Pelaksanaan Survey IKLI semester II tahun 2023 di Makassar dan Kupang	48
Gambar 32. Rapat Persiapan Penghitungan IKLI semester II tahun 2023	49
Gambar 33. Rapat pengembangan metode pengukuran IKLI moda transportasi darat	49
Gambar 34. Pembinaan dan monitoring kepada tenaga pendamping usaha kelautan dan perikanan secara berkala baik via online maupun offline	54
Gambar 35. Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Pekalongan	55
Gambar 36. Penandatanganan Kerjasama antara Ditjen PDSPKP dengan PT. Permodalan Nasional Madani	56
Gambar 37. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP	61
Gambar 38. Kegiatan Pendampingan Pengumpulan data Tim NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel dan Penginputan Data NTPHP	62
Gambar 39. Monitoring Penginputan data dari Tim NTPHP Daerah pada Aplikasi NTPHP	63
Gambar 40. Kegiatan Validasi dan Penghitungan NTPHP pada Semester II Tahun 2023	63
Gambar 41. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Lingkup Direktorat Jenderal	65
Gambar 42. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Usaha dan Investasi	66
Gambar 43. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Area of Improvement (AOI)	68
Gambar 44. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai Triwulan III dan IV Tahun 2023 lingkup Ditjen PDSPKP, 8 Desember 2023	70
Gambar 45. Workshop Pelaporan Kinerja Ditjen PDSPKP	72
Gambar 46. Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal Teknokratik Ditjen PDSPKP	.72
Gambar 47. Benchmarking SAKIP dan RB Tematik KKP	73
Gambar 48. Verifikasi data Capaian kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2023	73
Gambar 49. Kegiatan Pembahasan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	78
Gambar 50. Bimbingan Teknis Penerapan Komunikasi Inklusif dan Memaksimalkan Budaya Pelayanan Prima Ditjen PDSPKP	81
Gambar 51. Forum Konsultasi Publik, tanggal 13 Desember 2023	82
Gambar 52. Kegiatan Penginputan Capaian Output Ditjen PDSPKP	.85
Gambar 53. Kegiatan Penginputan Capaian Output Ditjen PDSPKP	87
Gambar 54. Pengisian dan Pengumuman RUP Tahun 2024 di Hotel Alila, Solo - Jawa Tengah	90
Gambar 55. Gelar Progress PBJ Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2023 di Lounge Gedung Mina Bahari III	90
Gambar 56. Penyusunan Laporan Bulanan PBJ dan Update Progress PBJ di Raiser Ikan Hias Cibinong	90
Gambar 57. Kegiatan Serah Terima Kapal MV Silver Sea II di Sabang, Aceh	95
Gambar 58. Kegiatan Evaluasi Implementasi Satu Data KP Bidang PDSPKP	97

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023

Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

A.

B. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Triwulan IV Tahun 2023 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengomunikasikan dan menjawab apa yang telah dicapai pada Triwulan IV Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

D. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Usaha dan Investasi;
3. Direktorat Logistik;
4. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
5. Direktorat Pemasaran.



Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;

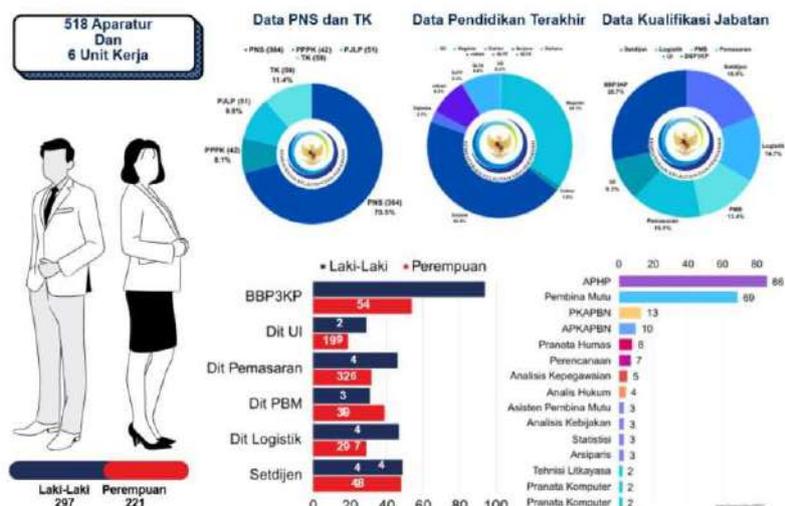
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2 Struktur Organisasi BBP3KP

E. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2023 mencapai 518 orang yang terdiri 297 pegawai Laki-laki dan 221 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3 Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2023

F. Permasalahan Utama

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terbagi dalam enam kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, tantangan peningkatan ekspor ikan, ancaman *stunting*, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil, dan permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan. Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur perikanan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah. Kesulitan akses pembiayaan terutama terjadi pada pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan, karena belum *bankable* dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur potensial. Beberapa pelaku usaha masih mengalami hambatan berusaha dan investasi terutama terkait perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, tantangan yang dihadapi adalah minimnya informasi peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan yang salah satunya karena ketersediaan profil investasi yang *ready to offer* serta promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan *online* yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta yang belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal.

Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan

perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada *ranking timeline* 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (*ranking* 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vietnam, dan Malaysia).

Di sisi sarana dan prasarana logistik, ketersediaan *cold storage*, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan, serta kapasitasnya juga masih terbatas. Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit. Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra distribusi/pemasaran yang membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat. Hal ini perlu dipecahkan dengan mengembangkan Sistem Telusur Logistik Ikan (STELINA) yang lebih baik dan implementasinya dapat berimprovisasi dengan *IoT system*.

Untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dalam pencapaian target ekspor, yaitu:

1. Kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal;
2. Belum kompetitifnya produk perikanan di pasar utama dunia (rendahnya *market share*);
3. Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT);
4. Adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil;
5. Rendahnya utilitas UPI untuk tujuan ekspor.
6. Isu tuduhan CVD dan anti dumping udang

Ancaman *stunting* (gizi buruk) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. *Stunting* timbul salah satunya karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap ikan, terutama di wilayah pedalaman dan aksesnya jauh ke pesisir, harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi. Akibatnya, sering tidak

peduli dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, mutu ikan yang dijual di pasar-pasar yang jauh dari pesisir terutama yang pengelolaannya tradisional umumnya kurang baik, sehingga minat beli masyarakat turun. Beberapa wilayah juga belum menjadikan ikan sebagai sumber utama protein bagi keluarganya. Pemenuhannya diperoleh dari sumber nabati yang konsumsinya juga terbatas. Dalam hal pengembangan usaha skala mikro kecil, kapasitas produksi dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkan masih rendah, sedangkan menjadi pelaku utama dalam penyediaan produk ikan di Indonesia termasuk ke pasar-pasar pedalaman. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan. Hingga saat ini, jumlah usaha mikro kecil kelautan dan perikanan yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan masih di bawah 1%.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klusterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor namun masih minim pembinaan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, *traceability*) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan

permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Hal ini terus berulang setiap tahunnya, dan beberapa yang tidak kuat bersaing terpaksa menutup usahanya.

Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*), dan belum memiliki sertifikat lingkungan. Permasalahan ini menjadi penghambat beberapa usaha pengolahan skala menengah besar dalam memanfaatkan peluang ekspor produk kelautan dan perikanan. Hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi ikan dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan *online*, lelang *online*, dan *block chain* dalam penelusuran bahan baku/logistik ikan perlu dilakukan. Perizinan *online* perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

G. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan IV Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan IV Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

LKj Ditjen PDSPKP

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum tentang Ditjen PDSPKP, dengan penekanan kepada aspek strategis Ditjen PDSPKP.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 dan analisisnya.

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Ditjen PDSPKP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran Ditjen PDSPKP serta gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PDSPKP, maka dirumuskan visi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

VISI

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sejalan dengan visi tersebut, telah dirumuskan misi Ditjen PDSPKP berupa upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

MISI

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Penguatan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

Tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain:

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, yaitu dengan berbagai upaya untuk :
 - Meningkatkan nilai investasi pada usaha kelautan dan perikanan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan *joint venture*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kemitraan investasi, jumlah fasilitasi perizinan, ketertarikan terhadap promosi investasi, dan pemanfaatan paket investasi yang disediakan pemerintah;
 - Mengembangkan usaha hasil kelautan dan perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini yang ditunjukkan dengan meningkatnya pelayanan pembiayaan usaha, berkembangnya kemitraan inti plasma dan sejenisnya, meningkatnya penjangkaran akses debitur, pendampingan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*), tumbuhnya wirausaha baru, magang calon wirausaha, serta penguatan inkubator bisnis.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil kelautan dan perikanan, yaitu upaya pengembangan aktivitas logistik yang memiliki jaringan/konektivitas yang kuat di pusat produksi, pusat pengumpulan produk, pusat distribusi, dan pasar produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya struktur ekonomi pelaku logistik produk kelautan dan perikanan, kebutuhan dan ketersediaan produk yang lebih terjamin, sarana penyimpanan dan *buffer stock* hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi baik, sistem distribusi dan jasa logistik yang berjalan baik, tata niaga dan pengelolaan koridor logistik yang lebih baik;
3. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri, merupakan upaya untuk :
 - Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas transaksi di pasar ikan modern, pasar ikan bersih, pasar ikan lokal, dan sentra kuliner, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan dan bazar produk perikanan, menyebarnya peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen

- dalam negeri, meningkatnya pemanfaatan alat dan sarana pemasaran ikan yang diberikan oleh pemerintah, berkurangnya penyakit akibat gizi buruk dan protein kurang, dan terjadinya penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai sarana;
- Meningkatkan ekspor hasil perikanan, yang ditunjukkan dengan berkembangnya jaringan perdagangan internasional hasil perikanan baik secara bilateral, regional maupun multilateral, dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan;
4. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah, yaitu berbagai upaya untuk:
- Meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu baik pada UPI skala menengah besar maupun UPI skala mikro kecil, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku UPI, meningkatnya utilitas UPI, meningkatnya pengurusan sertifikat dan standar mutu pada UPI, dan berkembangnya aktivitas fasilitasi sarana prasarana pengolahan ikan;
 - Meningkatkan pengusahaan produk bernilai tambah, yang ditunjukkan dengan berkembangnya UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, berkembangnya UPI yang menggunakan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta meningkatnya produk-produk inovasi yang bernilai tambah;
 - Menambah kepedulian terhadap kelayakan pengolahan di UPI, yang ditunjukkan dengan terumuskannya standar kelayakan pengolahan hasil perikanan, penerbitan SNI produk kelautan dan perikanan, dan pengurusan SKP secara *online*.
5. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, yaitu upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan terpercaya yang ditunjukkan dengan dukungan manajemen yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSPKP, dukungan sarana dan prasarana internal yang mumpuni, layanan perkantoran yang cepat dan bersih.

Arahan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada 4 (empat) bidang tersebut dijelaskan :

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan (bidang usaha dan investasi). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
 - Kebijakan PDSPKP-1 : Peningkatan investasi kelautan dan perikanan;
 - Kebijakan PDSPKP-2: Pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil Kelautan dan perikanan (bidang logistik). Arahan kebijakannya adalah :
 - Kebijakan PDSPKP-3 : Pengembangan sistem logistik ikan dalam rangka konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor);
3. Meningkatkan ekspor hasil perikanan (bidang pemasaran). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
 - Kebijakan PDSPKP-4 : Fasilitasi dan keikutsertaan Indonesia dalam forum dialog/persidangan skala internasional dan promosi terkait dengan produk perikanan Indonesia di pasar internasional;
4. Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting* (bidang pemasaran). Arahan kebijakannya adalah :
 - Kebijakan PDSPKP-5 : Fasilitasi dan pemberian bantuan pemerintah dan pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, kelompok usaha dalam rangka peningkatan konsumsi makan ikan dan pengurangan *stunting* dalam masyarakat;
5. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah (bidang pengolahan dan bina mutu). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
 - Kebijakan PDSPKP-6 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala menengah besar;
 - Kebijakan PDSPKP-7 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro kecil;

- Kebijakan PDSPKP-8 : Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah;
- Kebijakan PDSPKP-9 : Penerapan standar kelayakan pengolahan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2022, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35
2	Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkatkan	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77
		3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,61
3	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	8,8
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	70,43
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	6,33
		7.	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600
4	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25
5	Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4
		11.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		13.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		14.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas	≤0,5

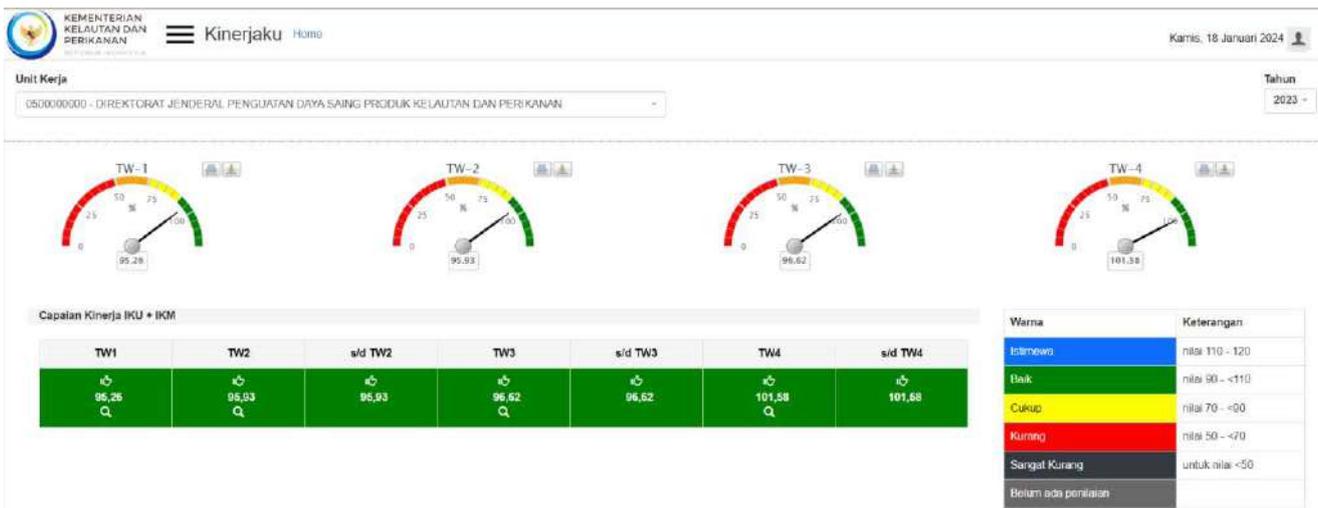
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	
		15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75
		16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		17. Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,75
		19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Oktober sampai dengan Desember 2023. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 101,58 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 NKO Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan IV Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV 2023	Persentase terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	TW IV 2023		Tahun 2023	TW IV 2023	
1	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35	7,35	7,38**	100,4	100,4
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77	6,77	5,63*	83,16	83,16
3	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,61	57,61	57,61*	100	100
4	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	8,8	8,8	11,10**	126,14	126,14
5	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	70,43	70,43	73,31	104,09	104,09
6	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	6,33	6,33	7,37	116,43	116,43
7	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65	8,65	15,22	175,95	175,95
8	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600	49.600	52.428	105,70	105,70
9	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25	104,25	104,67	100,40	100,40
10	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4	4	5	125	125
11	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1	3,1	3,83	123,54	123,54
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2	83,2	90,51	108,78	108,78
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5	80,5	83,01	103,12	103,12
14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5	0,26	0,26	120	120
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75	75	93,18	124,24	124,24
16	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik	75	75	79,79	106,39	106,39

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW IV 2023	Persentase terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW IV 2023		Tahun 2023	TW IV 2023
	Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)				
17	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	92	130	141,3
18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,75	93,75	89,87	95,86
19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	86	90,86	105,65
20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	77,5	79,69	102,83
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	77,5	95,32	122,99
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	77,5	97,50	125,80
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90	90	100	111,11

*angka sementara

**angka prognosa

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

1. Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk menyerap produksi perikanan dan kedua meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan dengan terintegrasikannya kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan, Jenis Kegiatan Pengolahan dibagi menjadi 13 yaitu: (1) Pendinginan/pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan/*jelly* ikan atau surimi, (9) Pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, (10) Pembuatan minyak ikan, (11) Pengolahan rumput laut, (12) Pengolahan lainnya, (13) Penanganan ikan.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35	7,35	7,5	7,38**	100,4	100,4	98,4	7,20	2,5

**angka prognosa capaian 2023
Sumber Data: Ditjen PDSPKP

Perhitungan Volume Produk Olahan Tahun 2023 telah dilakukan melalui pendataan dan perhitungan utilitas dan volume produk olahan setara utuh segar Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan nilai capaian 7,38 juta ton (prognosa). Capaian ini setara dengan 100,4% dari target yang

ditetapkan untuk tahun 2023, atau setara dengan 98,4% dari target jangka menengah 2024 yaitu 7,5 juta ton. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 7,2 juta ton setara 100% dari target 7,2 juta ton, maka capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,5%.

Peningkatan Nilai Volume Produk Olahan Produk Kelautan dan Perikanan sejalan dengan Peningkatan persentase Utilitas UPI dari tahun sebelumnya, yaitu dari 67% pada tahun 2022 menjadi 68,33% di tahun 2023. Beberapa hal yang telah dilakukan Ditjen PDSPKP antara lain:

1. Pendataan secara menyeluruh kepada UPI yang mencakup kapasitas terpasang, kapasitas sarana prasarana UPI lainnya, jumlah hari kerja dan shift, volume produk olahan yang dihasilkan dalam negeri dan luar negeri, tujuan negara, dan kendala yang dihadapi UPI;
2. Pembinaan terhadap UPI Skala Mikro dan Kecil dalam rangka peningkatan mutu, keamanan pangan, ragam, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan baik secara daring maupun pembinaan lapangan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran bagi UPI pentingnya menjaga mutu produk dan meningkatkan nilai tambah produk;
3. Bimbingan teknis terkait mutu produk kelautan dan perikanan, pemutakhiran cara penanganan dan pengolahan ikan yang baik yang berbasis risiko, serta bimbingan terkait nilai tambah hasil perikanan bagi pembina mutu baik yang dipusat maupun yang didaerah untuk menambah pengetahuan sebagai bekal memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UPI;
4. Sosialisasi mutu dan nilai tambah kepada UMKM di berbagai kab/kota di seluruh wilayah di Indonesia;
5. Pembinaan terkait alih teknologi produk kelautan dan perikanan supaya produk yang dihasilkan bernilai tambah tinggi dan edukasi terkait praktik kemasan ramah lingkungan;
6. Pembinaan terhadap UPI Skala Menengah dan Besar, diantaranya terkait penerapan kelayakan dasar pengolahan produk KP, pencegahan potensi cemaran salmonella pada proses pengolahan, pembinaan

terkait kaidah jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari proses produksi hingga pemasaran produk melalui program gerai SKP dan klinik mutu;

7. Memberikan Bantuan pemerintah antara lain membangun pabrik es, pengadaan *Chest Freezer*, penyediaan peralatan pengolahan, dan penyediaan sarana pasca panen yang diperlukan oleh UPI dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan produksi, efisiensi waktu, dan peningkatan daya simpan.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja dimaksud, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp16.382.579.169,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi tersebut setara dengan 99,54% terhadap pagu sebesar Rp16.459.380.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp76.050.831,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,54%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

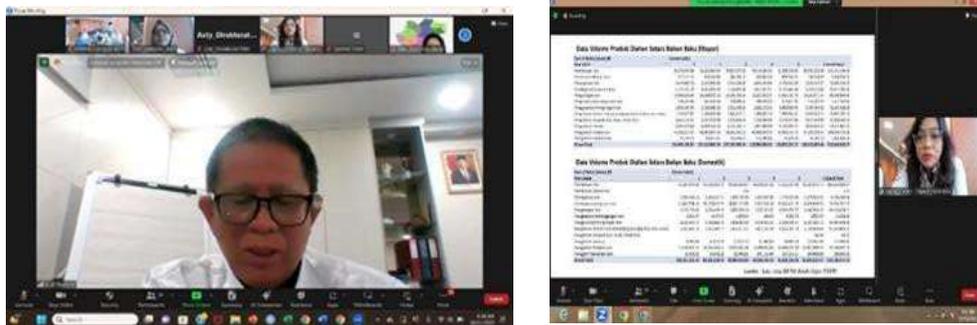
- a. Telah dilakukan *cleansing* data dan penghitungan VPO semester I pada tanggal 3 Oktober 2023 yang bersumber dari data lalu lintas ekspor dan domestik keluar;



Gambar 5 Cleansing Data dan Penghitungan VPO Semester I

- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Data Utilitas dan VPO pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan mengundang seluruh enumerator Provinsi. Rapat bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil penginputan

data sarana prasarana dan kapasitas terpasang serta VPO dan kinerja UPI oleh enumerator hingga triwulan III;



Gambar 6 Rapat Koordinasi Data Utilitas dan VPO

- c. Melakukan perhitungan VPO setara produk dan VPO setara bahan baku UPI menengah dan besar Januari – Oktober pada tanggal 28 – 30 November 2023. Penghitungan dan *cleansing* data dilakukan meliputi produk konsumsi dan non konsumsi kecuali benih ikan, induk ikan, ikan hias, pakan ikan, cangkang ikan, artemia, coral dan lainnya;



Gambar 7 Perhitungan VPO Setara Produk dan VPO Setara Bahan Baku UPI Menengah dan Besar

- d. Melakukan kegiatan Penghitungan VPO dan Utilitas Semester II pada tanggal 18 Desember 2023 di Bandung Jawa Barat. Rapat bertujuan untuk melakukan penghitungan hasil *cleansing* data lalu lintas BKIPM ekspor maupun domestik hingga bulan November, menghitung nilai utilitas berdasarkan data kapasitas dan produksi yang masuk dari data yang disampel oleh enumerator provinsi, hingga melakukan analisis sederhana dari hasil penghitungan yang diperoleh;



Gambar 8 Penghitungan VPO dan Utilitas Semester II

- e. Rapat koordinasi data utilitas dan volume produk olahan UPI menengah besar dengan enumerator pada tanggal 19 Desember 2023 untuk melakukan evaluasi hasil penginputan, melakukan identifikasi permasalahan enumerator dalam proses pengumpulan data dan koordinasi untuk melengkapi dan memperbaiki data Kapasitas Terpasang dan Sarana Prasarana.



Gambar 9 Rapat Koordinasi Data Utilitas dan VPO UPI Menengah Besar dengan Enumerator

- f. Pemberian layanan sertifikasi SNI dan pengujian produk kelautan dan perikanan sebagai upaya penjaminan mutu serta peningkatan daya saing produk olahan. Pada tahun 2023, capaian kegiatan layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan dilaksanakan sebanyak 1 layanan untuk 90 produk dari target 1 layanan untuk 90 produk, sedangkan capaian kegiatan layanan pengujian produk kelautan dan perikanan dilaksanakan sebanyak 1 layanan untuk 1042 produk dari target 1 layanan untuk 312 produk.



Gambar 10 Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk KP sampai TW IV Tahun 2023

- i. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui dua kegiatan:
 - (a) Pencetakan media informasi berupa *leaflet* (Inkubasi Bisnis dan Profil BBP3KP), panel (Layanan Sertifikasi SNI dan Inkubasi Bisnis Invapro KP), buku Standar Pelayanan Publik BBP3KP, kalender, dan jurnal pasca panen;
 - (b) Penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi sampai dengan Triwulan IV dilakukan pada 35 *event* diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan yaitu di Kab. Bandung, Kab. Maluku Tengah, Kota Jakarta, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Kab. Bekasi, Kab. Cirebon, Kota Batam, Kota Padang, Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Banyuwangi, Kota Mataram, Kota Padang, Maluku Tengah, Pekalongan, dan Pontianak dengan total penerima informasi sampai dengan bulan Desember yaitu 1197 orang;



Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan penyebarluasan Informasi melalui MOBILATI pada kegiatan Bazar KKP



Penyebarluasan Informasi dalam rangka Indonesia Quality Expo 2023



Festival Ikan Hias Nusantara 2023 di Epicentrum Walk (Epiwalk) Mall, Kuningan, Jakarta



Penyebarluasan Informasi melalui kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Pengujian di Cirebon



Penyebarluasan Informasi dalam rangka Bimtek Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana Raiser Ikan Hias Satker BBP3KP Cibinong di Kabupaten Garut



Penyebarluasan Informasi melalui kegiatan Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Gambar 11 Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode *Harmonized System* (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan

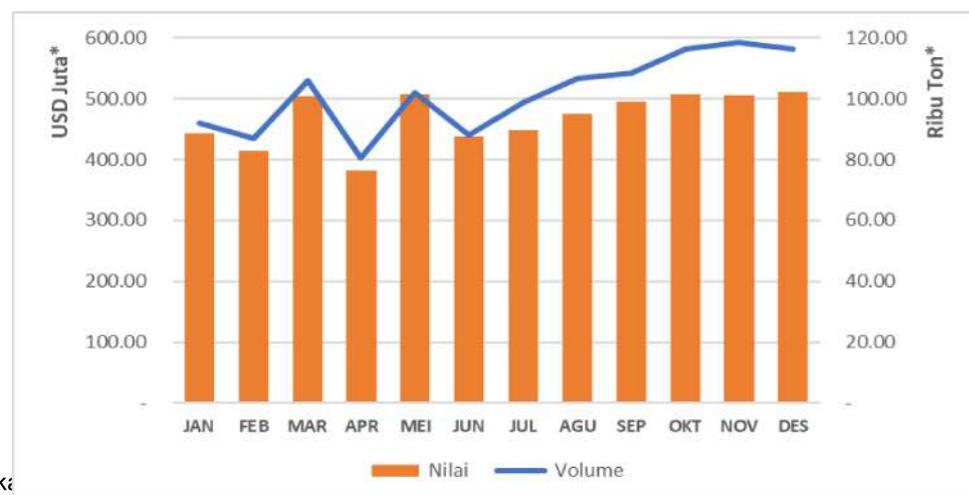
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022- TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77	6,77	8	5,63*	83,16	83,16	70,37	6,24	-9,19

*angka sementara s.d Bulan Desember 2023
Sumber Data: BPS (diolah Ditjen PDSPKP)

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia Triwulan IV tahun 2023 mencapai USD 5,63 miliar (angka sementara). Capaian tersebut setara dengan 83,16% terhadap target tahun 2023 (USD 6,77 miliar). Jika dibanding target jangka menengah tahun 2024 (USD 8 miliar), maka

capaian ini telah mencapai 70,37%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2022 yakni USD 6,24 miliar (87,52%) dari target USD 7,13 miliar, maka capaian Triwulan IV tahun 2023 turun sebesar 9,19%.

Penurunan nilai ekspor hasil perikanan tersebut juga sejalan dengan penurunan nilai ekspor non migas dan ekspor Indonesia secara keseluruhan di tahun 2023. Dibanding periode yang sama pada tahun 2022, ekspor non migas mengalami penurunan sebesar 11,33%, sedangkan ekspor Indonesia secara keseluruhan turun sebesar 11,96% (BPS, 2023).



*angka

Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 12 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Triwulan IV Tahun 2023

Nilai ekspor hasil perikanan Triwulan IV tahun 2023 berkontribusi sebesar 2,18% terhadap nilai ekspor nasional tahun 2023 sebesar USD 258,8 miliar (angka sementara) atau 2,32% terhadap nilai ekspor non migas Triwulan IV tahun 2023 yakni sebesar USD 242,9 miliar (BPS, Desember 2023).

Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan IV Tahun 2023

Jenis Komoditas	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
Udang	220.858.901	18,1	1.729.400.632	30,7
Tuna-Tongkol-Cakalang	203.201.462	16,6	927.180.140	16,5
Cumi-Sotong-Gurita	152.936.063	12,5	762.708.981	13,5
Rumput Laut	265.843.755	21,8	433.715.441	7,7
Rajungan-Kepiting	28.993.379	2,4	445.959.225	7,9
Lainnya	348.748.816	28,6	1.330.525.680	23,6
Total	1.220.582.382		5.629.490.103	

*angka sementara s.d Bulan Desember 2023
Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Terdapat 5 jenis komoditas utama ekspor dari Indonesia antara lain udang, tuna-tongkol-cakalang, cumi-sotong-gurita, rumput laut, dan rajungan-kepiting. Selain 5 jenis komoditas utama tersebut, terdapat komoditas lainnya meliputi mutiara, tilapia, ikan hias, sarden, kerapu, layur, surimi, hati-telur ikan, dan sebagainya dengan kontribusi 23,6% atau USD 1,33 miliar.

Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan IV Tahun 2023

Negara Tujuan	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
United States	217.826.107	17,8	1.908.029.995	33,9
China	438.654.115	35,9	1.138.660.830	20,2
Japan	113.921.855	9,3	690.708.153	12,3
ASEAN	216.838.601	17,8	674.831.445	12,0
Uni Eropa	55.753.688	4,6	333.699.740	5,9
Timur Tengah	38.353.586	3,1	145.451.255	2,6
Lainnya	139.234.430	11,4	738.108.676	13,1
Total	1.220.582.382		5.629.490.103	

*angka sementara s.d Bulan Desember 2023
Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Berdasarkan negara tujuan, nilai ekspor produk perikanan terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar USD 1,91 milyar (33,9%), China sebesar USD 1,14 milyar (20,2%), Jepang sebesar USD 690,71 juta (12,3%), ASEAN sebesar USD 674,83 juta (12,0%), Uni Eropa sebesar USD 333,69 juta (5,9%), dan Timur Tengah sebesar USD 145,45 juta (2,6%).



*angka sementara s.d Bulan Desember 2023
 Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 13 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan IV Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 13 terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan terbesar yaitu (1) Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 29,53%, (2) Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 20,57%, dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 8,13%.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan triwulan IV tahun 2023 antara lain :

- a. Tren penurunan harga komoditas, kondisi global dan perlambatan ekonomi dunia serta aktivitas produksi atau industri di berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan permintaan global juga menurun. Berdasarkan data BPS tahun 2023 tercatat total nilai ekspor Indonesia pada Januari – Desember 2023 mencapai 258,82 miliar dollar AS, turun 11,33 persen dibandingkan ekspor 2022 yang sebesar 275,96 miliar dollar AS (BPS, 2023);
- b. Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya

beli masyarakat. Adapun rincian penurunan impor produk perikanan sebagai berikut :

1) Amerika Serikat

Total nilai impor produk perikanan di AS hingga Oktober 2023 mengalami penurunan sebesar 17,37% menjadi USD 23,09 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 27,94 miliar, dengan rincian:

- a) Udang turun sebesar USD 1,65 miliar (-22,89%);
- b) Rajungan-kepiting turun sebesar USD 1,43 miliar (-47,63%);
- c) Tuna -Cakalang-Tongkol turun sebesar USD 417,19 Juta (-19,62%);
- d) Tilapia turun sebesar USD 122,39 Juta (-17,31%);
- e) Cumi -Sotong-Gurita turun sebesar USD 204,23 Juta (-27,79%);
- f) Rumput laut turun sebesar USD 30,00 Juta (-10,20%).

(Sumber data: Ditjen PDSPKP diolah dari Trademap.org)

2) Uni Eropa

Total nilai impor produk perikanan di Uni Eropa (*extra-trade*) hingga Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 1,17% menjadi USD 23,75 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 24,03 Miliar, dengan rincian:

- a) Udang turun sebesar USD 493,52 Juta (-14,71%);
- b) Cumi-Sotong-Gurita turun sebesar USD 211,78 Juta (-8,6%);
- c) Tuna-Cakalang-Tongkol turun sebesar USD 3,83 Juta (-0,18%);
- d) Tilapia turun sebesar USD 23,91 Juta (-33,05%).

(Sumber data: Ditjen PDSPKP diolah dari Trademap.org)

3) Jepang

Total nilai impor produk perikanan di Jepang hingga Oktober 2023 mengalami penurunan sebesar 6,71% menjadi USD 11,72 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 12,56 miliar, dengan rincian:

- a) Udang turun sebesar USD 371,15 Juta (-19,36%);
- b) Tuna -Cakalang-Tongkol turun USD 85,50 Juta (-4,92%);
- c) Rajungan-Kepiting turun sebesar USD 155,38 Juta (-26,25%);

- d) Cumi -Gurita turun sebesar USD 40,17 Juta (-3,83%);
- e) Tilapia turun sebesar USD 288,00 Ribu (-13,19%).

(Sumber data: Ditjen PDSPKP diolah dari Trademap.org)

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan periode kedepan, antara lain:

- a. Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial salah satunya yaitu keikutsertaan dalam pameran *seafood expo North America* pada tanggal 10 – 12 Maret 2024;
- b. Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan *protocol* perubahan *Indonesia-Japan Economic Partnership* (IJEPA) yang telah disepakati pada 16 Desember 2023 yaitu proses *legal scrubbing* untuk penyamaan konteks bahasa hukum. Setelah proses tersebut selesai, akan dilakukan proses penerjemahan dan ratifikasi di parlemen sesuai prosedur masing-masing negara;
- c. Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan *Anti-dumping*.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan sebesar Rp13.590.500.000,00 dan pada Triwulan IV tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp13.531.425.143,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,57% terhadap total alokasi anggaran.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan III Tahun 2023, antara lain:

- a. Keikutsertaan KKP pada *Seafood Show of Asia Expo (SSA) - SIAL Interfood 2023*, pada 8 – 11 November 2023 bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Potensi transaksi sebesar Rp1,65 miliar. Produk yang diminati antara lain *fish skin snack*, pempek ikan dan udang, *baby fish snack*, *snack* olahan rumput laut, minuman olahan rumput laut, olahan ikan lele, sambal ikan, pepes ikan, kerupuk ikan, mie ikan bandeng, ikan kaleng olahan, abon ikan dan bandeng isi tanpa duri. Para

calon *buyers* potensial antara lain berasal dari Indonesia, Malaysia, Turki, RRT dan Jepang;



Gambar 14 Keikutsertaan KKP Dalam SIAL Interfood

- b. Keikutsertaan dan/atau fasilitasi forum perluasan akses pasar negara tujuan ekspor yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan ekspor komoditas unggulan perikanan melalui penanganan hambatan ekspor, pembukaan akses pasar ekspor, dan perundingan perdagangan bilateral/regional/multilateral. Forum yang diikuti antara lain forum Kerjasama Indonesia – Singapore Agribusiness Working Group (ISAWG), menyelesaikan perundingan Protokol Perubahan Indonesia – *Japan Economic Partnership Agreement (JEPA)* yang mengakomodasi kepentingan Indonesia dengan pembebasan tarif empat pos tarif produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia, dan mengikuti forum Perkembangan Pemenuhan Persyaratan Ekspor Udang Tangkapan (*wild-caught shrimp*) ke Amerika Serikat;
- c. Pengembangan sistem informasi berupa bursa pasar ikan berbasis *website* yang dapat mengakses aplikasi tanpa perlu mengunduh melalui alamat <https://bursaikan.kkp.go.id/>. Ditjen PDSPKP mendorong hilirisasi dengan target agar UMKM dapat naik kelas dan mampu melakukan ekspor produk kelautan dan perikanan. Peran bursa pasar ikan adalah menyediakan informasi terkait persyaratan dan prosedur ekspor yang dapat diakses oleh para pelaku usaha.



Gambar 15 Tangkapan Layar Laman Bursa Pasar Ikan

- d. Melaksanakan *Focus Group Discussion Major Project* Pembangunan *International Fish Market (IFM)*, yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Desember 2023 bertempat di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara;



Gambar 16

Focus Group Discussion Major Project* Pembangunan *International Fish Market (IFM)

- e. Penyusunan Profil Ekspor hasil kelautan perikanan yang meliputi Profil Pasar Kepiting, Profil Pasar Rumput Laut, Profil Pasar Tilapia dan Profil Pasar Rumput Laut. Profil ekspor tersebut telah disampaikan pada berbagai forum dan kegiatan diantaranya:
- 1) Kegiatan Sosialisasi Korporasi Pembudidaya Ikan di Kabupaten Karawang pada tanggal 12 – 13 Oktober 2023, disampaikan oleh Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP;
 - 2) *Focus Group Discussion (FGD)* Rancangan Awal Teknokratik Ditjen PDSPKP tahun 2025 – 2029 di Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Oktober 2023, disampaikan oleh Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP;

- 3) Orasi Ilmiah dengan tema Strategi Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan Indonesia Melalui Inovasi dan Pengembangan Produk Berorientasi Global di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 1 September 2023, disampaikan oleh Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP.

3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS.

Konsumsi Ikan merupakan angka konsumsi ikan perkapita secara Nasional (secara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode satu tahun.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,61	57,61	62,5	57,61*	100	100	92,17	57,27	0,59

*angka sementara

Konsumsi ikan tahun 2023 ditargetkan sebesar 57,61 kg/kapita. Mengacu pada memo Capaian Sementara Angka Konsumsi Ikan Nasional Tahun 2023 Nomor. 3483/DJPDSKP.4/TU.210/XII/2023 hasil penghitungan capaian sementara AKI nasional tahun 2023 sebesar 57,61 kg/kapita setara ikan utuh segar atau mencapai 100% dari target. Dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 62,5, maka capaian tahun 2023 setara dengan 92,17%. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,34 kg/kapita setara ikan utuh segar atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,59% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 57,27 kg/kapita setara ikan utuh segar atau 94,88% dari target 59,53 kg/kap.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Konsumsi Ikan sebesar Rp64.082.132.000,00

dan pada Triwulan IV tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp63.921.382.774,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,75% terhadap total pagu anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp367.464.782,00 Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,75%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diselenggarakan sebanyak 185 promosi, terdiri dari kegiatan Perluasan Safari Gemarikan dalam rangka pencegahan *stunting* gizi buruk (165 promosi), Pelaksanaan Bazar (14 bazar), dan Promosi pada Media Sosial Gemarikan (6 promosi);



Gambar 17 Kampanye Gemarikan di Kabupaten Purbalingga

- b. Kegiatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 November di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.



c.

Gambar 18 Kegiatan Hari Ikan

- c. Koordinasi Nasional Forikan dalam rangkaian Harkannas ke-10 pada tanggal 20 November 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat



Gambar 19 Kegiatan Rakor Forikan

- d. Pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan pasar ikan yang telah dilaksanakan pada 89 lembaga;
- e. Pengadaan bantuan pemerintah peralatan pemasaran (*coolbox*) sebanyak 5.324 unit untuk 345 kelompok penerima di 96 Kabupaten/kota ;



Gambar 20 Penyerahan Cool Box Kepada Penerima

- f. Pengadaan Mobil ATI sebanyak 3 (tiga) unit. Ketiga Mobil ATI tersebut telah diserahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada 3 koperasi penerima yaitu Koperasi Albar Asyarif Nusantara Jaya (Kab. Cianjur), Koperasi Sumber Sejahtera (Kab. Bogor), dan Koperasi Wono Minasari (Kab. Magelang) pada Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) tanggal 21 November 2023;



Gambar 21 Penyerahan Mobil ATI kepada Penerima

- g. Penyusunan profil pasar dalam negeri hasil kelautan dan perikanan sebanyak delapan data, yaitu 1 data AKI tahunan, 1 data AKI bulanan, 2 data Akses pasar dalam negeri, 3 data Profil pasar dan 1 data Peta kebutuhan berdasarkan preferensi konsumen;
- h. Pembangunan 4 Pasar Ikan dan 1 Gerai Ulam Mart Gambir Jakarta Pusat. Lokasi pembangunan pasar ikan adalah di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sula, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Muna.



Gambar 22 Pasar Ikan yang Dibangun Ditjen PDSPKP

- i. Pembangunan 5 Sentra Kuliner Ikan yaitu, Singkawang, Sumedang, Biak, Bau-Bau dan Pulau Pasaran Lampung;



Gambar 23 Sentra Kuliner yang Dibangun Ditjen PDSPKP

- j. Membuka layanan konsultasi melalui PTSP KKP, PTSP Pusat/BKPM, *call center* dan *email* resmi siup_pemasaran@kkp.go.id, serta membuka gerai layanan perizinan pada 62 lokasi Kabupaten/Kota.

Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan

4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ditjen PDSPKP menargetkan nilai investasi kelautan dan perikanan pada awal tahun 2023 sebesar Rp6,1 triliun, namun melihat kondisi investasi di Indonesia yang bertumbuh sepanjang tahun, sehingga pada tahun berjalan Ditjen PDSPKP menaikkan target investasi pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp8,8 Triliun dan Rp9 triliun untuk target jangka menengah pada tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi,

pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022- TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp Triliun)	8,8	8,8	6,43	11,10**	126,1 4	126,1 4	172,6 2	8,75	26,85

**angka prognosa

Realisasi investasi KP pada periode triwulan IV tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp1,54 triliun, sehingga secara akumulasi realisasi investasi KP tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp11,10 triliun, atau setara dengan 126,14% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp8,8 triliun. Perkiraan realisasi investasi KP tahun 2023 sebesar Rp11,10 triliun apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 yakni sebesar Rp6,43 triliun mencapai 172,62%. Apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp8,75 triliun (151,12%) dari target Rp5,79 triliun, maka realisasi investasi meningkat sebesar 26,85%.

Realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2022 sebesar Rp8,75 triliun, berkontribusi 0,72% dari total investasi nasional tahun 2022 sebesar Rp1.207,20 triliun. Realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan triwulan III tahun 2023 sebesar Rp9,56 triliun berkontribusi 0,91% terhadap total investasi nasional triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.053,10 triliun. Realisasi investasi periode Januari – September 2023 mencapai Rp 9,56 triliun yang terdiri dari PMDN sebesar Rp5,32 triliun, PMA sebesar Rp 1,40 triliun dan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 2,84 triliun.

Nilai investasi tahun 2023 yang bersumber dari PMA diperkirakan mencapai Rp1,63 triliun, PMDN Rp6,1 triliun dan kredit investasi sebesar Rp3,3 triliun sebagaimana Tabel.9.

Tabel 9. Nilai Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Triwulan	Sumber (RP Juta)			Grand Total
	PMA	PMDN	KI	
1	664.256,20	1.471.523,20	799.526,85	2.935.306,25
2	379.162,32	1.757.651,90	1.010.894,82	3.147.709,04
3	357.281,97	2.087.062,80	1.032.859,27	3.477.204,05
4*	226.098,15	858.136,02	458.956,48	1.543.190,65
Total	1.626.798,64	6.174.373,92	3.302.237,43	11.103.409,99*

*Angka Prognosa

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM dan OJK diolah Ditjen PDSPKP



*angka prognosa

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM dan OJK diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 24 Angka Perkiraan Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan IV Tahun 2022-2023 (Rp Triliun)

Gambar 24 menunjukkan Realisasi investasi yang bersumber dari PMA dan PMDN tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp7,80 triliun atau tumbuh 57,78% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4,94 triliun. Realisasi Kredit Investasi tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 3,30 triliun atau turun 13,16% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3,80 triliun. Penurunan realisasi investasi yang berasal dari kredit investasi disebabkan adanya kebijakan KUR

kembali ke masa sebelum Pandemi Covid 2019, yaitu suku bunga 6% tanpa tambahan subsidi bunga 3%, target penyaluran KUR di sektor produksi (termasuk sektor KP) kembali ditetapkan sebesar 60%, kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil maksimal Rp500 juta, dan memperpanjang kebijakan restrukturisasi KUR sampai dengan 31 Maret 2024.



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM dan OJK diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 25 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara (Top 5) Periode Triwulan III Tahun 2023 (Rp Miliar)

Gambar 3 menunjukkan TOP 3 asal negara investor di Indonesia pada periode triwulan III tahun 2023 adalah R.R. Tiongkok, Malaysia dan Swiss. Realisasi PMA terbesar berasal dari RRT sebesar Rp 370,74 miliar (26,47%), disusul Malaysia Rp 240,47 miliar (17,17%), dan Swiss Rp 152,89 miliar (10,92%).

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp85.744.988.481,00. dan pada Triwulan IV tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp304.136.519,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,65% terhadap total pagu anggaran. Upaya efisiensi dan efektifitas anggaran dan SDM dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan promosi peluang usaha dan investasi melalui webinar atau *virtual meeting* dan pelaksanaan fungsi pelayanan investasi melalui media *online*. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 126,13% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,65% dimana jumlah efisiensi anggarannya sebesar Rp304.136.519,00.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi diantaranya:

a. Pemetaan peluang investasi

- 1) Penyusunan peluang investasi *ready to offer* usaha pengolahan rumput laut di Kabupaten Wakatobi;
- 2) Survei lapangan penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* di Kabupaten Cilacap;
- 3) Workshop peluang investasi kelautan dan perikanan di Yogyakarta;



Gambar 26 Kegiatan *Workshop* Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan di Yogyakarta

- 4) Identifikasi peluang investasi di Kabupaten Pati Jawa Tengah;



Gambar 27 Dokumentasi kegiatan identifikasi peluang investasi pengolahan ikan di Kabupaten Pati Jawa Tengah

- 5) Penyusunan Peluang Investasi *Ready to Offer* Usaha Pengolahan Udang di Kabupaten Cilacap;



Gambar 28 Dokumentasi kegiatan survei lapangan penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* di Kabupaten Cilacap

- 6) Survei lapangan penyusunan analisa usaha pengolahan ikan di Kabupaten Pati;
 - 7) Survei pengumpulan bahan *booklet* peluang investasi usaha Komoditas Nila di Kabupaten Karawang;
 - 8) Survei pengumpulan bahan *booklet* peluang investasi usaha Komoditas Nila dan Lobster di Bogor ;
 - 9) Penyusunan *booklet* peluang investasi usaha 5 komoditas yaitu udang, rumput laut, nila, kepiting dan lobster.
- b. Promosi usaha dan investasi
- 1) Forum Bisnis Peluang Usaha Ikan Hias di Indonesia pada Festival Ikan Hias Nusantara dalam rangka mendukung Kalikan Expo;
 - 2) Pameran Sail Teluk Cendrawasih;
 - 3) Forum Bisnis Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi;



Gambar 29 Kegiatan Forum Bisnis Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi

- c. Pendampingan Investasi antara lain:
- 1) Pelayanan dan perizinan usaha pengolahan hasil perikanan;
 - 2) Pendampingan rencana investasi PT. Indo Rama;
 - 3) Pendampingan rencana investasi PT. Mitra Agro Global.

5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diamanahkan pada Pasal 13 ayat 3 bahwa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja SLIN menggunakan kaidah pengukuran secara ilmiah berdasarkan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI). Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) diperlukan untuk mengukur performa dari sistem logistik ikan di suatu koridor yang ditentukan. Angka capaian IKLI berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja sistem logistik ikan yang telah berjalan berdasarkan dimensi pembentuknya. Penghitungan IKLI menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan instrumen kuesioner kepada instansi terkait, pelaku jasa logistik dan pelaku usaha perikanan.

Penghitungan IKLI dilakukan dengan mengukur performa atribut berdasarkan persepsi penilaian responden dari lima dimensi pembentuk yaitu :

- 1) Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan : memberikan gambaran tentang ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan produksi dan pengadaan ikan sebagai panduan untuk proses distribusi;
- 2) Dimensi Efisiensi : memberikan gambaran tingkat penggunaan sumberdaya (resource) dibandingkan dengan output/manfaat yang diperoleh;
- 3) Dimensi Konektivitas : memberikan gambaran terkait konektivitas sehingga pelaku logistik mendapatkan kemudahan untuk mendistribusikan barang dan proses logistik menjadi berkembang;
- 4) Dimensi Manfaat : memberikan gambaran bahwa sistem logistik memberikan nilai tambah bagi proses perencanaan dan distribusi ikan, sehingga ekonomi lokal berkembang baik;
- 5) Dimensi Tata Kelola : memberikan gambaran terhadap pengaruh kunci penggerak utama Sistem Logistik Ikan Nasional (SISLOGNAS) terhadap komponen Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

Saat ini, penghitungan IKLI berdasarkan pada moda transportasi laut. Koridor logistik ditentukan dengan mempertimbangkan komoditas penentu,

wilayah atau kawasan serta konektivitas antar wilayah. Penilaian IKLI tahun 2023 dilakukan pada 6 koridor logistik, yaitu:

1. Bitung – Surabaya/Jakarta
2. Kupang – Surabaya/Jakarta
3. Kendari – Surabaya/Jakarta
4. Mimika – Surabaya/Jakarta
5. Ambon – Surabaya/Jakarta
6. Makassar – Surabaya/Jakarta

Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	70,43	70,43	71,90	73,31	104,09	104,09	101,96	70,43	4,09

Kinerja logistik hasil perikanan tahun 2023 ditargetkan sebesar 70,43. Pada triwulan IV tahun 2023, telah dilakukan penghitungan IKLI dengan realisasi indeks sebesar 73,31 atau 104,09% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibanding dengan target jangka menengah tahun 2024 (71,90), maka capaian ini telah mencapai 101,96%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 70,43 (125,77) dari target yang ditetapkan sebesar 56, maka capaian tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,09%.

Berdasarkan pembagian klasifikasi pemberian predikat hasil penilaian, didapatkan hasil bahwa IKLI tahun 2023 sebesar 73,31 masuk dalam kategori Baik. koridor yang memiliki indeks kinerja tertinggi yaitu koridor Makassar-Jakarta/Surabaya sebesar 75,32 sedangkan koridor dengan indeks kinerja terendah yaitu pada koridor Mimika-Jakarta/Surabaya sebesar 70,58. Berdasarkan indeks pada setiap dimensi, diketahui bahwa nilai dimensi manfaat termasuk dalam kategori “sangat baik”, nilai dimensi efisiensi, dimensi konektivitas dan tata kelola dalam kategori “baik”, dan nilai dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan dalam kategori “kurang”. Nilai dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan adalah kurang sehingga perlu adanya

peningkatan penyediaan data dan informasi logistik waktu nyata (realtime) yang rutin dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

Alokasi Anggaran untuk kegiatan pencapaian IKLI adalah sebesar Rp68.945.664.000,00. Realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp68.845.634.000,00 atau sebesar 99,85% dari alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp68.845.634,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 104,08% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,85%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian indikator kinerja IKLI selama periode triwulan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Konsolidasi kebutuhan dan ketersediaan ikan untuk mengurangi eksese *supply-demand* melalui Rapat Koordinasi dan Pemutakhiran Pendataan Stok Ikan di Cold storage di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023, 3 November 2023, 16 November 2023 dan 27 November 2023;
2. Penyediaan TIK untuk komponen SLIN (pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi) yang dapat diakses pada website <https://stelina.kkp.go.id/>;
3. Penyediaan sarana dan prasarana penyimpanan ikan berupa gudang beku portable sebanyak 17 unit (Kab Poso, Kota Kendari, Kab Pohuwato, Kab Sumbawa, Kab Halmahera Selatan, Kab Kep Sula, Kab Pangkep, Kab Tasikmalaya, Kab Tambraw, Kab Biak Numfor, Kota Bandar Lampung, Kab Wakatobi, Kab Sangihe, Kab Buru Selatan, Kota Tual, Kab Muko Muko dan Kab Banggai Laut);
4. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi ikan berupa mobil refrigerasi sebanyak 20 unit (Kab Pati, Kab Karangasem, Kab Indramayu, Kota Manado, Kab Halmahera Utara, Kota Bandung, Kab Buru Selatan, Kab Karawang, Kota Bandar Lampung, Kab Biak Numfor, Kab Rembang, Kab Merauke, Kab Halmahera Timur, Kota Ternate, Kab Maluku Tengah, Kab Lampung Timur, Kab Pinrang, Kab Pringsewu dan Kab Banyuwangi);
5. Penerapan standar mutu dan kualitas ikan melalui Bimbingan Proses Pembekuan dan Penyimpanan Ikan sesuai Standar Operasional Prosedur

- (SOP) di Gudang Beku Portabel (GBP) Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Desa Samber dan Binyeri Biak Numfor pada tanggal 16 November 2023;
6. Konsolidasi peningkatan volume pengangkutan distribusi melalui beberapa kegiatan antara lain:
 - a. *Focus group discussion* peningkatan kapasitas operator logistik dalam rangka distribusi hasil kelautan dan perikanan dengan moda transportasi kereta api di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 2023;
 - b. *Focus group discussion* penataan distribusi hasil perikanan dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi rantai distribusi bahan baku pemindangan di Kabupaten Lamongan tanggal 7 November 2023;
 - c. Rapat koordinasi penataan distribusi dan transportasi hasil perikanan dalam rangka peningkatan ekspor di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 9 November 2023;
 - d. Fasilitasi pengelolaan kapal pengangkut ikan dan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengadaan, penyimpanan, distribusi dan transportasi hasil perikanan di Pati pada tanggal 5 Desember 2023.
 7. Pendampingan penerapan *Warehouse Management System* (WMS) (<https://wms.pdspkp.id/admin>) dalam rangka pemantauan stok ikan di Sukabumi pada tanggal 28 Oktober 2023, di Kota Pelakongan pada tanggal 10 November 2023 dan Kota Cirebon pada tanggal 12 November 2023.
 8. Pertemuan persiapan survey IKLI semester ii tahun 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 melalui *zoom meeting*. Beberapa hal penting yang menjadi pembahasan dan diskusi dalam rapat antara lain:
 - a. Pembahasan kriteria responden IKLI semester 2 tahun 2023;
 - b. *Timeline* pengukuran IKLI semester;
 - c. Masing-masing tim IKLI daerah menyampaikan gambaran awal rencana kerja dan daftar responden yang akan disurvey;
 - d. Penyusunan rencana kerja survey IKLI yang meliputi penetapan responden dan jadwal survey.
 9. Pelaksanaan survey IKLI Semester II Tahun 2023 oleh tim IKLI daerah;



Gambar 30 Pelaksanaan Survey Penghitungan IKLI semester II tahun 2023

10. Pendampingan pelaksanaan survey IKLI Semester II Tahun 2023 oleh tim pusat dalam rangka akselerasi pelaksanaan survey IKLI. Pendampingan pelaksanaan survey dilakukan di koridor Makassar-Jakarta/Surabaya dan Kupang-Jakarta/Surabaya;

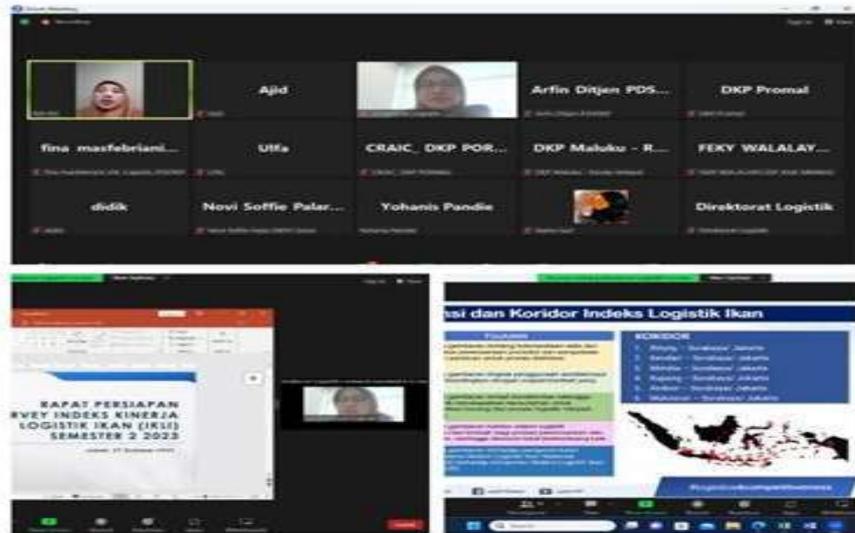


Gambar 31 Pendampingan Pelaksanaan Survey IKLI semester II tahun 2023 di Makassar dan Kupang

11. Rapat perkembangan survey IKLI semester II tahun 2023 pada tanggal 28 November 2023 melalui *zoom meeting*. Beberapa hal penting yg menjadi pembahasan dan diskusi dalam rapat adalah sebagai berikut:

- Laporan perkembangan survey IKLI masing-masing koridor;
- Pembahasan *timeline* pengukuran IKLI semester2 tahun 2023;

c) Persiapan pelaksanaan *workshop* IKLI semester 2 tahun 2023;



Gambar 32 Rapat Persiapan Penghitungan IKLI semester II tahun 2023

12. Rapat pengembangan metode pengukuran IKLI moda transportasi darat pada tanggal 30 November 2023 dengan hasil untuk pengukuran IKLI moda transportasi darat pada dasarnya sama dengan moda transportasi laut, hanya pada dimensi efisiensi perlu disesuaikan atribut pengukurannya dengan karakteristik jenis angkutannya;



Gambar 33 Rapat pengembangan metode pengukuran IKLI moda transportasi darat

13. *Workshop* penghitungan IKLI tahun 2023 dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 13 Desember 2023 di Hotel Royal Pajajaran, Bogor yang dihadiri oleh Pembina Mutu Ahli Utama, perwakilan Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, tim indeks kinerja logistik ikan koridor Mimika, Ambon, Kupang, Bitung, Kendari dan Makassar, serta perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Logistik. Narasumber pada kegiatan dimaksud yaitu perwakilan PT. Pelindo

Indonesia, perwakilan Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI), dan akademisi IPB. Hasil penghitungan IKLI tahun 2023 dihitung dengan meratakan nilai hasil penghitungan IKLI semester I dan II dengan hasil agregasi sebesar 73.31.

6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program menunjukkan jumlah realisasi pembiayaan kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (nonbank) kepada UMKM kelautan dan perikanan (KP). Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP dengan melakukan pemantauan penyaluran kredit program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh *Holding* Ultra Mikro, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar. Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, diantaranya fasilitasi akses pembiayaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) baik di pusat maupun daerah, pendampingan usaha, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit program.

Tabel 11 Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022- TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp Triliun)	6,33	6,33	3,9	7,37	116,4 3	116,4 3	188,9 7	10,49	-29,74

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Desember 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) menargetkan Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada awal tahun 2023 sebesar Rp9,6 Triliun, namun melihat kondisi penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Indonesia

cukup menurun sepanjang tahun sehingga pada tahun berjalan Ditjen PDSPKP menurunkan target pembiayaan menjadi sebesar 6,33 Triliun pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, koordinasi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi akses kredit sektor kelautan dan perikanan oleh Tenaga Pendamping Usaha dalam kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA).

Realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mencapai Rp7,37 triliun yang disalurkan kepada 246.143 pelaku usaha KP. Capaian ini setara dengan 116,43% terhadap target sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp6,33 triliun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp3,9 triliun, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 188,97%. Jika dibandingkan dengan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp10,49 triliun (116,18%) dari target Rp8,98 triliun, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 29,74%.

Realisasi KUR secara nasional sampai dengan triwulan IV 2023 mencapai Rp269,5 triliun atau menurun sebesar 30,01% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp385,1 Triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi KUR nasional, maka proporsi realisasi KUR sektor KP mencapai 2,5%.

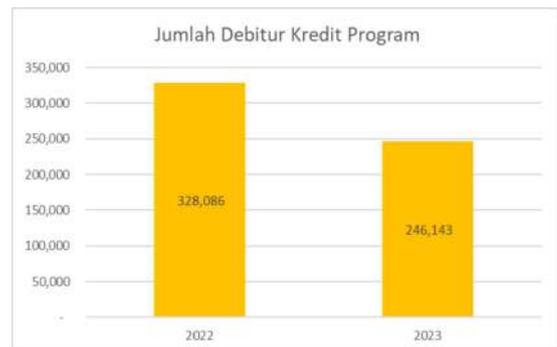
Tabel 12 menunjukkan bahwa berdasarkan sumber pembiayaan kredit program di Sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan IV, pembiayaan dari kredit usaha rakyat (KUR) merupakan persentase besar yaitu sebesar 91,45% dari nilai realisasi total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan dari sumber Ultra Mikro menyumbang 8,55% dari nilai realisasi total pembiayaan.

Tabel 12 Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023

Sumber Pembiayaan	Nilai (Rp)	Debitur (Pelaku Usaha)	Persentase terhadap Total Nilai (%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	6.744.473.812.533	130.644	91,45
Ultra Mikro (UMi)	630.384.500.000	115.499	8,55
Total	7.374.858.312.533	246.143	100,00

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Desember 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Jika dibandingkan dengan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp10,49 Triliun, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 29,74%. Jumlah debitur kredit program pada tahun 2023 adalah sebesar 246.143 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 328.086 maka capaian jumlah debitur juga mengalami penurunan sejumlah 24,98%.



Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Desember 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 34 Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023

Penurunan realisasi kredit program ini disebabkan oleh perubahan kebijakan KUR tahun 2023 yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, Lembaga Keuangan Penyalur KUR perlu melakukan penyesuaian sistem dalam penyaluran pembiayaannya. Adapun perubahan kebijakan dimaksud yaitu:

- a. Kebijakan KUR kembali ke masa sebelum Pandemi Covid 2019, yaitu suku bunga 6% tanpa tambahan subsidi bunga 3%, target penyaluran KUR di sektor produksi (termasuk sektor KP) kembali ditetapkan sebesar 60%, kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil maksimal

Rp500 juta, dan memperpanjang kebijakan restrukturisasi KUR sampai dengan 31 Maret 2024;

- b. Kebijakan KUR mendorong graduasi debitur, dimana terdapat penurunan suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3%, pembatasan maksimal akses KUR Mikro sebanyak 4 kali untuk sektor produksi (termasuk sektor KP), dan r suku bunga berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan KUR Kecil berulang;
- c. Kebijakan KUR untuk Memperluas Penyaluran dan Mendorong Peningkatan Debitur KUR, diantaranya penegasan pelaksanaan KUR tanpa agunan tambahan untuk plafon KUR sampai dengan Rp100 juta dan penambahan target debitur baru dan target debitur graduasi penyaluran KUR dengan plafon KUR tahun 2023 sebesar Rp450 triliun atau plafon sesuai kecukupan APBN 2023;
- d. Berdasarkan hasil evaluasi penyaluran KUR pada semester I 2023 yang mengalami perlambatan, pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan target KUR menjadi Rp279 triliun dari semula sebesar Rp450 triliun atau turun sebesar 34%, dengan tetap memperhatikan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR (Sumber : Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/249/SET.M.EKON.3/07/2023 tanggal 14 Juli 2023);

Secara umum beberapa permasalahan Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian nilai pembiayaan usaha KP antara lain:

- a. Akses pembiayaan yang sulit karena pelaku usaha belum bankable dalam kelayakan usaha;
- b. Masih minimnya informasi tentang calon debitur potensial.

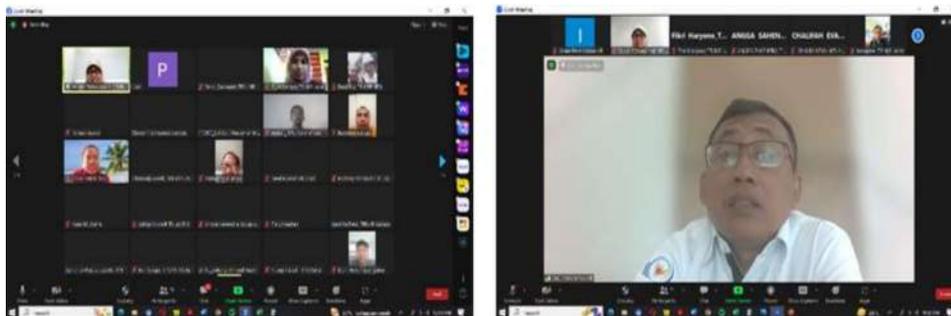
Beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan pada periode mendatang antara lain:

- a. Pembentukan Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator bidang perekonomian, Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Keuangan Perbankan dan non bank serta BLU LPMUKP;

- b. Koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam rangka peningkatan fasilitasi akses pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan;
- c. Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela berbasis wilayah dengan komoditas perikanan unggulan di daerah;
- d. Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintegrasikan debitur potensial berbasis data kusuka dengan lembaga pembiayaan Bank/Non Bank.

Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, Ditjen PDSPKP terus melakukan upaya dalam rangka mendorong pencapaian nilai pembiayaan usaha KP, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan IV sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi TW III tahun 2023 diantaranya:

- a. Pembinaan pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Kehadiran TPUKP melalui fasilitasi Gerai Investasi dan Layanan Usaha (Gisela) turut berkontribusi pada penyaluran kredit program, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Sampai dengan triwulan IV 2023, TPUKP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp41,75 miliar kepada 993 pelaku usaha;



Gambar 34 Pembinaan dan monitoring kepada tenaga pendamping usaha kelautan dan perikanan secara berkala baik via *online* maupun *offline*

- b. Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui fasilitasi akses pembiayaan di Kabupaten Rembang dan Kebumen serta pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI bagi pelaku usaha KP di 55 lokasi;
- c. Kegiatan fasilitasi akses pembiayaan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023. *Outcome* yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembiayaan kepada 4 orang pelaku usaha sebesar Rp16 Juta dari PT. PNM, terfasilitasinya POKLAHSAR Mina Lestari Bugangan pada program bedah UPI dan sertifikasi kelayakan pengolahan. Selain itu pada kegiatan ini juga terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara PT Vitosindo Inti Boga, PT Kulina Berkah Sejati, PT. Cahaya Putera Multirasa dengan Poklachsar Bebel Mina Rizki dan Poklachsar Anugrah Ulam Bebel tentang Kerjasama Pemasaran Produk Olahan Ikan;



Gambar 35

Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Pekalongan

- d. Penandatanganan Kerjasama antara Ditjen PDSPKP dengan PT. Permodalan Nasional Madani nomor 06/PDSPKP/KKP/PKS/XI/2023 tentang Sinergi Program Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro Sektor Kelautan dan Perikanan, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data KUSUKA KKP. Adapun hal-hal yang dibahas adalah rencana sinergi kegiatan pengembangan klusterisasi usaha kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas usaha dan kemitraan, yang didukung dengan penyediaan akses pembiayaan dan edukasi tentang bagi UMKM binaan Ditjen PDS.



Gambar 36 Penandatanganan Kerjasama antara Ditjen PDSPKP dengan PT. Permodalan Nasional Madani

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program sebesar Rp13.464.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp13.380.139.193 atau setara dengan 99,38%. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp83.860.807,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 116,43% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,38%.

7. Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp Miliar)	8,65	8,65	7,62	15,22	175,95	199,74	6,94	119,30	

Pada tahun 2023, realisasi nilai PNBP Ditjen PDSPKP mencapai Rp15,22 miliar atau setara dengan 175,95% terhadap target tahun 2023 sebesar Rp8,65 miliar. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp7,62 miliar, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 199,74%. Jika dibandingkan dengan nilai PNBP tahun 2022 sebesar Rp6,94 miliar (129,98%) dari target Rp5,34 miliar, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 119,30%. Capaian PNBP Ditjen PDSPKP ini berkontribusi sebesar 0,90% terhadap capaian PNBP KKP sebesar Rp1,7 triliun.

Capaian PNBP Tahun 2023 yang mencapai 175,95% ini karena adanya penjualan asset berupa kapal *Silver Sea* senilai Rp5,2 miliar. Selain itu Ditjen PDSPKP juga mempunyai potensi sumber penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari PT Perindo atas sewa asset terhadap *Cold Storage* 1000 ton di Muara Baru dengan angka perkiraan senilai Rp1.525.313.712,00, namun sampai dengan akhir Desember 2023 PT Perindo belum sanggup untuk melakukan pembayaran sewa.

Berdasarkan Aplikasi Omspan Kemenkeu capaian nilai PNBP Ditjen PDSPKP sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp15,22 miliar beberapa kode akun/jenis pendapatan sebagaimana pada Tabel 14.

Tabel 14. Rekapitulasi PNBP Ditjen PDSPKP Tahun 2023

No	Kode Akun Jenis Pendapatan	Realisasi
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	4.199.106.384
2	425421 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.640.000
3	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	151.498.323
4	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	2.529.083.248
5	425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	843.155.976
6	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	349.828.982
7	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	109.030.217
8	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.146.030.765
9	425289 Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	202.570.000
10	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	591.272.136
11	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	102.128.600
TOTAL		15.226.344.631

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian nilai PNBP Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Pembahasan penerapan SPIP PNBP pada CS 1000 Ton tanggal 27 Juli 2023;
- b. Rapat Pengelolaan PNBP Terpusat Unit Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP TA 2023 tanggal 2 Oktober 2023;
- c. Rapat Penyusunan Pengendalian Kegiatan PNBP melalui Manajemen Risiko (MR) sebagai Tindak Lanjut Evaluasi MR Tahun 2023 tanggal 13 November 2023;
- d. Keikutsertaan dalam Ekspose Siklus PNBP dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 12 Desember 2023;
- e. Keikutsertaan pada kegiatan Evaluasi Penggunaan Kembali PNBP Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023.

8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik baik dibidang logistik hasil kelautan

dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, usaha dan investasi dan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022- TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600	49.600	-	52.428	105,70	105,70	79,44	43.319	21,02

Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP pada tahun 2023 mencapai 52.428 orang atau setara dengan 105,70% terhadap target tahun 2023 sebesar 49.600 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 43.319 orang (111,71%) dari target 38.779 orang, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 9.109 orang atau setara dengan 21,02%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru dan belum tercantum dalam dokumen rencana strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian jangka menengah tahun 2024. Capaian tenaga kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP sampai dengan triwulan IV tahun 2023 berkontribusi sebesar 9,46% terhadap Capaian tenaga kerja yang Terlibat di Sektor KP pada tahun 2023 sebesar 554.210 orang.

Data capaian tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2023 diperoleh dari jumlah seluruh orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dari kegiatan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yaitu:

1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pengolahan dan bina mutu adalah 27.664 orang dari target 27.560 orang atau setara 100,38%;

2. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan adalah 17.821 orang dari target 15.581 orang atau setara 114,28%;
3. Tenaga kerja yang terlibat di bidang usaha dan investasi kelautan dan perikanan adalah 5.044 orang dari target 4.795 orang atau setara 105,19%. Tenaga kerja ini diperoleh dari 22 lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, 2 lembaga Usaha Berbasis Klaster Daya Saing yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya, 553 Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, 317 UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program, 2803 UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) dan 63 UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir;
4. Tenaga kerja yang terlibat di bidang logistik kelautan dan perikanan adalah 1.257 orang dari target 1.215 orang atau setara dengan 103,45%. Tenaga kerja ini diperoleh dari anggota koperasi/kelompok penerimaan bantuan pemerintah;
5. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pengujian dan penerapan hasil kelautan dan perikanan adalah 642 orang dari target 450 orang atau setara dengan 142,67%. Tenaga kerja ini diperoleh dari yang kegiatan Inkubasi Bisnis Invapro-KP dan Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sasaran 4. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat

9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Secara konseptual nilai tukar pengolah hasil perikanan adalah pengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolah hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain,

sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. NTPHP dihitung berdasar *sampling* yang akan dilakukan di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi. Lokasi yang menjadi *sampling* dipilih berdasarkan kesepakatan antara Ditjen PDSPKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pengambilan tahun dasar untuk perhitungan NTPHP di tahun 2015. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah banyaknya jumlah UPI terutama skala mikro dan kecil dan variasi jenis kegiatan pengolahan ikan pada kelima provinsi tersebut sehingga dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 37 Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Nilai)	104,25	104,25	104,75	104,67	100,40	100,40	99,92	104,01	0,63

Perhitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) Tahun 2023, telah dilakukan dengan nilai capaian 104,67. Capaian ini setara dengan 104,40% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023, atau setara dengan 99,92% dari target jangka menengah 2024 yaitu 104,75. Dibandingkan dengan

capaian tahun 2022 yaitu 104,01 (99,77%) dari target 104,25, maka capaian tahun 2023 mengalami peningkatan 0,66 atau sebesar 0,63%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sampai dengan Desember sebesar Rp37.885.599.054,00. Realisasi ini setara dengan 99,48% terhadap pagu anggaran sebesar Rp38.083.040.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp197.440.946,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100,40% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,48%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Kegiatan Pendampingan Pengumpulan data Tim NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel dan Penginputan Data NTPHP



Gambar 38 Kegiatan Pendampingan Pengumpulan data Tim NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel dan Penginputan Data NTPHP

- b. Melaksanakan monitoring penginputan data NTPHP melalui aplikasi ntphp.kkp.go.id dan koordinasi dengan tim pencacah dan pengawas daerah melalui *whatsapp group*;

No	Pencacah	Tahun	Bulan	Provinsi	Kab / Kota	Approved	Persewa	Status	Aksi
1	Sony Panggajan	2023	Februari	Sumsatera Utara	Del Serbang	Selanjutnya		Lengkap	[U] [K] [D]
2	Ariko Widayastika	2023	Desember	Jawa Tengah	Rehluang	Selanjutnya		Lengkap	[U] [K] [D]
3	Indayana Iskandar, S.Pi	2023	Agri	Jawa Tengah	Demak	Selanjutnya		Lengkap	[U] [K] [D]
4	Karni Dyan Kauliyah	2023	Desember	Jawa Tengah	Kendal	Selanjutnya		Lengkap	[U] [K] [D]
5	Indayana Iskandar, S.Pi	2023	Desember	Jawa Tengah	Demak	Selanjutnya		Lengkap	[U] [K] [D]
6	Sony Panggajan	2023	Maret	Sumsatera Utara	Del Serbang	Selanjutnya		Lengkap	[U] [K] [D]

Gambar 39 Monitoring Penginputan data dari Tim NTPHP Daerah pada Aplikasi NTPHP

- c. Melaksanakan kegiatan validasi dan perhitungan NTPHP Semester II Tahun 2023 pada tanggal 25 – 27 November 2023 di Bogor, Jawa Barat dan Finalisasi pada tanggal 8 – 10 Desember 2023;



Gambar 40 Kegiatan Validasi dan Penghitungan NTPHP Semester II Tahun 2023

- d. Telah melaksanakan verifikasi lapang NTPHP di Kabupaten Takalar, Kabupaten Bulukumba pada September 2023 dan di Kabupaten Cirebon pada November 2023.

Sasaran 5. Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP

10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat hasil penilaian indikator pengungkit dan indikator hasil lebih besar atau sama dengan 75 serta memenuhi syarat lain sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi minimal 60% pada area pembangunan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Unit Kerja Berpredikat menuju WBK Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit Kerja)	4	4	2	5	125	125	250	3	66,67

Pada tahun 2023, Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebanyak 4 unit kerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Pada Desember 2023, Direktorat Pemasaran telah memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan pada puncak peringatan HAKORDIA tahun 2023 sehingga jumlah unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang telah memperoleh predikat Menuju WBK berjumlah 5 Unit Organisasi yaitu Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Logistik, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Pemasaran dan BBP3KP. Capaian ini setara dengan 125% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023, atau setara dengan 250% dari target jangka menengah 2024 yaitu sebanyak 2 unit. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 3 unit, maka capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 66,67%.

Capaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2023 sebesar 5,15% terhadap seluruh capaian unit kerja yang berpredikat menuju WBK di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu 97 unit kerja.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Rapat Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023;

Gambar 41 Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Lingkup



Direktorat Jenderal

- b. Kegiatan Pemantauan Zona Integritas Direktorat Usaha dan Investasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2023;



Gambar 42 Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Usaha dan Investasi

- c. Kegiatan Pemantauan Zona Integritas BBP3KP yang dilaksanakan pada 18 – 19 Desember 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp994.989.896,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 98,20% terhadap pagu anggaran sebesar Rp1.013.228.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp124.866.619,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 125% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 98,20%.

11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1	3,1	3,3	3,83	123,54	123,54	116,06	3	27,67

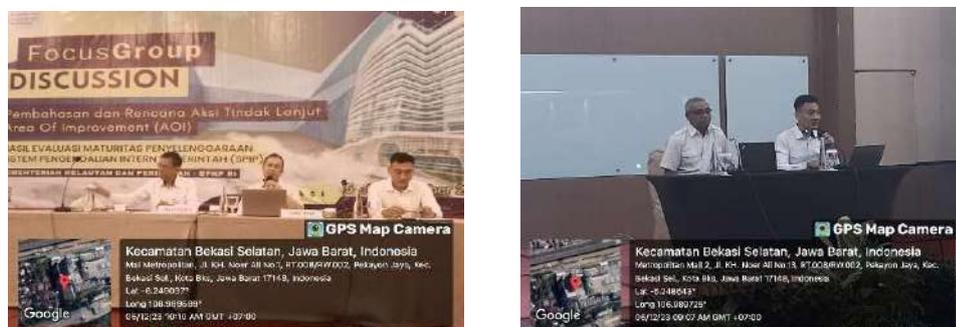
Pada tahun 2023 Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP sebesar 3,83, Capaian dimaksud setara dengan 123,54% terhadap target tahun 2023 sebesar 3,1. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 3,3, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 116,06%, dan jika dibandingkan dengan Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP tahun 2022 sebesar 3 (100%) dari target 3, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 27,67%.

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas Dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra dengan simpulan bahwa tingkat maturitas

penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP pada periode Mei sampai dengan Agustus 2023. Penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- b. Pengisian kertas kerja Maturitas SPIP tahun 2022/2023 di Jakarta pada tanggal 6 dan 11 s.d. 12 Oktober 2023;
- c. Keikutsertaan pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pembahasan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AOI) atas Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan pada tanggal 5 s.d. 6 Desember 2023 di Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Satuan Tugas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Beberapa hal penting yang disampaikan antara lain terkait penilaian risiko kecurangan (*Fraud Risk Assesment/FRA*) dan rencana aksi tindak lanjut AOI yang efektif.



Gambar 43 Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Area of Improvement (AOI)

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.020.605.646,00 sampai dengan bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,92% terhadap pagu anggaran sebesar Rp1.021.389.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 123,55% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,92%.

12. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022- TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2	83,2	76	90,51	108,79	108,79	119,09	85,02	6,46

Pada tahun 2023 capaian indeks profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP sebesar 90,51, Capaian dimaksud setara dengan 108,79% terhadap target tahun 2023 sebesar 83,2. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 87, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 119,09%. Jika dibandingkan dengan Nilai indeks profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP tahun 2022 sebesar 85,02 (102,43%) dari target 83, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,46%.

Berdasarkan hasil penilaian Biro SDMAO Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP yaitu sebesar 90,51. Nilai indeks ini menunjukkan gambaran kualitas profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP pada kategori Cenderung Profesional/tinggi.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Kegiatan identifikasi kebutuhan kompetensi pengembangan sumber daya manusia lingkup Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023;
- b. Kegiatan pembekalan P3K pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November 2023;
- c. Kegiatan Jumat Krida Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan XVI Tahun 2023 pada tanggal 3 November 2023;
- d. Melaksanakan rapat koordinasi Penataan Pegawai Lingkup Ditjen PDSPK pada tanggal 4 Desember 2023;
- e. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai Triwulan III dan IV Tahun 2023 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 8 Desember 2023;
- f. Kegiatan Pembahasan Rencana Penataan Tim Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 Desember 2023;
- g. Evaluasi dan Validasi Penyesuaian Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP oleh Biro SDMAO pada tanggal 20 Desember 2023;
- h. Rapat Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 Desember 2023.

Gambar 44 Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai



Triwulan III dan IV Tahun 2023 lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.249.121.513,00 sampai dengan bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,9% terhadap pagu anggaran

sebesar Rp2.249.234.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran yang terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 108,79% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,99%.

13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun n 2023	TW IV 2023	Tahun n 2024		Tahun n 2023	TW IV 2023	Tahun n 2024		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5	80,5	84,75	83,01	103,12	103,12	97,94	81,19	2,24

Berdasarkan hasil penilaian Tim Itjen KKP Pada tahun 2023 capaian nilai PMSAKIP Ditjen PDSPKP sebesar 83,01, capaian dimaksud setara dengan 103,12% terhadap target tahun 2023 sebesar 80,5. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 84,75 maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 97,94%. Jika dibandingkan dengan nilai PMSAKIP Ditjen PDSPKP tahun 2022 sebesar 81,19 (101,47) dari target 80,01, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,24%.

Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal KKP terhadap AKIP Ditjen PDSPKP memperoleh nilai 83,01 dari nilai maksimum 100 atau

mendapat predikat A (Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20	23,81
2	Pengukuran Kinerja	30	23,10	26,66
3	Pelaporan Kinerja	15	12,02	12,60
4	Evaluasi Internal	25	20,88	19,94
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,19	83,01
Predikat Penilaian			A	A

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan *workshop* pelaporan kinerja pada tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2023 yang dihadiri oleh tim kinerja Ditjen PDSPKP dengan narasumber dari Kemenpan RB, Direktorat Tata Bahasa kemendikbud dan tenaga ahli pelaporan kinerja pada SAPK KKP;



Gambar 45. Workshop Pelaporan Kinerja Ditjen PDSPKP

- b. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Rancangan Awal Teknokratik Ditjen PDSPKP Tahun 2025 – 2029 pada tanggal 25 s.d. 26 Oktober 2023 di Bogor Jawa Barat;



Gambar 46 Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal Teknokratik Ditjen PDSPKP

- c. Berpartisipasi pada kegiatan *Benchmarking* SAKIP dan RB Tematik pada tanggal 1 s.d. 3 November 2023 di Yogyakarta;



Gambar 47

***Benchmarking* SAKIP dan RB Tematik KKP**

- d. Melakukan validasi IKU (prognosa pencapaian kinerja tahun 2023) dan rencana penetapan indikator kinerja dan target tahun 2024 pada tanggal 21 s.d. 23 November 2023 di Jakarta;
- e. Melakukan reviu perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target indikator kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan matriks *cascading* lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 atas perubahan anggaran *Automatic Adjustmet* pada tanggal 6 Desember 2023;
- f. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan. Kegiatan-kegiatan dimaksud telah dilakukan dengan melibatkan pejabat eselon II (Sesditjen PDSPKP) sebagai data dukung keterlibatan pimpinan dalam penilaian aspek pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;



Gambar 48 Verifikasi data Capaian kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2023

- g. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Eselon I lingkup KKP, serta *stakeholders* terkait

secara tepat waktu yakni paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp5.667.426.652,00 sampai dengan bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,9% terhadap pagu anggaran sebesar Rp5.677.715.000,00. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 103,12% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,99%.

14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2022.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5	≤0,5	≤1	0,26	120	120	120	0,05	-80,76

Pada tahun 2023, batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP TA. 2021 ditargetkan sebesar ≤0,5%.

Capaian indikator kinerja ini terhitung sebesar 0,26% dengan nilai temuan sebesar Rp815.841.395,00 dari total realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp314.524.616.688,00. Capaian tersebut setara dengan 120% (persentase maksimal dalam aplikasi Kinerjaku) terhadap target tahun 2023 maupun terhadap target jangka menengah tahun 2024 yakni $\leq 1\%$.

Sifat polarisasi indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP TA 2023 adalah minimize atau semakin kecil maka kinerjanya semakin baik. Oleh karena itu capaian tahun 2022 sebesar 0,05% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,26% atau setara dengan dengan 80,76%.

Penurunan Capaian indikator kinerja ini disebabkan karena nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) tahun 2022 lebih besar yaitu sebesar Rp815.841.395,00 dibandingkan dengan tahun 2021 Rp102.009.671,00. Nilai temuan tahun 2022 ini terdiri dari Rp740.348.678,00 terkait Penyewaan BMN oleh Ditjen PDSPKP kepada PT. Perindo (Persero) yang tidak sesuai ketentuan dan belum sepenuhnya mendukung perolehan PNPB yang maksimal, Rp63.170.504,- terkait kelebihan pembayaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan Rp12.322.213,00 terkait kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri. Sedangkan pada temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) tahun 2021 hanya sebesar Rp102.009.671,00 yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Adapun rencana tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) adalah meningkatkan sistem pengendalian intern Ditjen PDSPKP, antara lain:

- a. Melakukan mitigasi resiko terhadap kegiatan prioritas khususnya kegiatan yang diserahkan kepada Masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan PT. Perindo dalam penyewaan asset Ditjen PDSPKP;

- c. Melakukan pengendalian terhadap pertanggungjawaban Ditjen PDSPKP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi, monev dan perbaikan data SAKTI Periode Triwulan III telah dilakukan sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 s.d. 10 Oktober melalui daring dan diikuti oleh seluruh satker lingkup Ditjen PDSPKP, hal ini dilakukan guna percepatan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi dan menghindari sanksi penolakan SPM dari KPPN Mitra. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terverifikasinya data SAKTI seluruh satker dan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi seluruh satker dari KPPN mitra masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2023, sebelum batas waktu yang ditetapkan Kementerian Keuangan, yaitu tanggal 16 Oktober 2023;
2. Melaksanakan koordinasi tindak lanjut atas usulan perbaikan dari Tim Reviu Inspektorat IV atas permasalahan Ketidaksiesuaian Akun dengan Kode Persediaan dan melakukan reklasifikasi Aset yang memenuhi kriteria Properti Investasi.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp603.989.900,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,77% terhadap pagu anggaran sebesar Rp605.397.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp1.407.100,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 120% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,77%.

15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV Tahun 2022 sampai dengan

Triwulan II Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022- TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75	75	80	93,18	124,24	124,24	116,47	96,88	-3,81

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 93,18%. Capaian ini setara dengan 124,24% terhadap target Triwulan IV dan Target tahun 2023 yaitu 75%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian ini setara dengan 116,47%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar 96,88%, maka capaian Triwulan IV tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,81%.

Pada triwulan IV 2023, Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Desember di Raiser Ikan Hias, Cibinong. Terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan IV 2023, masih terdapat 1 hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal yaitu Hasil Evaluasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2022 dan 2023 yang masih belum ditindaklanjuti sampai dengan hari terakhir pembahasan.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp248.605.014,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,85% terhadap pagu anggaran

sebesar Rp248.976.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 124,24% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,85%.



Gambar 49 Kegiatan Pembahasan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjurangan, seleksi, penilaian, dan pemberian

penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75	75	-	79,79	106,39	106,39	-	-	-

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh Ditjen PDSPKP, diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh Koordinator Reformasi. Pada tahun 2023, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75. Capaian pada Indikator kinerja ini adalah 79,79 setara dengan 106,39%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen rencana strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian jangka menengah tahun 2024.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik antara lain memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi terdiri dari kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum yaitu ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap

capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

Capaian IKU Ditjen PDSPKP telah diperoleh berdasarkan Berita Acara Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap 5 proposal yang di submit antara lain :

1. “DISKON ASIK” Digitalisasi SKP Online yang Akuntabel, Suportif, Inovatif, dan Kreatif;
2. Sistem Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan Berbasis Risiko, Post Audit, Dan Terintegrasi OSS “SI IKAN BERPROTEIN”;
3. Gerai Investasi dan Layanan Usaha “GISELA”;
4. Pengembangan platform Aplikasi Gemarikan yang awalnya hanya berbasis Android dan iphone melalui Playstore dan AppStore, dikembangkan juga berbasis browser website. Pengembangan akses tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses konten yang terdapat pada aplikasi tapi harus menginstal aplikasi, selain itu juga diharapkan dengan adanya versi website dapat mengajak masyarakat untuk membagikan konten yang bermanfaat kepada masyarakat disekitarnya serta dapat menerapkan langsung informasi yang didapatkan dari website gemarikan;
5. Inovasi Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro-Kape).

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

1. Bimbingan Teknis Penerapan Komunikasi Inklusif dan Memaksimalkan Budaya Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing

Produk Kelautan Dan Perikanan, 13 – 15 November 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dalam pelayanan publik;

Gambar 50 Bimbingan Teknis Penerapan Komunikasi Inklusif dan Memaksimalkan Budaya Pelayanan Prima Ditjen PDSPKP

2. Forum Konsultasi Publik pada tanggal 13 Desember 2023 di Bogor dalam



dialog, diskusi dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;



Gambar 51 Forum Konsultasi Publik

17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan

dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Ditjen PDSPKP.

Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022- TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	92	90	130	141,3	141,3	144,44	100	30

Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 92%. Capaian ini setara dengan 141,3% terhadap target tahun 2023 yakni 92% atau 144,44% terhadap target tahun 2024 yakni 90%. Jika dibandingkan target tahun 2022 yakni 100 (116,28%) dari target 86, maka capaian triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 30%.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan IV Tahun 2023 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.691.303.964,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,70% terhadap pagu anggaran sebesar Rp1.696.303.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp4.999.036,00. Efisiensi anggaran juga

dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 141,3% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,70%.

18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,75	93,75	90	89,87	95,86	95,86	99,86	92,82	-3,17

Nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2023 tercapai sebesar 89,87. Capaian ini setara dengan 95,86% terhadap target tahun 2023 sebesar 93,75 atau 99,86% terhadap target jangka menengah tahun 2024 sebesar 90. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 92,82 (104,29%) dari target 89, maka capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,17%. Capaian IKPA lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2023 setara dengan 97,70% terhadap capaian IKPA KKP tahun 2023 yaitu sebesar 91,99.

Beberapa faktor yang menyebabkan target IKPA Ditjen PDSPKP tidak tercapai antara lain :

- a. Adanya deviasi halaman III DIPA yang disebabkan kurang sesuaiya realisasi pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana;
- b. Anggaran belum seluruhnya dapat direalisasikan.

Adapun rencana tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian Nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP, antara lain:

- a. Melaksanakan koordinasi terkait sinkronisasi penginputan target dan data capaian output berdasarkan secara berkala;
- b. Koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun nonfisik;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2024.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan guna pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Pembahasan percepatan revisi halaman 3 DIPA yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023. Pada pertemuan ini dibahas mengenai monev dan asistensi penginputan Capaian Output periode bulan September dan revisi halaman 3 DIPA;
- b. Melakukan penginputan capaian output periode Oktober 2023 yang dilaksanakan tanggal 6 November 2023;
- c. Melakukan pembahasan penginputan capaian output periode November 2023 pada tanggal 5 Desember 2023.



Gambar 52 Kegiatan Penginputan Capaian Output Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp525.093.260,00 sampai dengan bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,83% terhadap pagu anggaran sebesar Rp525.978.000,00.

19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja

anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Penyempurnaan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran kembali dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan diterbitkannya PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	86	-	90,86	105,65	105,65	-	91,14	-0,30

Nilai NKA lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2023 tercapai sebesar 90,86. Capaian ini setara dengan 105,65% terhadap target tahun 2023 sebesar 86. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 91,14, maka capaian tahun 2023 turun sebesar 0,3%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen rencana strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian jangka menengah tahun 2024.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a) Melakukan penginputan capaian output melalui aplikasi SMART Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Satker Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- b) Monitoring dan evaluasi atas capaian output yang telah diinput seluruh satker Ditjen PDSPKP pada Aplikasi SMART Kemenkeu;

- c) Berpartisipasi dalam rapat pembahasan NKA KKP pada tanggal 28 Desember 2023 di Jakarta.



Gambar 53 Kegiatan Penginputan Capaian Output Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp662.365.526,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,98% terhadap pagu anggaran sebesar Rp662.452.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 105,65% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,98%.

20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Unit Eselon I;
- b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan;
- c. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE;
- d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan;

- e. Laporan Penyelenggaraan PBJ;
- f. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa ingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022.

Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022- TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	77,5	-	79,69	102,83	102,83	-	82,24	-3,1

Pada tahun 2023 Capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 79,69, Capaian dimaksud setara dengan 102,83% terhadap target tahun 2023 sebesar 77,5. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP tahun 2022 sebesar 82,24 (109,65%) dari target 75, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,1%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen rencana strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian jangka menengah tahun 2024.

Capaian indikator ini mengalami penurunan disebabkan oleh kelemahan pada dua parameter yaitu parameter kedua terkait perencanaan dan Persiapan Pengadaan dan parameter keempat yaitu kesesuaian tahap pelaksanaan. Adapun rencana tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Capaian indikator ini antara lain:

- 1) Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak melalui rapat koordinasi dan pemantauan di lapangan dan mengkoordinasikan dokumen pendukung perencanaan kegiatan yang melalui tender;

- 2) Menyusun Laporan Penyelenggaraan PBJ secara berkala;
- 3) Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan PBJ T-1 maupun pelaksanaan hasil pengadaan/tender Tahun 2024.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Kegiatan Pengisian dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2024 LKPP pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2023 di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP sesuai dengan RKA-KL Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2024;



Gambar 54 Pengisian dan Pengumuman RUP Tahun 2024 di Hotel Alila, Solo - Jawa Tengah

- b. Kegiatan Gelar Progress PBJ Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 9 Oktober 2023 yang dilaksanakan di Ruang Lounge, Gedung Mina Bahari III Lantai 15. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ di Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun Anggaran 2023;



Gambar 55 Gelar Progress PBJ Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2023 di Lounge Gedung Mina Bahari III

- c. Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan PBJ dan *Update* Progress PBJ Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Periode Bulan November 2023 pada tanggal 11 – 12 Desember 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk melakukan penyusunan laporan bulanan PBJ dan Update Progress PBJ Lingkup Ditjen PDSPKP.



Gambar 56 Penyusunan Laporan Bulanan PBJ dan Update Progress PBJ di Raiser Ikan Hias Cibinong

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp78.785.780,00 sampai dengan bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 97,43% terhadap pagu anggaran sebesar Rp80.859.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.073.220,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 102,83% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 97,43%.

21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;

- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	77,5	80	95,32	122,99	122,99	119,15	93,25	2,21

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Capaian dimaksud setara dengan 122,99% terhadap target tahun 2023 sebesar 77,5 dan 119,15% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 80. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan Ditjen PDSPKP tahun 2022 sebesar 93,25 (124,33%) dari target 75, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,21%.

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan pemerintah yang menjadi sampling pada penilaian efektifitas bantuan pemerintah/kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP adalah Pasar Ikan, *Chest Freezer*, Gudang Beku, Pabrik Es dan Kendaraan Berpendingin.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP. Selain itu Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Rapat Persiapan Penilaian Indikator Kinerja Efektifitas Bantuan Pemerintah/Kegiatan Prioritas Ditjen PDSPKP tahun 2022 tanggal 19 September 2023;
- b. Keikutsertaan pada rapat *workshop* evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah Lingkup KKP TA 2022 pada tanggal 2 Oktober 2023 melalui media *online meeting*;
- c. Rapat Tindak lanjut atas *update* Pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang menjadi sampling Inspektorat Jenderal pada tanggal 3 Oktober 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp698.203.041,00 sampai dengan bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,9% terhadap pagu anggaran sebesar Rp698.277.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 122,99% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,9%.

22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan IV tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023;
- e. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;

- f. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	77,5	-	97,5	125,81	125,81	-	91,50	6,55

Pada tahun 2023, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Capaian pada tahun 2023 setara dengan 125,81% terhadap target sebesar 77,5. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 91,50 maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,55%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen rencana strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian jangka menengah tahun 2024.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset Tetap dan Persediaan di Raiser Ikan Hias, Cibinong pada tanggal 2 s.d. 3 Oktober 2023. Tujuan rapat adalah untuk melengkapi aset tetap dan persediaan yang belum didetailkan, aset tetap belum validasi, dan ketidaksesuaian akun;
- b. Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pembentukan BLU oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI pada tanggal 5 Oktober 2023 di Ruang Rapat Branding, Gedung Mina Bahari III. Agenda rapat adalah dalam rangka persiapan pembentukan Badan Layanan Usaha (BLU);
- c. Kegiatan pertemuan dalam rangka koordinasi terkait dengan *Aanwijzing* Lelang Kapal MV Silver Sea II pada tanggal 6 Oktober 2023 di Ruang Rapat Branding. Agenda rapat adalah dalam rangka menindaklanjuti

- pertemuan dengan KPKNL Aceh, serta dalam rangka persiapan lelang Kapal MV Silver Sea II;
- d. Kegiatan *benchmarking* BLUBPPP Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Oktober 2023 di BLUBPPP Tegal. Tujuan dari kegiatan adalah *benchmarking* mengenai usulan penetapan BPPP Tegal untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
 - e. Keikutsertaan pada kegiatan pertemuan dalam rangka serah terima Kapal MV Silver Sea II kepada pemenang lelang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Dermaga CT-3 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Lelang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023;
 - f. Kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)* Kerja Sama Pemanfaatan BMN dengan narasumber dari Kementerian Keuangan RI c.q. DJKN pada tanggal 13 November 2023. Tujuan diadakan pertemuan adalah untuk berdiskusi mengenai rencana KSP PIM Muara Baru oleh PT Perikanan Indonesia;
 - g. Kegiatan inventarisasi BMN berupa peralatan pendukung *cold storage* di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong pada tanggal 15 – 17 November 2023. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal KKP, Direktorat Logistik, Tim Kerja Keuangan dan Pengendalian Internal, Kepala PPN Brondong, dan perwakilan Tim Kerja BMN dan PBJ;
 - h. Kegiatan pertemuan dalam rangka pembahasan dokumen usulan pembentukan BLU Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 – 28 November 2023 di Bogor. Tujuan pertemuan adalah pembahasan dokumen usulan pembentukan BLU (substansif, teknis, dan administrasi);
 - i. Kegiatan pertemuan dalam rangka pembahasan persiapan pembentukan BLU Ditjen PDSPKP pada tanggal 1 Desember 2023 di Dit PPK BLU – Kementerian Keuangan RI. Tujuan dari pertemuan adalah untuk berdiskusi mengenai progress persiapan pembentukan BLU Ditjen PDSPKP;
 - j. Kegiatan pertemuan dalam rangka pembahasan hasil perbaikan dokumen usulan pembentukan BLU Ditjen PDSPKP pada tanggal 12

Desember 2023 di BBP3KP. Pertemuan dihadiri oleh Biro Keuangan KKP, Biro Hukum KKP, Bapak Darmadi Aries Wibowo, dan seluruh tim pembentukan BLU Ditjen PDSPKP;

- k. Kegiatan pertemuan dalam rangka pembahasan usulan pembentukan BLU, Direktorat Jenderal PDSPKP dengan Direktorat PPK BLU – Kementerian Keuangan RI pada tanggal 18 Desember 2023 di Ruang Rapat Lounge Ditjen PDSPKP.



Gambar 57 Kegiatan Serah Terima Kapal MV Silver Sea II di Sabang, Aceh

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp671.882.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV sebesar Rp668.314.480,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,48% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.503.520,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 125,80% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,48%.

23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan dapat dipercaya menjadi kebutuhan setiap organisasi. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis menuntut Ditjen PDSPKP untuk mampu menyediakan data secara tepat, akurat dan terkini. Ketersediaan data tersebut akan banyak membantu dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Data PDSPKP yang akurat akan menghasilkan proses perencanaan yang benar dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan para pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP diberikan amanat untuk menjadi Unit Data Eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data lingkup Ditjen PDSPKP. Beberapa kegiatan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP antara lain pengumpulan data pelaku usaha dan produksi, verifikasi dan validasi data serta analisis data bidang PDSPKP.

Rencana Strategis Ditjen PDSPKP 2020 – 2024, Direktorat Jenderal PDSPKP menargetkan tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup pada tahun 2023 sebesar 90%. Berikut tabel ikhtisar pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

Tabel 30. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi i TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi i TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90	90	-	100	111,11	111,11	-	-	-

Pada tahun 2023, Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP sebesar 100. Capaian dimaksud setara dengan 111,11% terhadap target tahun 2023 sebesar 90. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2023 dan belum tercantum dalam dokumen rencana strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian jangka menengah tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP selama triwulan IV 2023 antara lain:

- a. Melakukan kegiatan penguatan pendataan dan percepatan validasi data bidang PDSPKP di beberapa kabupaten/kota atau provinsi antara lain Bali, NTT, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sukabumi, Cianjut dan Bogor, DIY dan Banten pada periode Oktober – Desember
- b. Melakukan kegiatan pertemuan pembahasan satu data bidang PDSPKP, yaitu:
 - 1) Evaluasi Implementasi Satu Data KP Bidang PDSPKP 2023 pada tanggal 28 – 29 November 2023;



Gambar 58 Kegiatan Evaluasi Implementasi Satu Data KP Bidang PDSPKP

- 2) Persiapan Validasi Satudata bidang PDSPKP 2023 pada tanggal 5 Oktober 2023;
- 3) Penguatan Satu Data Bidang PDSPKP Kabupaten Bogor pada tanggal 9 Oktober 2023;
- 4) Penghitungan Acuan Angka Volume Produk Olahan pada tanggal 10 dan 23 Oktober 2023;
- 5) Validasi Satu Data KP bidang PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 24 – 26 Oktober 2023;
- 6) Persiapan Sosialisasi Pemutakhiran Profil dan Kebutuhan *Cold storage* pada tanggal 16 November 2023;
- 7) Persiapan Sosialisasi Kuesioner *Cold Storage* pada tanggal 27 November 2023;
- 8) Koordinasi Satu Data KP Provinsi Papua Barat Tahun 2023 pada tanggal 6 Desember 2023;
- 9) Progress Satu Data KP Bidang PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal Desember 2023;
- 10) Validasi LK Agregat Produksi Tahun 2023 pada tanggal Desember 2023;
- 11) Verifikasi dan Validasi Data KUSUKA Tahun 2023 pada tanggal 15 Desember 2023;



Gambar 59 Kegiatan Validasi Satu Data KP bidang PDSPKP Tahun 2023

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.630.966.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV sebesar Rp3.629.890.947,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,97% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 111,11% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,97%.

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2023, anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp343.280.617,00 yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Setelah adanya blokir sebesar Rp50.000.000,00 pagu anggaran Ditjen PDSPKP menjadi Rp343.230.613.000,00.

Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan IV Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Pusat	299.743.345.000	297.880.820.505	99,38
2	UPT	33.767.624.000	32.714.516.978	96,88
3	Dekonsentrasi	9.769.644.000	9.328.063.462	95,48
4	Tugas Pembantuan	-	-	-
Total		343.280.613.000	339.923.400.945	99,02

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi Sampai dengan Desember 2023

Tabel 32. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan IV Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	68.945.634.000	68.840.476.054	99,85%
2	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	77.672.632.000	77.490.794.588	99,77%
3	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	47.492.040.000	47.376.153.378	99,76%
4	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	16.955.981.000	16.834.414.255	99,28%
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	125.163.946.000	122.409.046.073	97,80%
6	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	68.945.634.000	68.840.476.054	56,16
Total		343.280.613.000	339.923.400.945	99,02

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi sampai dengan Desember 2023

Pada triwulan IV tahun 2023, penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp339.923.400.945,00. Realisasi ini setara dengan 99,02% terhadap total pagu anggaran awal. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.307.212.055,00.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, antara lain:

- 1) Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak;
- 2) Mereviu RKAKL sesuai rencana kegiatan dan segera melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/kegiatan;
- 3) Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai dengan ketentuan; dan
- 4) Melibatkan Kelompok Program, Kelompok Keuangan dan Umum, serta Itjen KKP dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja.

Terdapat perubahan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga tidak selaras dengan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020 – 2024, sehingga pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Target	
			Renstra	PK
1	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	USD miliar	7,66	6,77
2	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	Kg/kap	61,02	57,61
3	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	6,1	8,8
4	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	Indeks	58	70,43
5	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	3,9	6,33
6	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	-	8,65
7	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	Orang	-	49.600
8	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	indeks	104,5	104,25

*Indikator kinerja belum tercantum dalam Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP pada triwulan IV tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 101,58.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP triwulan IV tahun 2023, terdapat dua indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Selain itu terdapat tiga indikator kinerja yang capainnya mengalami penurunan yaitu Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP dan Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> •Tren penurunan harga komoditas, kondisi global dan perlambatan ekonomi dunia serta aktivitas produksi atau industri di berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan permintaan global juga menurun •Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebagai contoh, total nilai impor produk perikanan di Amerika Serikat hingga Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 17,63% dari USD 1,91 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 1,43 miliar pada tahun 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> •Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial salah satunya yaitu keikutsertaan dalam pameran seafood expo North America pada tanggal 10-12 Maret 2024; •Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan protocol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) yang telah disepakati pada 16 Desember 2023 yaitu proses legal scrubbing untuk penyamaan konteks bahasa hukum. Setelah proses tersebut selesai, akan dilakukan proses penerjemahan dan ratifikasi di parlemen sesuai prosedur masing-masing negara; •Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-dumping.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> •Adanya deviasi halaman III DIPA yang disebabkan kurang sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> •Melaksanakan koordinasi terkait sinkronisasi penginputan target dan

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	<p>realisasi pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran belum seluruhnya dapat direalisasikan. 	<p>data capaian output berdasarkan secara berkala;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun nonfisik; • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2024.
<p>Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kebijakan KUR Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, Lembaga Keuangan Penyalur KUR perlu melakukan penyesuaian sistem dalam penyaluran pembiayaannya • Akses pembiayaan yang sulit karena pelaku usaha belum bankable dalam kelayakan usaha; • Masih minimnya informasi tentang calon debitur potensial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator bidang perekonomian, Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Keuangan Perbankan dan non bank serta BLU LPMUKP; • Koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam rangka peningkatan fasilitasi akses pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan; • Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela berbasis wilayah dengan komoditas perikanan unggulan di daerah; • Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintegrasikan debitur potensial berbasis data krusial dengan lembaga pembiayaan Bank/Non Bank.
<p>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan parameter kedua yaitu Perencanaan dan Persiapan Pengadaan dan parameter keempat yaitu kesesuaian tahap pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak melalui rapat koordinasi dan pemantauan di lapangan dan mengkoordinasikan dokumen pendukung perencanaan kegiatan yang melalui tender; • Menyusun Laporan Penyelenggaraan PBJ secara berkala; • Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan PBJ T-1, maupun pelaksanaan hasil pengadaan/tender Tahun 2024.
<p>Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Capaian indikator kinerja ini disebabkan karena nilai temuan laporan hasil pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan mitigasi resiko terhadap kegiatan prioritas khususnya kegiatan yang diserahkan kepada Masyarakat;

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) tahun 2022 lebih besar yaitu sebesar Rp815.841.395,00 dibandingkan dengan tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> •Melakukan koordinasi dengan PT. Perindo dalam penyewaan asset Ditjen PDSPKP; •Melakukan pengendalian terhadap pertanggungjawaban Ditjen PDSPKP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan IV tahun 2023 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2023 antara lain :

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2023
1	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Komite teknis dan tenaga ahli yang menguasai teknis; • 2. Berkoordinasi dengan BSN terkait acuan standar yang masih berlaku untuk menggantikan standar yang telah di abolisi; • 3. Melakukan jajak pendapat yang akan di koodinatori oleh tim BSN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan KKP pada Seafood Show of Asia Expo (SSA) - SIAL Interfood 2023, pada 8-11 November 2023 bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta.Potensi transaksi sebesar Rp1,65 Milyar. Produk yang diminati antara lain: fish skin snack, pempek ikan dan udang, baby fish snack, snack olahan rumput laut, minuman olahan rumput laut, olahan ikan lele, sambal ikan, pepes ikan, kerupuk ikan, mie ikan bandeng, ikan kaleng olahan, abon ikan dan bandeng isi tanpa duri. Para calon buyers potensial antara lain berasal dari: Indonesia, Malaysia, Turki, RRT dan Jepang; • Keikutsertaan dan/atau fasilitasi forum perluasan akses pasar negara tujuan ekspor yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan ekspor komoditas unggulan perikanan melalui penanganan hambatan ekspor, pembukaan akses pasar ekspor, dan perundingan perdagangan bilateral/regional/multilateral. Forum yang diikuti antara lain: forum Kerjasama Indonesia – Singapore Agribusiness Working Group (ISAWG), menyelesaikan perundingan Protokol Perubahan Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (JEPA) yang mengakomodasikepentingan Indonesia dengan pembebasan tarif 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia, dan mengikuti forum Perkembangan Pemenuhan Persyaratan Ekspor Udang Tangkapan (wild-caught shrimp) ke Amerika Serikat; • Pengembangan sitem informasi berupa bursa pasar ikan berbasis website yang dapat mengakses aplikasi tanpa perlu mengunduh melalui alamat https://bursaikan.kkp.go.id/ • Melaksanakan Focus Group Discussion Major Project Pembangunan International Fish Market (IFM), yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2023
		<p>Desember 2023 bertempat di Kabupaten Minahasa Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Profil Ekspor hasil kelatan perikanan yang meliputi Profil Pasar Kepiting, Profil Pasar Rumput Laut, Profil Pasar Tilapia dan Profil Pasar Rumput Laut.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan, pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. • Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan melalui pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Kehadiran TPUKP melalui fasilitasi Gerai Investasi dan Layanan Usaha (Gisela) turut berkontribusi pada penyaluran kredit program, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Sampai dengan triwulan IV 2023, TPUKP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp41,75 milyar kepada 993 pelaku usaha • Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui fasilitasi akses pembiayaan di Kabupaten Rembang dan Kebumen serta pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI bagi pelaku usaha KP di 55 lokasi; • Kegiatan fasilitasi akses pembiayaan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023. Outcome yang dihasilkan kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembiayaan kepada 4 orang pelaku usaha sebesar Rp16 Juta dari PT. PNM, terfasilitasinya POKLAHSAR Mina Lestari Bugangan pada program bedah UPI dan sertifikasi kelayakan pengolahan. Selain itu pada kegiatan ini juga terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara PT Vitosindo Inti Boga, PT Kulina Berkah Sejati, PT. Cahaya Putera Multirasa dengan Poklahsar Bebel Mina Rizki dan Poklahsar Anugrah Ulam Bebel tentang Kerjasama Pemasaran Produk Olahan Ikan; • Pendandatanganan Kerjasama antara Ditjen PDSPKP dengan PT. Permodalan Nasional Madani nomor 06/PDSPKP/KKP/PKS/XI/2023 tentang Sinergi Program Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro Sektor Kelautan dan Perikanan, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data KUSUKA KKP. Adapun hal-hal yang dibahas adalah rencana sinergi kegiatan pengembangan klusterisasi usaha kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas usaha dan kemitraan, yang didukung dengan penyediaan akses pembiayaan dan edukasi tentang bagi UMKM binaan Ditjen PDS

LAMPIRAN

Bukti dukung Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan IV tahun 2023 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2023 sebagaimana tautan https://s.id/Bukti_TL_Rekomendasi_LKj_TW_2023.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Budi Sulistiyo**

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35
2	Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkatkan	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77
		3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,61
3	Terwujudnya pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	8,8
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	70,43
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	6,33
		7.	Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600
4	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25
5	Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP (unit)	4
		11.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		13.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		14.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		15.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75
		16.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		17.	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,75
		19. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90

Data Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP.000)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	132.215.052
-	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	77.672.632
-	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	47.492.040
-	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	7.050.380
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	85.901.615
-	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	16.955.981
-	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	68.945.634
3	Program Dukungan Manajemen	125.163.946
-	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	125.163.946
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		343.280.613

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 87/KEP-DJPDSPKP/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, perlu menyusun rencana strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiarti

Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020–2024 ini merupakan titik tolak pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur, serta visi Presiden Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut presiden telah menetapkan 9 (sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menyampaikan arahan utama pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi

Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Selain hal itu, Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu: (1) Membangun komunikasi dengan nelayan dan *stakeholder* kelautan dan perikanan lainnya, dan (2) Memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Renstra KKP 2020-2024 memuat arah pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 yang mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden dimaksud.

Pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan serta arahan Presiden secara khusus kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Kontribusi tersebut akan dilakukan melalui implementasi program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen. Pelaksanaan ketiga program tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, dan peningkatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

B. Kondisi Umum

Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai *prime mover* pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Renstra KKP tahun 2015-2019 dinyatakan bahwa arahan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilakukan secara terencana, bertahap, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Dalam program pembangunan yang telah dilaksanakan Ditjen PDSPKP telah mendukung sepenuhnya arah pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan tersebut dan target capaian programnya

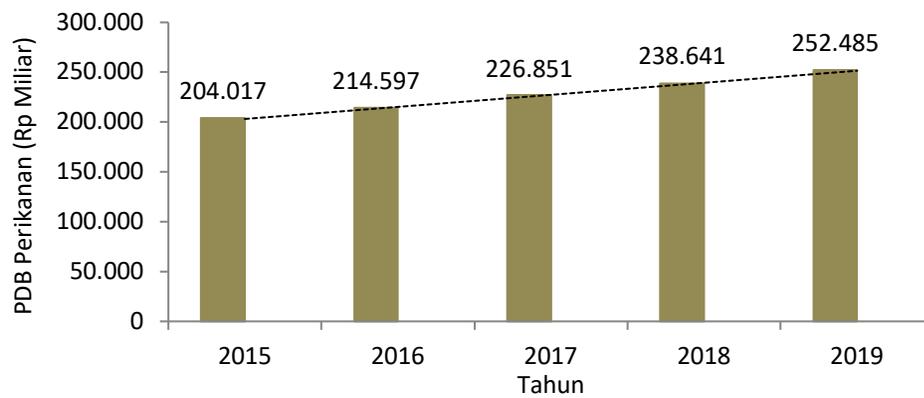
yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kondisi yang telah tercipta hingga tahun 2019 melalui implementasi program pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan adalah nilai keseluruhan (agregat) semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Pertumbuhan nilai PDB perikanan disajikan dalam bentuk persentase.

Tabel 1.1 Pencapaian Indikator Kinerja Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2015 – 2019

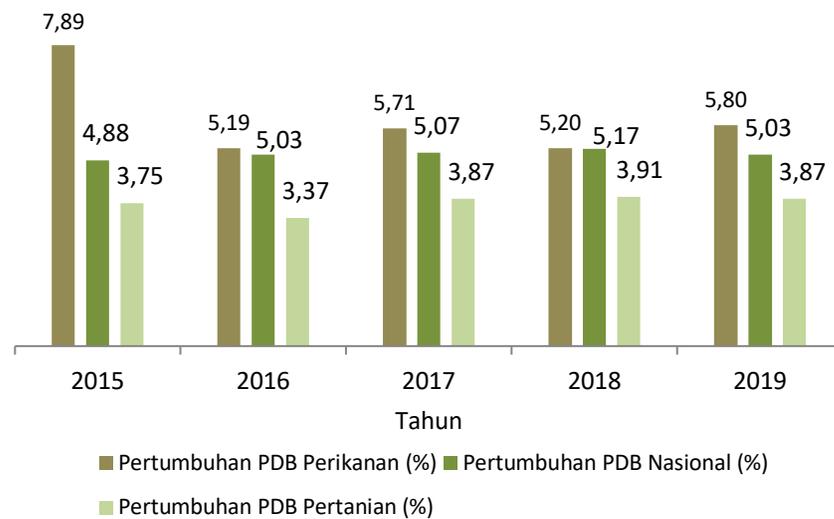
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,20	5,15	5,95	5,20	5,81	-19,31	11,74



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Gambar 1.1 Grafik Nilai PDB Perikanan Atas dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019

Dari Gambar 1.1., nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami kenaikan yaitu Rp 204.016,8 Miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 252.484,6 Milliar pada tahun 2019. Secara rata-rata, laju pertumbuhan *quarter to quarter* (q-to-q) PDB Perikanan triwulanan sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 1,35%, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada TW III sebesar 1,93%, dan paling rendah pada TW II sebesar -0,11%. Pada TW IV, terjadi penurunan q-to-q karena pertumbuhan PDB Perikanan turun dari 5,87% (TW III) menjadi 5,50% (TW IV). Secara umum, pertumbuhan PDB Perikanan selalu berada di atas PDB Kelompok Pertanian dan PDB Nasional. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata para pelaku usaha di sektor perikanan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Gambar 1.2 Grafik Trend Pertumbuhan PDB Nasional, PDB Kelompok Perikanan dan Perikanan Tahun 2015-2019

Belum tercapainya target 2019 antara lain disebabkan peluang investasi untuk penangkapan ikan yang telah dibuka 100% bagi investor dalam negeri belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, pemerintah telah berupaya melakukan pemberian bantuan kapal penangkap ikan kepada koperasi nelayan, bantuan fasilitasi akses permodalan usaha penangkapan, memberikan izin pengalihan ke *fishing ground* baru yang masih memiliki potensi besar khusus bagi kapal-kapal eks cantrang di Pantura Jawa.

Disamping itu, di bidang perikanan budidaya telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pemberian bantuan benih dan induk unggul, *escavator*, *bioflok*, perbaikan kawasan budidaya, dan gerakan pakan mandiri dalam rangka mengurangi biaya produksi sehingga lebih efisien. Dalam LKJ KKP 2020 dinyatakan bahwa saat ini pertumbuhan PDB Perikanan hanya didasarkan pada sektor primer (perikanan tangkap dan perikanan budidaya). Akibatnya, pertumbuhan yang terjadi sektor hilir (industri perikanan, aktivitas rantai pasok ikan) tidak bisa diklaim sebagai PDB Perikanan.

2. Peningkatan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

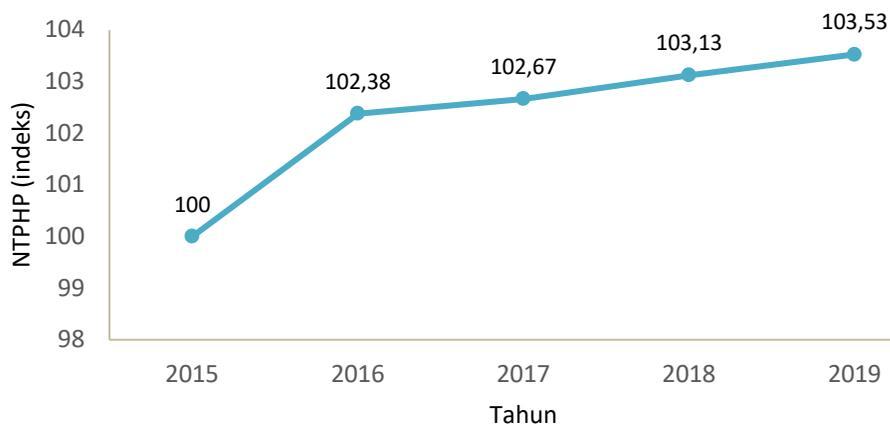
Salah satu sasaran strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah terwujudnya kesejahteraan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan. Atas potensi ekonomi yang besar, sektor kelautan dan perikanan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional melalui sektor hilir perikanan di mana dapat menciptakan *multiplier effect* yang luas kepada masyarakat. NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pelaku usaha/pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. NTPHP >100, maka kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsi, artinya pendapatan pengolah hasil perikanan naik lebih besar dari

pengeluarannya atau surplus. NTPHP =100, maka kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga impas. NTPHP <100, maka kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi.

Pada tahun 2019, capaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) mencapai 103,53. Dibandingkan tahun 2018, Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2019 naik sebesar 0,39% dari 103,13 pada tahun 2018. Selama periode tahun 2015-2019, laju pertumbuhan NTPHP mencapai 0,87%, yaitu naik 100,00 pada tahun 2015 menjadi 103,53 pada tahun 2019. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) mempunyai tren semakin membaik dari tahun ke tahun selama periode tahun 2015-2019.

Tabel 1.2 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	100,00	102,38	102,67	103,13	103,53	0,87	0,39



Gambar 1.3 Pertumbuhan Nilai NTPHP selama Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.3., terjadi peningkatan NTPHP sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dimana indeks NTPHP tahun 2015 dianggap bernilai 100 (tahun dasar). Rata-rata peningkatan indeks NTPHP tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar 1,04 % dari semula 100 di tahun 2015 menjadi 103,53 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Ditjen PDSPKP untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan melalui pemberian bantuan pemerintah, pembinaan yang berkelanjutan, fasilitasi akses permodalan dan pasar, pengembangan ragam dan inovasi produk kelautan dan perikanan

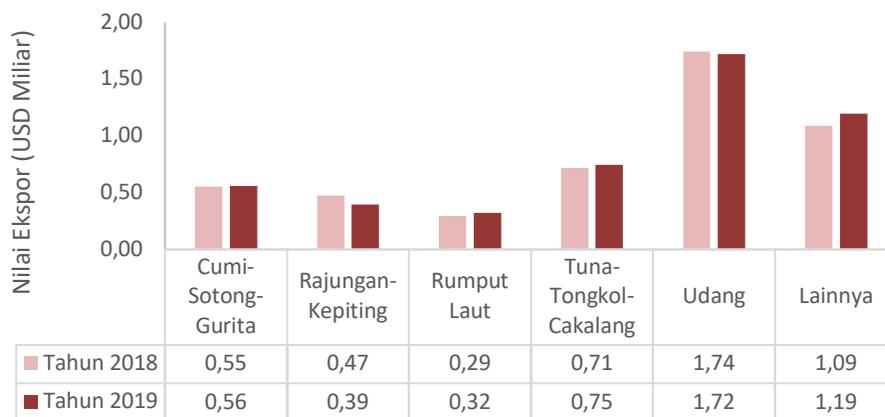
sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, sehingga mempengaruhi peningkatan NTPHP.

3. Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan

Ekspor merupakan devisa bagi negara. Tercatat bahwa, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan nilai ekspor hasil perikanan sebesar 5,76% dari US\$ 3,9 Miliar menjadi US\$ 4,94 Miliar (Tabel 1.3). Meskipun demikian, capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,56% terhadap capaian tahun 2018 dan jika dilihat dari trendnya selama 5 tahun terakhir, nilai ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan 25,06%. Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2018 ke tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Tabel 1.3 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	3,95	4,17	4,52	4,86	4,94	25,06	1,56



Komoditas

Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 1.4 Perbandingan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2018-2019

Jika dilihat dari komoditas utama ekspor perikanan Indonesia (udang, tuna-cakalang-tongkol, rumput laut, rajungan-kepiting dan rumput laut), komoditas udang masih menjadi primadona dengan menyumbangkan kontribusi sebesar 34,83% dari total nilai ekspor, sementara tuna-cakalang-tongkol dan cumi-sotong gurita mampu memberikan kontribusi sebesar 15,35% dan 11,27%. Sedangkan komoditas rumput laut dan komoditas perikanan lainnya memberikan kontribusi sebesar 6,58% dan 23,99%.

Tabel 1.4 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2019

Komoditas	Volume (Kg)	%	Nilai (USD)	%
Cumi-Sotong-Gurita	143,847,343.07	12.15	556,290,650.98	11.27
Rajungan-Kepiting	25,942,911.49	2.19	393,497,773.68	7.97
Rumput Laut	209,241,303.11	17.67	324,849,979.30	6.58
Tuna-Tongkol-Cakalang	184,130,234.06	15.55	747,538,121.98	15.14
Udang	207,704,831.41	17.54	1,719,197,167.57	34.83
Lainnya	413,329,067.04	34.90	1,194,591,107.98	24.20
Total	1,184,195,690.17		4,935,964,801.49	

Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Tiongkok merupakan negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia, dengan volume mencapai 405.955.097,36 kg atau 34,28% dari total volume ekspor tahun 2019. Negara tujuan ekspor lainnya yang cukup besar adalah Amerika Serikat dengan volume mencapai 210.990.298,01 kg atau 17,82% dari total volume ekspor tahun 2019. Sedangkan dari segi nilai ekspor, Amerika Serikat merupakan yang terbesar, yaitu mencapai 37,05% dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2019.

Tabel 1.5 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2019

Negara Tujuan Ekspor	Volume (Kg)	%	Nilai (USD)	%
Tiongkok	405,955,097.36	34.28	828,364,025.64	16.78
Jepang	120,235,826.22	10.15	665,191,377.54	13.48
Amerika Serikat	210,990,298.01	17.82	1,828,978,696.76	37.05
Lainnya	447,014,468.58	37.75	1,613,430,701.56	32.69
Total	1,184,195,690.17		4,935,964,801.49	

Sumber Data BPS, diolah Ditjen PDSPKP

4. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia

Konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada periode 2015-2019 mengalami peningkatan 32,55%/tahun, yaitu dari 41,11 kg/kapita pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita pada tahun 2019. Bila konsumsi ikan tahun 2019 diperbandingkan dengan konsumsi ikan tahun 2018, maka terjadi peningkatan sebesar 7,50%.

Meningkatnya produksi ikan nasional telah mendorong meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan masyarakat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Pelaksanaan program ini melibatkan seluruh komponen bangsa dengan tujuan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar makan ikan. KKP dalam berbagai kesempatan juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui dalam rangka memberikan kualitas kehidupan pada 1000

Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta kepada anak-anak usia SD, remaja perempuan usia produktif dan generasi milenial.

Tabel 1.6 Pencapaian Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Konsumsi Ikan Per Kapita Nasional	41,11	43,94	47,34	50,69	54,49*	32,55	7,50

*Angka prognosa

Pelaksanaan program Gemarikan tahun 2019 ditargetkan mencakup 34 provinsi dan 32 kabupaten/kota lokasi *stunting*. Selain untuk meningkatkan kesadaran gizi dengan mengkonsumsi ikan, program ini juga membantu promosi di dalam negeri. Promosi peningkatan konsumsi ikan dilakukan melalui rangkaian acara Safari Gemarikan, pemberian paket Gemarikan (makanan berbahan baku ikan), lomba masak berbahan baku ikan, iklan layanan masyarakat dan pameran produk perikanan.

Khusus di daerah rawan *stunting*, Safari Gemarikan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang sumber daya ikan, kandungan gizi dan manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah dan usaha kuliner ikan untuk mendorong perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan asupan protein yang bersumber dari ikan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan *stunting*, KKP melakukan penghitungan angka konsumsi ikan di lokasi *stunting*.

PETA AKI 2015





Gambar 1.5 Peta Angka Konsumsi Ikan (AKI) Tahun 2015 dan 2019

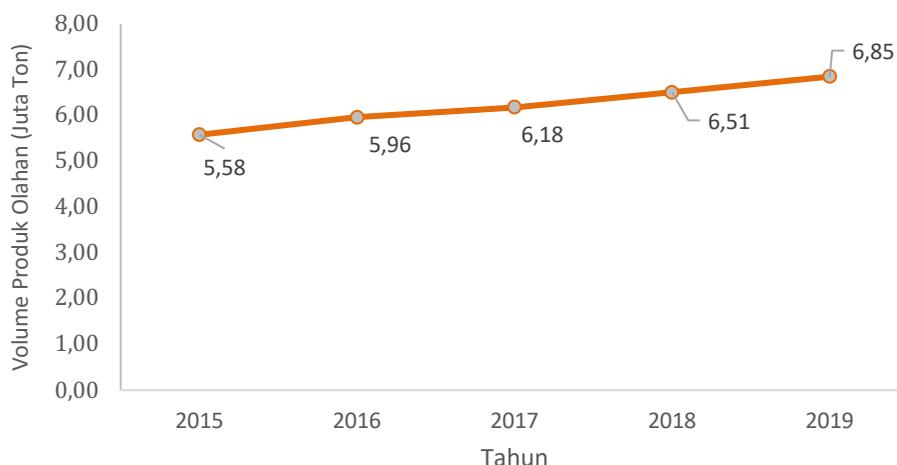
5. Peningkatan Volume produk olahan hasil perikanan

Capaian volume produk olahan hasil perikanan tahun 2019 setara bahan baku adalah sebesar 6,85 juta ton. Capaian ini meningkat 22,76% bila dibandingkan dengan volume produk olahan hasil perikanan tahun 2015 yang mencapai 5,58 juta ton. Capaian tersebut merupakan kontribusi dari volume produk olahan yang dihasilkan oleh industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar.

Produk olahan terbanyak berasal dari jenis pengolahan penggaraman/ pengeringan yakni sebesar 2,56 juta ton atau sekitar 37% dari total produksi olahan. Tingginya produk olahan hasil perikanan dari jenis pengolahan ini seiring dengan banyaknya jumlah UPI penggaraman/pengeringan yang mencapai 36% dari total jumlah UPI serta tingginya preferensi konsumsi olahan ikan dari penggaraman/pengeringan baik sebagai makanan utama maupun makanan pendamping bagi masyarakat Indonesia.

Tabel 1.7 Pencapaian Indikator Kinerja Volume Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Juta Ton)	5,58	5,96	6,18	6,51	6,85	22,76	5,15



Gambar 1.6 Grafik Perkembangan Capaian Volume Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2015 – 2019

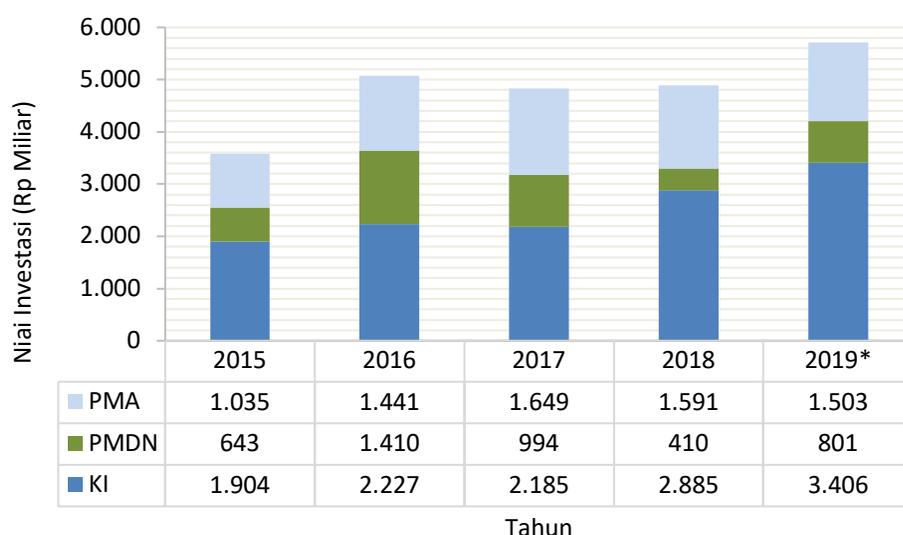
Tren capaian Volume Produk Olahan Hasil Perikanan selalu meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dalam Perhitungan Volume Produk Olahan tersebut telah dilakukan kegiatan antara lain: (1) Perencanaan pengumpulan data dan perhitungan volume produk olahan hasil perikanan ke UPI skala mikro, kecil dan skala menengah, besar; (2) Pendataan kebutuhan bahan baku dan volume produksi ke UPI; dan (c) Pengolahan data oleh Tim Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

6. Peningkatan Nilai investasi kelautan dan perikanan

Bersumber data OJK dan BKPM, nilai investasi hasil kelautan dan perikanan tahun 2019 mencapai Rp5,71 Triliun. Capaian ini meningkat 59,50%, bila dibandingkan dengan nilai investasi hasil kelautan dan perikanan tahun 2015 yang mencapai Rp3,58 Triliun. Terjadi peningkatan realisasi nilai investasi sebesar Rp0,82 Triliun atau tumbuh positif sebesar 16,77% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar Rp4,89 Triliun.

Tabel 1.8 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp triliun)	3,58	5,08	4,83	4,89	5,71	59,50	16,77



*Angka Sementara
 Sumber: OJK & BKPM (Diolah)

Gambar 1.7 Grafik Capaian Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Tahun 2019

Berdasarkan data BKPM total realisasi investasi nasional (PMA dan PMDN) tahun 2019 sebesar Rp2,30 Triliun atau meningkat 15,00% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2,00 Triliun. Realisasi Kredit Investasi bersumber dari data OJK tahun 2019 sebesar Rp3,41 Triliun atau meningkat 18,04% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2,89 Triliun.

Investasi pengolahan dan pemasaran yang berasal dari PMA merupakan kontribusi perusahaan swasta asing (menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing) terhadap pembangunan perikanan, sedangkan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta dalam negeri (menggunakan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan/atau tenaga kerja lokal) terhadap pembangunan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari perbankan dan non perbankan untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek dan/atau pendirian usaha baru (misal pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari UMKM.

7. Produk Perikanan Bersertifikat SNI

Pemberian tanda SNI pada suatu produk dapat dilakukan apabila produk tersebut dihasilkan dari unit pengolahan yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolah, melakukan produksi dan pemasaran produk secara kontinyu, serta melakukan proses produksi sesuai SNI. Pemberian tanda SNI hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi. Peningkatan jumlah produk perikanan bersertifikat SNI dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa semakin banyak produk perikanan

berkualitas baik yang beredar di pasar. Hal ini memberi peluang yang lebih besar bagi produk perikanan bersaing dengan produk lain, yang pada akhirnya mendukung peningkatan konsumsi ikan.

Capaian jumlah produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI pada tahun 2019 adalah 10 produk, atau meningkatkan 42,86% dibandingkan capaian jumlah produk perikanan yang mendapatkan SPPT SNI tahun 2015 (7 produk). Capaian ini mengalami penurunan sebesar 54,55% jika dibandingkan tahun 2018 (22 produk), dikarenakan pada tahun 2018 terjadi lonjakan capaian akibat pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng secara wajib.

Tabel 1.9 Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Produk Bersertifikat SNI Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN					PERTUMBUHAN (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	2018-2019
Produk Perikanan yang mendapatkan SPPT SNI (produk)	7	9	11	22	10	42,86	-54,55

Pencapaian indikator kinerja yang tinggi (42,86%) disebabkan oleh SPPT SNI yang diterbitkan pada tahun 2019 telah dimulai prosesnya sejak tahun 2018, sehingga hanya menunggu tindakan perbaikan, pengujian produk, rapat keputusan dan penerbitan sertifikat pada tahun 2019. Selain itu, kerjasama BBP2HP dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan implementasi SPPT SNI wajib untuk produk tuna dalam kemasan kaleng juga mendatangkan sejumlah klien diluar target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pembangunan penguatan daya saing kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, telah diterbitkan beberapa perangkat kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mendukung sektor hilir kelautan dan perikanan. Perangkat kebijakan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke

Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KP Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2019 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
- k. Rancangan Peraturan Menteri KP Nomor 16/PERMEN-KP/2019 tentang Kemitraan Pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan;
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib;
- n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.
- o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

- p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan:
 - a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2014 tentang Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan;
 - b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/KEPMEN-KP/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 6 (Enam) Produk Perikanan Nonkonsumsi;
 - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/KEPMEN-KP/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 14 (empat belas) Produk Perikanan Nonkonsumsi;
 - d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2015 tentang Komisi Hasil Perikanan;
 - e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan SNI 7 Produk Perikanan Nonkonsumsi;
 - f. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
 3. Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:
 - a. Peraturan Direktur Jenderal P2HP Nomor 01/PER-DJP2HP/2014 tentang Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap yang Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Dengan Jumlah Kumulatif 200 (dua ratus) Gross Tonage Sampai Dengan 2.000 (dua ribu) Gross Tonage dengan Unit Pengolahan Ikan;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal P2HP Nomor 04/PER-DJP2HP/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Nonkonsumsi;
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 05/PER-DJP2HP/2014 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan;
 - d. Peraturan Direktur Jenderal P2HP Nomor 02/PER-DJP2HP/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Non Konsumsi;
 - e. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/PER-DJPDSPKP/2016 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Pada Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PDSPKP;
 - f. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 02/PER-DJPDSPKP/2016 tentang Kode Etik Kepegawaian;
 - g. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Dekonsentrasi;

- h. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 02/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Kendaraan Berpendingin;
- i. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 03/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan ABF;
- j. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 04/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis UPI CS 200 Ton;
- k. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 05/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana *Chest Freezer*;
- l. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 06/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana Pengolahan;
- m. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 07/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan CS 200 Ton;
- n. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 08/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan IFM 10 Ton;
- o. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 09/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan PIM;
- p. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 10/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana IFM 1,5 Ton
- q. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 11/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sentra Kuliner;
- r. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 12/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
- s. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 13/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Kendaraan Berpendingin;
- t. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 14/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan ABF;
- u. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 15/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis UPI CS 200 Ton;
- v. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 16/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana *Chest Freezer*;
- w. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 17/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana Pengolahan;
- x. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 18/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan CS 200 Ton;
- y. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 19/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan PIM;
- z. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 20/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana IFM 1,5 Ton
- å. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sentra Kuliner;

- ä. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 22/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
- ö. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 23/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan IPHP;
- aa. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 24/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Pemeringkatan SKP;
- bb. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 25/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Pembinaan SKP;
- cc. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 26/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Inkubator Bisnis;
- dd. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 27/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Kendaraan Berpendingin 2018;
- ee. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 28/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan ABF 2018;
- ff. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 29/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis UPI CS 200 Ton 2018;
- gg. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 30/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana *Chest Frezer* 2018;
- hh. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 31/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana Pengolahan 2018;
- ii. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 32/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan CS 200 Ton 2018;
- jj. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 33/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan IFM 5 Ton 2018;
- kk. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 34/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sarana IFM 1,5 Ton;
- ll. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 35/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Sentra Kuliner;
- mm. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 36/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Pasar Ikan Bersih 2018;
- nn. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 37/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan *Miniplant* Tuna dan Rajungan 2018;
- oo. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 3/PER-DJPDSPKP/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Wilayah Sentra Kelatan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
- ss. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 1/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Pelaksana Rekomendasi

- Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
- tt. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 2/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Optimalisasi Unit Pengolahan Ikan Tahun 2020;
 - uu. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 3/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah Menuju Zero Waste Tahun 2020;
 - vv. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 4/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah sarana Chest Freezer Tahun 2020;
 - ww. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 5/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pengolahan Tahun 2020;
 - xx. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 6/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2020;
 - yy. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 7/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana *Ice Flake Machine* Tahun 2020;
 - zz. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 8/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah SKPT Mimika Tahun 2020;
 - aaa. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 9/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku Tahun 2020;
 - bbb. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 10/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pemasaran Bergerak Tahun 2020;
 - ccc. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 11/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2020;
 - ddd. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 12/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Pasar Ikan Bersih Tahun 2020;
 - eee. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 13/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Perlengkapan Pedagang Ikan;
 - fff. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 14/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah SKPT Biak Tahun 2020;
 - ggg. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 15/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana UPI;
 - hhh. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 16/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis

- Penyaluran Bantuan Pemerintah nomor 6 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2020;
- iii. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 18/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah nomor 9 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku;
 - jjj. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 19/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis GEMARIKAN;
 - kkk. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 20/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Revitalisasi Pasar Ikan Modern;
 - lll. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pemasaran Bergerak Tahun 2020; dan
 - ggg. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 22/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Perlengkapan Pedagang Ikan

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terwujudnya kegiatan prioritas, Ditjen PDSPKP telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait, antara lain :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Perum Perikanan Indonesia Nomor 02/PDSPKP-PKS/V/2016 tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, tanggal 12 Mei 2016;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan IWAPI Nomor 03/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor Nomor 04/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 05/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia Nomor 07/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Nomor 08/PDSPKP-

- PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan AP5I Nomor 10/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 8. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan PPA Nomor 11/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 9. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Muslimat NU Nomor 12/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Prognas GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 10. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Lottemart Nomor 13/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Prognas GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 11. Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Direktorat Statistik Harga, Badan Pusat Statistik Nomor 13A/PDSPKP-PKS/IX/2016 tentang Program Nasional GEMARIKAN, tanggal 25 Juli 2016;
 12. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan PT. Perikanan Nusantara Nomor 14/PDSPKP-PKS/VI/2016 tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, tanggal 12 Oktober 2016.
 13. Perjanjian Kerjasama antara Ditjen PDSPKP dan FAO tentang Pengembangan Rantai Nilai Pangan yang Efektif dan Inklusif di Negara Anggota ASEAN Nomor GCP/RAS/296/JPN, tanggal 30 Oktober 2017;
 14. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dengan Lion Superindo Nomor 01/PDSPKP/KKP/PKS/IV/2018 tentang Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, tanggal 11 April 2018;
 15. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Ikatan Bidan Indonesia Nomor 02/PDSPKP-KKP/PKS/VI/2018 tentang Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, tanggal 3 Juni 2018;
 16. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan PERWARI Nomor 03/PDSPKP-KKP/PKS/VI/2018 tentang Program Gemarikan, tanggal 3 Juni 2018;
 17. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 04/PDSPKP/KKP/PKS/VIII/2018 tentang Peningkatan Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Produk Perikanan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pengolahan Ikan, tanggal 30 Juli 2018;
 18. Nota Kesepahaman antara Ditjen PDSPKP dengan Badan Ketahanan Pangan dan Fakultas Teknologi Pertanian UGM Nomor 05/PDSPKP-KKP/PKS/IX/2018 tentang Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal dalam Mendukung Penganekaragaman Pangan Bergizi, Aman dan Sehat, 18 September 2018;

19. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan PT. Sucofindo Nomor 06/PDSPKP/KKP/PKS/XII/2018 tentang Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional, tanggal 7 Desember 2018;
20. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Ditjen Pemasarakatan, Kemenkumham Nomor 07/PDSPKP/KKP/PKS/XII/2018 tentang Peningkatan Kualitas Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, tanggal 7 Desember 2018;
21. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 08/PDSPKP/KKP/ PKS/XII/2018 tentang Penilaian Pengelolaan Kualitas Lingkungan pada Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan, tanggal 18 Desember 2018;
22. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Padjajaran Nomor 09/PDSPKP/KKP/PKS/XII/2018 tentang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Peningkatan Produktifitas, Mutu dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, tanggal 31 Desember 2018;
23. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Masyarakat Perikanan Indonesia Nomor 01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2019 tentang Peningkatan Peran Suplier dan Unit Pengolahan Ikan dalam mendukung Keberlanjutan dan Ketelusuran Produk Perikanan yang Berdaya Saing, tanggal 12 Februari 2019;
24. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Nomor 07/PDSPKP/KKP/PKS/IX/2019 tentang Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, tanggal 12 September 2019;

Beberapa penghargaan yang telah diraih Ditjen PDSPKP selama 5 (lima) tahun terakhir antara lain :

1. *Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2015*
Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan menjadi pemenang *Herudi Technical Committee Award* Tahun 2015. Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi memberikan penghargaan itu kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc pada saat pembukaan Bulan Mutu Nasional di JCC, 9 November 2015.
2. *Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2016*
Produk perikanan kembali meraih penghargaan *Herudi Technical Comittee Award* tahun 2016. Ini merupakan kali ketiga produk perikanan meraih penghargaan tersebut. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi kepada Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada acara Bulan Mutu Nasional 16 November 2016.

3. *Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2017*
Tahun 2017 Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan mendapatkan penghargaan tertinggi *Herudi Technical Committe Award (HTCA)* dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). HTCA merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Komite Teknis yang memiliki kinerja terbaik dalam perumusan SNI. Penghargaan ini di serahkan langsung oleh Kepala BSN, Bambang Prasetya kepada Dirjen PDSPKP, Nilanto Perbowo di Jakarta tanggal 22 November 2017.
4. *Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2018*
Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan (Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP) dianggap berhasil mengawal perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan sehingga kembali meraih penghargaan HTCA pada tanggal 22 November 2018.
5. *Herudi Technical Commite Award (HTCA) Tahun 2019*
Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan dari Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih penghargaan tertinggi HTCA dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) serta berhasil menggungguli 11 komite teknis lainnya yang berhasil memperoleh nilai diatas 70. Penilaian HTCA telah dilakukan terhadap 148 Komite Teknis dari Kementerian/Lembaga. Pada HTCA tahun 2019 ini KKP juga berhasil meloloskan Komite Teknis 65-08 Produk Kelautan/Perikanan Non Pangan. Penghargaan HTCA 2019 diserahkan langsung oleh Kepala BSN, Bambang Prasetya kepada KKP yang diwakili oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Innes Rahmania untuk Komite Teknis 65-05 bersama Direktur Pemasaran untuk Komite Teknis 65-08 di acara temu Temu Komite Teknis Perumusan SNI pada tanggal 20 November 2019 di Gedung BPPT II Jakarta.
6. *Rekor MURI Bakso Ikan Tahun 2018*
Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kelautan serta beberapa industri yang sudah menerapkan SNI berhasil memecahkan Rekor MURI Penyajian Bakso Ikan Terbanyak sejumlah 18.818 porsi pada Tanggal 5 Agustus 2018 di halaman Gedung BPPT Jakarta Pusat. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum MURI, Jaya Suprana kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya dan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Rifky Effendi Hardijanto.
7. *Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN)*
Organisasi non-profit, *Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)* merancang *Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN)* yakni sebuah program khusus yang memfokuskan perhatian untuk mengurangi hilangnya nutrisi di sepanjang rantai

pasokan pangan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, program I-PLAN yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan dengan dukungan penuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengadakan program kompetisi tingkat nasional bertajuk "*Innovation Challenge*". Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Innovation Factory* dan NTUitive.

Sarana dan Display Pemasaran Ikan Segar yang dikembangkan oleh Tim Perekayasa BBP2HP dari unit pelaksana teknis Ditjen PDSPKP, KKP, menjadi juara II *Innovation Challenges* kategori Pengecer pada kompetisi yang diselenggarakan tanggal 12 Desember 2018 ini.

Dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, Ditjen PDSPKP senantiasa bersinergi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dibidang pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, logistik hasil kelautan dan perikanan yang terdiri dari Instansi pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan asosiasi usaha yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan.

C. Potensi Dan Pemasalahan

1. Potensi

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut. Hal ini memberi keunggulan komparatif berupa kekayaan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi termasuk dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, devisa dari ekspor dan penyediaan sumber pangan yang kaya protein bagi masyarakat.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton/tahun yang tersebar diseluruh wilayah perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI. Sebesar 10,03 juta ton/tahun atau 80% dari potensi tersebut merupakan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk dimanfaatkan. Dari nilai JTB tersebut, yang baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 atau setara dengan 69,59% dari nilai JTB. Sementara itu total produksi perikanan tangkap Indonesia di laut dan danau pada tahun yang sama sebesar 7,53 juta ton. Indonesia juga mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,9 juta Ha. Potensi lahan budidaya tersebut terbagi atas lahan budidaya air tawar sekitar 2.830.540 ha (15.8%), lahan budidaya air payau sekitar 2.964.331 (16.5%) dan lahan budidaya laut sekitar 12.123.383 ha (67.6%). Saat ini, pemanfaatan potensi lahan tersebut baru mencapai 2,7% yang terdiri dari pemanfaatan

lahan budidaya laut sekitar 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak sekitar 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar sekitar 316.446 ha. Potensi sumber daya di atas adalah modal dasar untuk membangun perikanan dengan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menyejahterakan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak garam.

Saat ini tercatat terdapat 975 unit pengolahan ikan skala menengah dan besar dan 62.389 unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil yang mendukung pengelolaan di sektor hilir. Untuk investasi, peluangnya sangat terbuka baik untuk investasi yang berasal dari PMDN maupun PMA. Investasi tersebut sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan. Pengembangan produk olahan yang bernilai tambah, memberi prospek penting bagi investasi karena inovasi produk terus meningkat dan UPI baru akan banyak dibangun. Iklim investasi juga semakin baik yang ditandai dengan pengurusan perizinan yang semakin mudah dan *tren* nilai investasi hasil kelautan dan perikanan yang meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari Rp4,83 Triliun tahun 2017 menjadi Rp5,71 Triliun tahun 2019.

Untuk pemasaran produk kelautan dan perikanan, trend ekspor yang terus meningkat dan jumlah penduduk Indonesia yang besar adalah peluang yang menjanjikan. Pada tahun 2014, berdasarkan data BPS jumlah penduduk Indonesia mencapai 245 juta jiwa dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 258 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan didominasi oleh usia produktif adalah bonus demografi yang memiliki potensi peningkatan *disposable income*. Hal tersebut diharapkan mendukung peningkatan kumsumsi ikan dari produk siap saji yang bernilai tinggi, seperti *sashimi*, *sushi* tuna, dan aneka olahan lobster yang telah menjadi budaya masyarakat muda di kota-kota besar Indonesia. Untuk pasar ekspor hasil perikanan, terus mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari US\$3.9 Miliar tahun 2015 menjadi US\$4.94 Miliar tahun 2019. Sedangkan komoditas utama yang diminati pasar ekspor adalah udang, tuna-cakalang-tongkol, rumput laut, rajungan-kepiting dan rumput laut. Jumlah diaspora Indonesia yang banyak di luar negeri dan sebagian besar profesional dapat menjadi mediator dalam promosi ekspor produk kelautan dan perikanan. Diaspora tersebut banyak tersebar di negara tujuan penting ekspor hasil perikanan Indonesia, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok.

Political will Pemerintah sangat mendukung bagi kemudahan pembangunan daya saing kelautan dan perikanan. Birokrasi perizinan dipangkas dan berbagai peraturan yang mengambat investasi, aktivitas logistik dan distribusi produk kelautan dan perikanan, ekspor, dan aktivitas ekonomi pendukung telah dibatalkan. Untuk pembiayaan, perbankan dan intitusi keuangan

juga menyambut positif. Hal ini ditandari dari meningkatnya kredit investasi perbankan dan non perbankan untuk sektor kelautan dan perikanan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari Rp2,185 Triliun pada tahun 2017 menjadi Rp3,41 Triliun pada tahun 2019.

2. Permasalahan

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam rangka memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap produk ikan, dan dilema yang dihadapi *stakeholders*/pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dalam konteks pemanfaatan potensi, berbagai upaya peningkatan investasi dan produksi, penanganan pasca panen, diversifikasi produk, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Di saat yang sama, permasalahan berusaha yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil, usaha menengah dan besar, serta dilema lingkungan sekitarnya harus menjadi perhatian. Hal ini penting dalam rangka memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Permasalahan dan tantangan tersebut terbagi dalam 6 (enam) kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, daya saing dan mutu produk tujuan ekspor yang perlu ditingkatkan, ancaman *stunting*, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro-kecil, serta peningkatan kapasitas dan stabilitas pemenuhan bahan baku skala usaha menengah dan besar berkelanjutan.

Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait dengan penyediaan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan penyediaan infrastruktur perikanan di setiap wilayah. Kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan yang dialami oleh pelaku usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan, disebabkan karena skala dan kelayakan usaha yang belum *bankable*. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur yang potensial. Hambatan berusaha dan investasi yang utama antara lain adalah perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan minim informasi yang salah satunya karena promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan *online* yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, BUMN, dan swasta belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya.

Di sisi sarana dan prasarana logistik, tantangan yang dihadapi antara lain penyediaan sarana prasarana pergudangan di wilayah produksi, distribusi dan pasar, sarana prasarana distribusi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pengiriman hasil perikanan, informasi logistik yang belum dapat diakses secara *realtime*, disparitas antara wilayah produksi dan industri hasil perikanan, konektivitas antar wilayah yang perlu ditingkatkan, serta biaya logistik yang perlu diefisiensikan. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi logistik hasil kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan koridor logistik dan implementasi Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

Untuk ekspor produk perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk agar memenuhi permintaan pasar global, yaitu pemenuhan kuantitas dan kualitas bahan baku untuk ekspor, ekspor yang bertumpu pada pasar tradisional (AS, Uni Eropa Jepang), diversifikasi pasar dan produk ekspor, hambatan ekspor di negara tujuan (SPS dan TBT), permasalahan *fisheries subsidies*, dan pelaku usaha pengolahan skala mikro dan kecil belum menerapkan prinsip mutu produk ekspor yang baik.

Di samping itu, hambatan ekspor terjadi dalam banyak cara di negara mitra yang bertujuan sebagai proteksi pasar domestik, atau kepentingan blok ekonomi. Masalah subsidi perikanan, WTO menilainya sebagai kebijakan yang dapat mengganggu perdagangan internasional dan persaingan bebas produk perikanan. Namun, karena sistem ekonomi dan tingkat kesejahteraan berbeda-beda di setiap negara, maka kebijakan subsidi perikanan tersebut tetap berpeluang diberlakukan dengan pembatasan tertentu di negara terkait.

Terkait ekspor yang sudah terbentuk ke negara mitra, permasalahan masih muncul karena eksportir kesulitan

mendapatkan eksportir terdaftar (*register number*) di negara tujuan ekspor, sementara keberadaan diaspora dan atase perdagangan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menjadi penyebab nilai capaian ekspor pada tahun 2019 yaitu hanya 51,96 % dari target yang ditetapkan (USD 9,5 Miliar). Ke depan, hal ini perlu dipecahkan dengan meningkatkan daya saing dan mutu, sambil aktif ikut serta dalam berbagai dialog/persidangan terkait sektor kelautan dan perikanan, dimana diaspora dapat dioptimalkan sebagai mediator.

Stunting mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing di era global. *Stunting* timbul antara lain karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap makanan yang bergizi, termasuk yang bersumber dari ikan. Beberapa hal yang menyebabkan masyarakat sulit mengakses dan enggan mengkonsumsi ikan antara lain: (1) harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, (2) rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi, dan (3) akses masyarakat terhadap ikan dengan mutu dan kualitas yang terjamin.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro dan kecil di Indonesia diantaranya: (1) pengetahuan para pelaku usaha mikro dan kecil tentang standar mutu yang masih rendah, (2) penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, (3) belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, (4) permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan, (5) pembinaan usaha yang perlu ditingkatkan, (6) keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD).

Usaha pengolahan skala menengah dan besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks, yaitu: (1) pelaku usaha skala menengah dan besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas berupa belum termanfaatkannya kapasitas produksi terpasang secara optimal, (2) persaingan bahan baku yang mempengaruhi stabilitas pasokan, (3) fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang belum terintegrasi, (4) Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Hal tersebut berakibat pada sulitnya memenuhi permintaan pasar berskala besar dan kontinu, (5) Usaha pengolahan skala menengah dan besar belum sepenuhnya mengolah ikan secara terstandar, tersertifikasi, berdasarkan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP), ketertelusuran dan lingkungan.

Dalam konteks usaha dan investasi, introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan *online*, lelang *online*, serta *AI* dan *block chain system* dalam logistik ikan perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja investasi sektor kelautan dan perikanan. Perizinan *online* perlu terus

disempurnakan dalam langkah fasilitasi kemudahan investasi. Digitalisasi usaha dan lelang *online* perlu dikembangkan guna membantu perluasan jaringan pasar baik dalam negeri maupun ekspor. Sedangkan AI dan *block chain* system sangat membantu untuk penelusuran cepat dan penyediaan bahan baku ikan yang cukup dan kontinyu bagi industri pengolahan hasil perikanan.

D. Lingkungan Strategis

Pada tahun 2020-2024, pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan akan menghadapi berbagai dinamika yang penuh risiko, penuh tuntutan, penuh kompleksitas, dan untuk menghadapinya diperlukan model baru, cara baru, nilai-nilai baru yang inovatif dalam mencari solusi dari setiap masalah. Secara garis besar, faktor lingkungan strategis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal.

Beberapa faktor lingkungan internal yang berpengaruh dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diantaranya: (a) Kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran, (b) Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), (c) Produksi produk bernilai tambah, (d) Penyerapan kredit pembiayaan oleh pelaku usaha KP skala mikro dan kecil, (e) Daya tarik investasi sektor hilir perikanan, (f) Fragmentasi lokasi produksi UPI, (g) Infrastruktur pengolahan hasil perikanan, (h) Mutu produk olahan perikanan, (i) *Losses* dan *waste* dalam penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Pengaruh faktor-faktor tersebut bersifat langsung dan nyata terhadap pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan, namun dengan intensitas yang berbeda-beda.

Kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran, sebagian besar belum ekonomis secara skala. Dari sisi utilitas, rata-rata UPI mempunyai utilitas yang rendah yang jauh di bawah kapasitas terpasangnya. Meskipun mencapai target, utilitas UPI pada tahun 2019 hanya 65,37 % dengan pertumbuhan 4,76% dibanding capaian tahun 2018. Hal ini menyebabkan keengganan para pemilik modal untuk berinvestasi pada sektor hilir kelautan dan perikanan.

Lokasi produksi yang terfragmentasi, tingginya biaya angkut dan *losses* selama penanganan dan transportasi, infrastruktur yang terbatas, sarana dan prasarana rantai dingin yang terbatas menjadi penyebab lain yang menghambat berkembangnya industri pengolahan ikan. Hal ini harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan.

Dari sisi mutu, produk olahan perikanan dihadapkan pada tantangan pemenuhan perubahan standar mutu pangan yang berlaku di pasar domestik dan internasional. Untuk mempertahankan posisi tawar dan menjamin penerimaan produk olahan perikanan di pasar, maka setiap standar yang berlaku harus dipenuhi. Keterampilan

penanganan mutu dan keunikan cita rasa produk Indonesia dengan dukungan pembinaan mutu yang intensif dari Pemerintah diyakini dapat menjawab tantangan standar mutu tersebut. Saat ini, sekitar 35% dari hasil perikanan dunia mengalami *loss* dan *waste* yang disebabkan oleh: produk jatuh, rusak, dan banyak bagian yang terbuang dalam pengolahan hasil perikanan. Pembinaan penerapan standar mutu, percepatan sertifikasi mutu, dan pengembangan UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, dinilai strategis membantu membenahan internal yang dihadapi pelaku usaha/*stakeholders* daya saing produk kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diantaranya : (a) Isu ketahanan pangan, (b) Perubahan iklim dunia, (c) Peluang pemanfaatan inovasi *Blue Economy*, (d) Kualitas dan realibilitas data perikanan, (e), Minat mitra kerjasama untuk pembangunan hilirisasi perikanan, (f) Tantangan perdagangan perikanan global, (g) Sertifikasi dan standard yang ditetapkan oleh mitra, (h) Harga komoditas pangan dan non pangan, (i) Ancaman *stunting* Indonesia, (j) Mikroplastik (produk dan kemasan), dan (k) Perkembangan teknologi.

Dalam konteks pengembangan produksi olahan dan ekspor perikanan, pembangunan daya saing kelautan dan perikanan, masih terkendala data mitra eksternal, yaitu kualitas dan realibilitas data produksi komoditas yang rendah. Data produksi ikan laut dan produksi budidaya sering tidak terkonfirmasi dengan baik. Hal ini mengakibatkan tingkat ketersediaan bahan baku UPI dan persebaran bahan baku sulit dideteksi. Dalam lingkup besar, implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), peran pusat produksi, pusat pengumpulan, dan pusat distribusi dalam koridor logistik ikan, serta tata niaga ekspor komoditas dapat terganggu. Implementasi STELINA yang diintroduksi dengan *IoT system*, pemetaan logistik ikan, pemetaan ketersediaan dan kebutuhan bahan baku, serta penyusunan neraca ikan diharapkan dapat memperbaiki hal ini.

Perdagangan perikanan global dan persyaratan sertifikat dan standard yang ditetapkan oleh mitra memberi tantangan tersendiri dalam pembangunan penguatan daya saing kelautan dan perikanan. Perdagangan perikanan global ke depan tidak hanya dipengaruhi oleh peranan perdagangan komoditas ikan, tetapi juga oleh perdagangan produk olahan bernilai tambah dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan bisnis perikanan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara pemasok, akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan komoditas ikan dan produk olahannya lintas negara. Pada posisi ini, negara tujuan ekspor akan memberlakukan persyaratan sertifikasi, standard, dan sistem proteksi/hambatan perdagangan, seperti *non tariff measures* (NTMs) dan *non tariff barriers* (NTBs) untuk melindungi produk domestiknya. Jumlah NTMs di dunia meningkat pesat dalam dalam beberapa tahun

terakhir, seperti: *Sanitary-and-Phytosanitary* dan *export taxes/restriction*. Sementara itu, apabila dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin. Di sisi negara importir, hal ini menjadi pekerjaan baru di meja diplomasi. Diplomasi dalam penyelesaian masalah tarif, non-tarif, subsidi perdagangan, serta sertifikasi dan standar oleh negara mitra perlu dilakukan melalui forum dialog/persidangan dan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 ditujukan untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong-Royong”. Visi Menteri Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden dalam urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 adalah “Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri” dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam urusan Kelautan dan Perikanan.

Implementasi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian” ditunjukkan dalam bentuk pengelolaan kelautan dan perikanan yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya, nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, dan daya saing industri kelautan dan perikanan yang kuat.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan perlu menentukan misi organisasi. Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk menjalankan salah satu dari Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh KKP adalah sebagai berikut :

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”;
dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh KKP, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi, seperti disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Dua Misi Presiden yang didukung Ditjen PDSPKP

Berdasarkan hal tersebut, Misi Ditjen PDSPKP adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

C. Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Misi peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
 - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024;
 - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;

- d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;
 - e. meningkatnya konsumsi ikan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;
 - f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.
2. Misi melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:
- a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
 - b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

D. Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen. Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - a. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
 - 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
 - 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.
 - b. Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab

Ditjen PDSPKP meningkat 4 (skala 1-5) pada tahun 2020 menjadi 5 (skala 1-5) pada tahun 2024.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.
- b. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024;
 - 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024.
- c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

3. Program Dukungan Manajemen

- a. Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 produk pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (84,75) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024;

- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 10) Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020-2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 disusun mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden terkait sektor kelautan dan perikanan. Arah kebijakan KKP tersebut adalah:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan kelima arah kebijakan tersebut, KKP melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik di seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Adapun strategi pelaksanaan untuk setiap kebijakan tersebut dijelaskan:

1. arah kebijakan “Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan”. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Membuka komunikasi dengan stakeholders untuk harmonisasi kebijakan;
 - b. Optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI;
 - c. Penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan;
 - d. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah;
 - e. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional;

- f. Eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
 - g. Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses;
 - h. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha KP skala kecil, kelembagaan nelayan, kampung nelayan maju, asuransi, sertifikasi dan perlindungan HAM Perikanan;
 - i. Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan;
 - j. Pengelolaan perikanan di perairan umum;
 - k. Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - l. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
 - m. Pengembangan SKPT tangkap; dan
 - n. Penguatan UPT perikanan tangkap.
2. arah kebijakan “Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya, dan sinergisitas program dengan lintas sektor” dilaksanakan dengan strategi antara lain
- a. akselerasi peningkatan produksi *aquaculture*/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha/swasta;
 - c. pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng, dan rumput laut;
 - d. pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
 - e. pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan *broodstock center*, serta modernisasi teknologi;
 - f. pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;

- g. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
 - h. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
 - i. pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
 - j. peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
 - k. penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis;
 - l. pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - m. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - n. penguatan unit pelaksana teknis perikanan budidaya.
3. arah kebijakan “Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan” yang diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut;
 - b. peningkatan standarisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan;
 - d. pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 - e. pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
 - f. peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
 - g. pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting;
 - h. perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan

- sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan branding produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Major Project* RPJMN 2020-2024) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
 - j. pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
 - k. peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
 - l. penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
 - m. peningkatan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan;
 - n. pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*;
 - o. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
 - p. peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
 - q. fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;
 - r. pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - s. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;
 - t. harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (*traceability*);
 - u. pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
 - v. penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
 - w. peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - x. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - y. penguatan UPT mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing.

4. arah kebijakan “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
 - a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - b. perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di WP3K;
 - c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - d. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi bakau (*mangrove*), dan terumbu karang;
 - e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
 - f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
 - g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
 - h. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;
 - i. pengelolaan kawasan wisata bahari dan BMKT;
 - j. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
 - k. pengakuan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - l. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi;
 - m. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
 - n. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi Rencana Zonasi kawasan laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali serta penyelarasannya dengan Rencana Tata Ruang;
 - o. operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
 - p. harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
 - q. penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran di bidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
 - r. peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (*reference* dan *destructive fishing*);
 - s. pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - t. peningkatan UPT pengelolaan ruang laut, UPT pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan UPT karantina ikan.
5. arah kebijakan “Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan

perikanan”. Dilaksanakan dengan strategi:

- a. peningkatan riset untuk menyediakan data dan/informasi stok sumberdaya perikanan (*stock assessment*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
- b. peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan HKI (paten) dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
- c. peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan *science based policy*, untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
- d. peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
- e. pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi *center of excellence* dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
- f. pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
- g. pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
- h. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
- i. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
- j. pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan, dan riset kelautan dan perikanan;
- k. penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset (*Research Extension Linked (REL)*) untuk mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- l. peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- m. peningkatan kerja sama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- n. peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang. Pengarusutamaan ini bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/*Goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya : (1) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut, (2) mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, (3) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, (4) mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan, (5) melestarikan wilayah pesisir dan laut, (6) mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, (7) meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, (8) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, (9) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan (10) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam UNCLOS.

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan *roadmap* PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan profil gender; dan (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengarusutamaan

sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya: (1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

Arah kebijakan “Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan” memberi arahan bagi pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan yang ditugaskan kepada Ditjen PDSKP dalam Renstra KKP 2020-2024, khususnya terkait peningkatan produksi untuk penyediaan logistik ikan serta investasi dan keberlanjutan usaha Kelautan dan Perikanan. Kebijakan KP-3 memberi arahan bagi program nilai tambah dan daya saing industri yang ditugaskan kepada Ditjen PDSKP. Kebijakan ini diimplementasikan melalui mengembangkan sistem tatakelola pemerintahan yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSKP, dengan didukung dua *Project Major* dalam RPJMN 2020-2024, yaitu :

1. Integrasi pelabuhan perikanan dengan *fish market* bertaraf internasional, mencakup pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *fish market* bertaraf internasional dan fasilitas lainnya.
2. Penguatan jaminan usaha dan korporasi, melalui peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha KP skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersama. *Major Project* tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan melibatkan K/L, Pusat-Daerah- BUMN-Masyarakat,

sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen PDSPKP

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital. Strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:

- a. Pemetaan potensi dan promosi peluang investasi.

Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah:

- 1) penyiapan bahan informasi potensi dan peluang investasi;
- 2) penyiapan paket investasi yang *ready to offer* kepada investor;
- 3) penyelenggaraan Forum Bisnis dan Investasi (*Marine and Fisheries Business and Investment Forum – MFBIF*); dan
- 4) partisipasi, kerja sama promosi dan pameran investasi.

- b. Pendampingan kepada investor.

Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:

- 1) fasilitasi kemitraan usaha calon investor;
- 2) fasilitasi perizinan *online*; dan
- 3) fasilitasi penyelesaian hambatan investasi.

- c. Pengembangan Klaster Daya Saing kelautan dan perikanan yang *ready to offer*.

Klaster Daya Saing produk kelautan dan perikanan merupakan tempat pemusatan kegiatan industri perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan sehingga menghasilkan produk perikanan yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih

tinggi. Langkah operasional untuk mendukung strategi penyiapan Klaster Daya Saing yang *ready to offer* ini adalah:

- 1) Penyusunan Konsep Klaster Daya Saing;
- 2) Identifikasi Calon Lokasi dan Kajian Kelayakan Lokasi;
- 3) Penyusunan Master Plan dan Analisis Rencana Investasi;
- 4) Fasilitasi perizinan dan kajian lingkungan;
- 5) Sinergisitas dukungan dan promosi investasi; dan
- 6) Fasilitasi kemitraan dan realisasi investasi. Klaster Daya Saing tersebut dapat berbasis kawasan industri, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), koridor logistik di dalam wilayah pengelolaan perikanan.

d. Pemantuan dan pengendalian investasi.

Strategi pemantuan dan pengendalian ini ditujukan untuk percepatan realisasi investasi melalui:

- 1) Pemantauan rencana dan realisasi serta trend investasi; dan
- 2) Pengendalian investasi bila terjadi kendala dalam realisasi investasi. Dalam pemantuan dan pengendalian ini, perlu dibangun koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait lainnya.

2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:

a. Fasilitasi kemitraan usaha.

Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan pengembangan kemitraan:

- 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
- 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
- 3) Pendampingan dan monitoring.

b. Fasilitasi akses pembiayaan

Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu:

- 1) Gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan
- 2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah.

Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan adalah penjaringan calon debitur potensial, peningkatan kelayakan usaha, sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan, pendampingan manajemen usaha, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).

c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan.

Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:

- 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
- 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
- 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.

d. Fasilitasi digitalisasi usaha.

Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan *online* karena menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara *online*. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas. Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:

- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
- 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
- 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
- 4) fasilitasi penyiapan desain *website* yang menarik (*mobile friendly*);
- 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
- 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
- 7) responsif terhadap keluhan pelanggan.

3. Arah kebijakan “Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain :

a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan.

Pemetaan logistik adalah langkah awal dalam upaya meningkatkan kinerja logistik ikan. Pemetaan yang dilakukan antara lain pemetaan pasokan, permintaan, sarana-prasarana logistik, penyedia jasa layanan logistik dan lain sebagainya. Pemetaan yang tepat diharapkan memberikan informasi yang benar tentang berbagai hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja logistik seperti informasi tentang kebutuhan sarana-prasarana, trayek atau rute transportasi, waktu pengiriman dan lain-lain. Dalam upaya mewujudkan hal di atas, maka dilaksanakan pengembangan Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA).

Pengembangan STELINA dilakukan untuk membangun logistik ikan yang terkoneksi antar wilayah. Strategi STELINA mengkoneksikan semua sistem informasi rantai pasok (*supply chain*) dan ketelusuran (*traceability*) ikan dan produk perikanan sebagai pencatatan ketelusuran secara elektronik mulai dari penangkapan, budidaya, pemasok, distribusi, pengolahan, sampai ke pemasaran. Langkah-langkah operasional pelaksanaan strategi STELINA ini adalah:

- 1) Pemantauan implementasi STELINA dan introduksi *IoT System*;
- 2) Pemetaan logistik di seluruh Provinsi dan koridor logistik
- 3) Pemantauan pasokan, permintaan dan stock perikanan;
- 4) Penyusunan neraca ikan;
- 5) Penghitungan kinerja logistik ikan.

- b. Penguatan pengadaan dan penyimpanan hasil kelautan dan perikanan.

Strategi ini mendukung kebijakan pengembangan sistem logistik ikan terkoneksi antar wilayah/koridor, bersesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta Program Utama Presiden terkait transformasi ekonomi untuk memperbaiki daya saing manufaktur dan bernilai tambah. Dengan strategi ini, keamanan ikan yang dikonsumsi masyarakat lebih terjamin, pengadaan dan penyimpanan ikan per wilayah/koridor lebih terjaga, dan daya saing produk dalam sistem logistik terkoneksi lebih baik. Langkah-langkah operasional pelaksanaan strategi ini adalah:

- 1) Fasilitasi sarana dan prasarana pengadaan mencakup pembangunan pabrik es, pengadaan mesin pembuat es (*Ice Flake Machine*), pengadaan fasilitas pelelangan komoditas, dan fasilitasi sistem lelang;
- 2) Fasilitasi sarana dan prasarana penyimpanan antara lain gudang beku, gudang dingin dan gudang kering;
- 3) Fasilitasi pelaku usaha dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan; dan
- 4) Bimbingan teknis dalam rangka pengadaan dan penyimpanan.

- c. Penguatan distribusi dan penyediaan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.

Strategi ini mendukung penguatan sistem logistik ikan yang efisien, mendukung konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor), serta memperkecil ketimpangan stok bahan baku ikan antara wilayah di Indonesia. Langkah-langkah operasional untuk pelaksanaan strategi ini adalah:

- 1) fasilitasi sarana distribusi hasil kelautan dan perikanan seperti sarana peralatan pada unit distribusi (*coolbox*, keranjang, *freezer*, perlengkapan supplier), prasarana pada sentra distribusi berupa Depo distribusi dan sarana pengangkutan hasil perikanan berupa fasilitasi kendaraan berrefrigasi dan non-refrigasi;
- 2) penataan distribusi hasil perikanan: dan
- 3) fasilitasi penyediaan layanan jasa logistik di sentra perikanan, dan bimbingan teknis dalam rangka distribusi hasil perikanan.

- d. Penataan tata niaga dan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik.

Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional:

- 1) Pengembangan dan pengelolaan koridor logistik; dan
- 2) Penyusunan mekanisme/regulasi *buffer stock*.

- e. Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan

Penyediaan ikan melalui kegiatan pemasukan hasil perikanan (importasi) dilakukan ketika ketersediaan bahan baku dalam negeri tidak mencukupi dan atau untuk memenuhi kebutuhan akan jenis ikan yang tidak ada di Indonesia. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP) memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan ikan, musim tangkap/musim panen, dan pasokan dari sentra produksi lain. Pengendalian pemasukan hasil perikanan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keberlanjutan industri di sektor hulu hilir perikanan. Dalam rangka penerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanan dilakukan kegiatan antara lain:

- 1) Penetapan alokasi pemasukan hasil perikanan yang mengacu kepada neraca ikan nasional;
 - 2) Analisa ketersediaan dan kebutuhan ikan dalam rangka pemasukan hasil perikanan;
 - 3) Koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga dalam rangka pemasukan hasil perikanan;
 - 4) Pelayanan penerbitan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;
 - 5) Peningkatan kompetensi petugas pelayanan penerbitan pemasukan hasil perikanan;
 - 6) Inovasi pelayanan penerbitan rekomendasi masukan hasil perikanan.
- f. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG).

Sistem *buffer stock* merupakan sistem penyediaan stock yang ditujukan untuk menjadi penyangga hasil-hasil kelautan dan perikanan. *Buffer stock* mendukung program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), karena berfungsi menampung ikan di musim puncak/musim panen dan menjadi pemasok ikan ke daerah-daerah yang mengalami kelangkaan. *Buffer stock* akan menampung ikan dalam jumlah besar dan bisa dalam waktu yang lebih lama, sehingga sistem penyimpanan dan distribusinya lebih baik. Sarana penyimpanan/ penampungan dapat berupa gudang beku dan gudang kering dengan kapasitas tertentu.

Langkah operasional yang dilakukan dengan menjalankan fungsi resi gudang pada saat harga ikan anjlok, karena *blooming* massal produksi ikan atau gejolak tertentu yang berpengaruh luas. Nelayan/pembudidaya/pengolah dapat menjaminkan ikan produksinya ke pengelola gudang untuk mendapatkan resi. Pada saat harga membaik (disepakati), ikannya baru dijual, dan nelayan/pembudidaya/pengolah dapat meminta bayar dengan resi yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

4. Arah kebijakan “Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing” dilaksanakan dengan strategi antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan bahan baku dan peningkatan utilitas UPI. Bahan baku merupakan input penting yang menentukan keberlangsungan proses produksi. Strategi pemetaan kebutuhan bahan baku ini diperlukan untuk mengetahui sumber, potensi,

dan kontinuitas bahan baku ikan supaya proses produksi di UPI tetap berlangsung. Pasokan bahan baku yang pasti dan stabil diyakini dapat meningkatkan utilitas UPI. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung pemetaan bahan baku dan peningkatan utilitas UPI adalah:

- 1) Perencanaan kebutuhan bahan baku UPI;
- 2) Penentuan persediaan minimal bahan baku UPI;
- 3) Pemetaan kebutuhan bahan baku; dan
- 4) Pendataan kapasitas dan pengembangan program peningkatan utilitas UPI.

b. Fasilitasi sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan dan pengolahan.

Mengingat karakteristik operasi dan kebutuhan UPI yang berbeda, perlu dilakukan pembedaan fasilitasi bagi UPI skala menengah dan besar serta mikro dan kecil. Sarana dan prasarana yang perlu difasilitasi untuk UPI menengah dan besar terbagi dua, yaitu:

- 1) Sarana dan prasarana pengolahan produk Kelautan dan Perikanan; dan
- 2) Sarana dan prasarana pendukung pengolahan produk KP. Sementara untuk UPI skala mikro dan kecil, sarana dan prasarana yang difasilitasi mencakup: (1)
 - a) Fasilitasi Sistem Rantai Dingin (*chest freezer*);
 - b) Fasilitasi peralatan pengolahan; dan
 - c) Fasilitasi *Mini Plant*.

c. Pemusatan kegiatan pengolahan ikan.

Strategi ini mendukung kebijakan peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro dan kecil. Terbentuknya pusat kegiatan pengolahan ikan akan mendorong sinergi, kolektivitas, upaya massal dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil perikanan, yang secara signifikan meningkatkan produksi produk olahan ikan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Penataan aktivitas kampung pengolahan;
- 2) Peningkatan kapasitas dan produktivitas UPI anggota kampung pengolahan;
- 3) Peningkatan penerapan standar massal;
- 4) Pengembangan sistem *penta helix* (pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media); dan
- 5) Inisiasi rumah *grading* di sentra-sentra produksi budidaya.

d. Pembinaan mutu pada UPI.

Untuk mengoptimalkan penerapan mutu pelaku UPI perlu diberi pembinaan, seperti:

- 1) pengenalan konsep standar mutu dan manfaatnya;
- 2) penguatan kompetensi di bidang mutu bagi UPI dan penyuluh
- 3) pelibatan UPI yang berhasil dalam program pembinaan UPI lainnya; dan

- 4) penguatan kapasitas penyuluh dan pembina mutu. Pembinaan mutu pada UPI dapat dilakukan antara lain melalui magang di industri yang menerapkan standar mutu, klinik mutu produk kelautan dan perikanan serta kunjungan ke lapangan.
 - e. Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah. Langkah-langkah dalam rangka mengembangkan produk bernilai tambah dilakukan melalui:
 - 1) perekayasaan produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - 2) diseminasi dan penerapan produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan pada pelaku usaha;
 - 3) bimbingan teknis pengembangan produk hasil kelautan dan perikanan;
 - 4) pengembangan UPI yang menerapkan produk inovasi bernilai tambah;
 - 5) pengembangan UPI mendukung *zero waste industry*.
 - f. Penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk kelautan dan perikanan
Dalam RPJMN 2020-2024 dijelaskan bahwa standarisasi dan sertifikasi merupakan prinsip penting dalam industri pengolahan dan pengembangan produk bernilai tambah. Dalam penerapan standar, langkah-langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Kaji ulang dan pengusulan Standar Nasional Indonesia (SNI) kelautan dan perikanan;
 - 2) Perumusan SNI produk kelautan dan perikanan;
 - 3) Pengusulan SNI ke Badan Standardisasi Nasional (BSN);
 - 4) Sosialisasi penerapan SNI kepada pelaku usaha; dan
 - 5) Bimbingan teknis penerapan SNI.
 - g. Penerapan Kelayakan Pengolahan pada Unit Pengolahan Ikan
Penerapan standar mutu pada UPI diperlukan untuk:
 - 1) mewujudkan jaminan mutu produk olahan, peningkatan produktifitas UPI, serta perlindungan konsumen dalam hal keselamatan, kesehatan, dan keamanan pangan;
 - 2) bentuk komitmen UPI dalam memenuhi persyaratan standar, sertifikasi, dan kualifikasi produk; dan
 - 3) membangun citra produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global maupun domestik.
Langkah operasional untuk penerapan kelayakan pengolahan pada UPI antara lain:
 - 1) bimbingan teknis GMP-SSOP;
 - 2) penyelenggaraan layanan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan *online*; dan
 - 3) evaluasi dan inovasi pelaksanaan layanan SKP.
5. Arah kebijakan “Meningkatkan konsumsi ikan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).

Dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional untuk menyiapkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas perlu dilakukan GEMARIKAN. Langkah-langkah operasional untuk memperluas GEMARIKAN antara lain:

- 1) Koordinasi dan sinergi kegiatan GEMARIKAN antar instansi/kelembagaan pemerintah dan/atau non pemerintah yang dilaksanakan secara vertikal dan/atau horizontal (Forikan);
- 2) Pendekatan komunikasi dengan seluruh mitra GEMARIKAN;
- 3) Promosi dan Edukasi melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi;
- 4) Bazaar produk perikanan dan kuliner ikan;
- 5) Pelaksanaan safari GEMARIKAN;
- 6) Pengadaan paket Gemarikan;
- 7) pameran produk kelautan dan perikanan;
- 8) penyelenggaraan Hari Ikan Nasional.

b. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan.

Langkah operasional untuk pelaksanaan strategi ini adalah:

- 1) Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan pasar ikan yang bersih dan memenuhi standar higienis termasuk pasar ikan modern Muara Baru;
- 2) Fasilitasi sarana pemasaran bagi pelaku usaha pemasaran.

c. Fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran

Strategi fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran ini diharapkan dapat menyelesaikan hambatan pemasaran sekaligus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran, terutama di daerah potensial. Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran antara lain adalah:

- 1) pembangunan pasar ikan;
- 2) rehabilitasi pasar ikan;
- 3) pembangunan sentra kuliner;
- 4) pelaksanaan *major project* pembangunan pasar ikan bertaraf internasional yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan.

d. Penghitungan angka konsumsi ikan dan peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri.

Strategi ini ditujukan untuk mendukung pengukuran keberhasilan pencapaian target angka konsumsi ikan. Variabel perhitungan angka konsumsi ikan berbasis SUSENAS terdiri dari: (a) konsumsi ikan rumah tangga, (b) konsumsi ikan luar rumah tangga, dan (c) konsumsi ikan tidak tercatat. Selain penghitungan angka konsumsi ikan berbasis SUSENAS juga dilakukan penghitungan angka konsumsi ikan bulanan melalui survey di 34 Provinsi lokasi prevalensi *stunting*.

Penyusunan peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri berguna untuk memetakan kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan atau

produk olahannya, serta memetakan tingkat konsumsi dan kebutuhan ikan yang terjadi di dalam negeri (34 provinsi).

e. Perluasan akses pasar dalam negeri

Langkah operasional yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan akses pasar dalam negeri antara lain adalah:

- 1) Fasilitasi pelaku usaha dalam rangka perluasan akses pasar dalam negeri;
- 2) Inovasi akses pasar melalui *e-commerce*;
- 3) Fasilitasi pengujian dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan untuk perluasan akses pasar.

6. Arah kebijakan “Meningkatkan ekspor hasil kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain :

a. Pemetaan akses pasar negara tujuan ekspor.

Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbuka yang mengandalkan perdagangan dalam dan luar negeri untuk menunjang perekonomiannya. Produk perikanan merupakan salah satu produk unggulan Indonesia yang terus dikembangkan ekspornya di pasar luar negeri. Salah satu syarat dalam peningkatan ekspor yang harus dipenuhi adalah penyediaan informasi yang aktual dan akurat mengenai peluang pasar produk perikanan di negara tujuan ekspor baik di pasar tradisional Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang maupun pasar non tradisional China, ASEAN, Timur Tengah dan negara/kawasan lainnya. Pemetaan pasar tujuan ekspor dilakukan melalui kunjungan lapang ke pasar tujuan ekspor serta sumber data lain yang kredibel untuk melihat:

- 1) potensi pasar di suatu wilayah;
- 2) preferensi masyarakat akan konsumsi jenis ikan dinegara calon importir
- 3) rantai pasok dan logistik; dan
- 4) pesaing potensial.

Pemetaan tersebut diharapkan memberi informasi untuk selanjutnya dianalisis menjadi strategi perluasan pasar ekspor ke suatu negara.

b. Perundingan peningkatan akses pasar luar negeri.

Langkah-langkah operasional dalam perundingan peningkatan akses pasar luar negeri antara lain: (a) Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, yaitu KBRI di luar negeri tentang esensi forum, negara/lembaga yang terlibat, (b) Koordinasi dan kerjasama akses pasar dengan perwakilan dagang RI di luar negeri (*Indonesia Trade Promotion Center*), dan (c) Penjaringan sumber-sumber informasi lainnya. Keikutsertaan dalam forum perundingan internasional juga memperkuat posisi Indonesia guna memastikan kepentingan nasional mendapat tempat semestinya dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, baik bilateral, regional maupun multilateral. Disamping forum dialog terbuka, forum perundingan bilateral, regional, dan multilateral antar pejabat

Negara juga berperan penting untuk meningkatkan akses pasar produk kelautan dan perikanan di pasar luar negeri. Informasi akses pasar ekspor yang diberikan bisa lebih akurat dan lebih mudah di *follow-up*.

c. Penanganan hambatan ekspor.

Hambatan perdagangan luar negeri tersebut diantaranya terkait hambatan tarif bea masuk dan hambatan non-tarif lainnya di negara tujuan ekspor. Keikutsertaan dalam forum dialog perdagangan internasional, sedikit banyak membantu penyelesaian hambatan dagang produk kelautan dan perikanan. Tujuan utamanya adalah membuka akses pasar produk kelautan dan perikanan di luar negeri dan mendukung pencapaian target nilai ekspor produk kelautan dan perikanan.

Partisipasi dalam dialog perdagangan internasional harus didasari oleh keputusan yang cermat dan terukur. Untuk itu dilakukan sinergi dan koordinasi dengan unit Eselon 1 terkait, *stakeholder*, dan K/L terkait lainnya melalui: (a) rapat/pertemuan penyusunan posisi runding, (b) temu koordinasi, dan (c) konsultasi publik guna menjaring masukan dari (*stakeholder*). Di samping itu, juga dilakukan analisis pasar luar negeri oleh Tim Teknis *non tariff measure*, Tim teknis TIG di forum Bilateral dan Regional.

d. Fasilitasi keikutsertaan dalam forum promosi/pameran skala internasional di dalam dan luar negeri.

Langkah operasional untuk pelaksanaan strategi ini adalah dengan memfasilitasi perusahaan pada pameran produk kelautan dan perikanan Indonesia dalam satu Paviliun Kementerian Kelautan dan Perikanan baik dengan kontruksi *customized design* maupun *booth standard*. Sebagai rangkaian kegiatan pameran tersebut juga dilakukan *business matching*, demo masak dan pertunjukan kesenian daerah pada Paviliun Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta misi dagang lainnya.

Pada tahun 2020-2024, Ditjen PDSPKP merencanakan keikutsertaan dalam 5 (lima) forum promosi/pameran skala internasional di dalam dan luar negeri diantaranya yaitu: *Seafood Expo North Amerika (SENA)*, *Seafood Expo Global (SEG)*, *Food Ingredient Europe (FIE)*, *Japan International Seafood and Technology Expo (JISTE)*, *SEAFEX*, *Indonesia Expo Jeddah*, *China Fisheries Seafood Expo (CFSE)*, *World Expo Dubai*, *INTERZOO*, dan *Trade Expo Indonesia (TEI)*.

e. Branding produk perikanan Indonesia.

Untuk mendukung promosi yang dilakukan dan mendukung penguatan *branding Indonesian Seafood: Safe and Sustainable*, diperlukan pembuatan materi promosi baik digital maupun cetak seperti *leaflet*, *booklet*, *backdrop*, *banner* atau materi promosi lain yang sesuai serta pemasangan iklan pada katalog/*website official*.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan termasuk pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan, maka diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan Renstra KKP, yang meliputi:

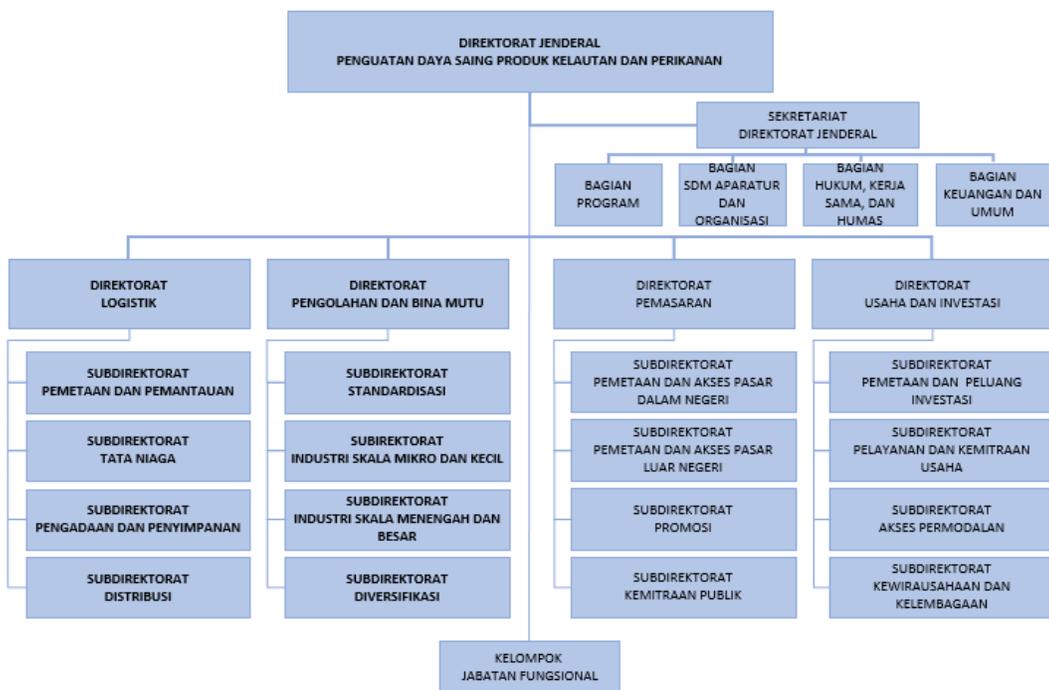
1. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (R. PermenKP), yaitu:
 - a. R. PermenKP tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu;
 - b. R. PermenKP tentang peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan;
 - c. R. PermenKP tentang jenis ikan yang dibatasi untuk dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. R. PermenKP tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Perwakilan Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri;
 - e. R. PermenKP tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - f. R. PermenKP tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan,
2. Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Rev. PermenKP), yaitu:
 - a. Rev. PermenKP Nomor 17 tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Fasilitas Pajak;
 - b. Rev. Permen KP No. 58 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil perikanan;
 - c. Rev. Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
 - d. Rev. Permen KP No 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
 - e. Rev. Permen KP No 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - f. Rev. Permen KP No 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara pemberian Surat persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan Renstra Kementerian. Kerangka kelembagaan tersebut memiliki urgensi, diantaranya mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan unit organisasi setingkat eselon I yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian diubah kembali melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sesuai dengan Peraturan Menteri yang tersebut disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 dan misi Presiden, maka Ditjen PDSPKP melakukan penataan kelembagaan:

1. Transformasi pada beberapa perangkat kelembagaan di lingkungan Ditjen PDSPKP. Transformasi tersebut diperlukan supaya kelembagaan Ditjen PDSPKP tercapai tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan

diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Untuk BBP2HP, transformasinya juga mencakup perubahan nama lembaga, yaitu menjadi Balai Besar Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan (BBP3KP). Hal ini memperluas ruang lingkup kerja balai, sehingga pelayanan yang diberikan lebih maksimal.

2. Penguatan satuan kerja dan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) di beberapa lokasi. Keberadaan UPT akan memperluas jangkauan pelayanan dan bantuan teknis yang dibutuhkan pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini mendukung transformasi ekonomi yaitu bertambahnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengusahaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi tersebut merupakan salah satu dari 5 (lima) Program Pokok Presiden tahun 2020 -2024.
3. Mendorong penataan jabatan fungsional tertentu supaya lebih berkompeten, berintegritas, dan profesional guna mendukung kinerja Ditjen PDSPKP. Hal ini penting dalam upaya mencapai target kinerja utama Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024.

Penataan kelembagaan Ditjen PDSPKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan presiden terkait dengan transformasi jabatan structural ke jabatan fungsional. Selain penataan kelembagaan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan secara utuh juga memerlukan dukungan instansi terkait serta peranserta masyarakat luas. Adapun beberapa instansi tersebut dan lingkup dukungannya, adalah:

1. Kementerian PUPR: Dukungan jalan, penyediaan air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya di kawasan industri perikanan
2. Kementerian Dalam Negeri & PEMDA: Dukungan terhadap regulasi, lahan dan infrastruktur dasar, serta sinergi kegiatan
3. Kementerian Perhubungan: Konektivitas/tol laut yang mendukung koridor sistem logistik ikan nasional
4. Kementerian Luar Negeri: Dukungan pembentukan atase perikanan, promosi dan *business matching* di luar negeri, diplomasi penanganan hambatan tarif dan non tarif
5. Kementerian Kesehatan: Dukungan GEMARIKAN dalam rangka penanganan *stunting*
6. Kementerian Sosial: Dukungan GEMARIKAN dalam rangka penanganan *stunting*
7. Kementerian Koperasi dan UKM: Dukungan Pembinaan dan Pembiayaan UMKM Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
8. Kementerian Koordinator Bidang Maritim & Investasi: Dukungan Kebijakan dan Koordinasi
9. Kementerian Perdagangan: Dukungan promosi dan *business matching* di dalam dan luar negeri serta diplomasi penanganan hambatan tarif dan non tarif

10. Kementerian Desa PDT Transmigrasi: Dukungan GEMARIKAN dalam rangka penanganan *stunting* dan Kampung Pengolahan Ikan skala UMKM
11. Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Dukungan promosi di dalam dan luar negeri
12. PLN: Penyediaan listrik di lokasi sarpras rantai dingin (gudang beku, pabrik es, dll) yang telah dan akan dibangun
13. Garuda Indonesia: Dukungan ekspor produk perikanan, GEMARIKAN, serta Pembinaan & Pembiayaan Kampung Pengolahan Ikan skala UMKM
14. BKKBN: Dukungan GEMARIKAN dalam rangka penanganan *stunting*
15. BKPM: Dukungan sinergi promosi investasi
16. OJK: Dukungan sinergi pembiayaan usaha
17. BUMN: Dukungan pembiayaan, GEMARIKAN dan pembinaan Kampung Pengolahan Ikan skala UMKM
18. Dukungan GEMARIKAN, serta Pembinaan & Pembiayaan Kampung Pengolahan Ikan skala UMKM

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator Kinerja Program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Terkait dengan itu, Ditjen PDSPKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal yang merupakan sasaran kinerja program yang akuntabilitasnya berkaitan dengan Ditjen PDSPKP sebagai unit organisasi K/L setingkat Eselon I A. Detail Indikator Kinerja Program Ditjen PDSPKP disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat						
1	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	5,21	5,49	5,79	6,1	6,43
2	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (indeks)	52	54	56	58	60
3	Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp. Triliun)	3	3,3	3,6	3,9	4,2
Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat						
4	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP (Tingkat Kemandirian skala 1-5)	4	5	5	5	5
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI						
Sasaran: Produk Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing						
5	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (juta ton)	6,9	7,05	7,20	7,35	7,50
Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat						
6	Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00
7	Konsumsi ikan (Kg/Kapita)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05
Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat						

NO	SASARAN PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
8	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (indeks)	103,75	104	104,25	104,5	104,75
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP						
9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP (indeks)	72	73	74	75	76
10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP (%)	82	83	84	85	86
11	Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (level)	3	3	3	3	3
12	Nilai PM PRB Ditjen PDSPKP (nilai)	30	31	32	33	34
13	Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP (nilai)	84	84,15	84,25	84,5	84,75
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	60	65	70	75	80
15	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP (unit)	2	2	2	2	2
16	Nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP (nilai)	Baik (88)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (90)	Baik (90)
17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP (persen)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
18	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP (%)	70	72,5	75	77,5	80

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*) yang dilakukan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal merupakan sasaran kinerja kegiatan yang akuntabilitasnya berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon II di Ditjen

PDSPKP. Detail Indikator Kinerja Kegiatan tersebut disajikan pada Lampiran III.

B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sesuai sasaran dan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan tersebut akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat.

Pendanaan APBN merupakan pendanaan yang berasal dari pajak yang disetor oleh rakyat. Ditjen PDSPKP akan berupaya menggunakan pendanaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Penguatan pendanaan juga akan dilakukan dengan K/L terkait dan PEMDA (pendanaan APBD) yang membangun sinergi dengan Ditjen PDSPKP. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan Ditjen PDSPKP menurut program dan kegiatan untuk tahun 2020-2014 disajikan pada Lampiran III.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tersebut merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur, dimana pencapaiannya dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi sebagaimana disampaikan dalam Pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Dalam kaitan ini juga, penyusunan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 juga untuk menjalankan visi dan misi Presiden sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penguatan daya saing kelautan dan perikanan, serta penilaian capaian target kinerjanya. Dalam penggunaannya selama lima tahun ke depan, Rencana Strategis ini akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat kekurangan atau karena sesuatu dan lain hal sehingga diperlukan perubahan terhadap Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiarti

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
 PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020 – 2024

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022 /2023/2024)
1.	R.Permen tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai tambah Hasil Perikanan	Dit. PBM	a. Biro Hukum dan Organisasi b. BKIPM c. DJPT d. DJPB e. DJPRL f. Kemenkumham	2024
2.	Rancangan Peraturan Menteri tentang peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai tambah Hasil Perikanan	Dit. PBM		2022

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
3.	Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Sertifikasi Pengolah Ikan	Tindak lanjut dari Permen KP Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Dit. PBM	a. Biro Hukum dan Organisasi b. BRSDM KP c. Kemenkumham	2024
4.	Rancangan Keputusan Menteri tentang jenis ikan yang dibatasi untuk dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia	Amanat dari UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Dit. PBM	a. Biro Hukum dan Organisasi b. BKIPM c. DJPT d. DJPB e. DJPRL f. Kemenkumham	2024
5.	Revisi Permen KP Nomor 17 tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Fasilitas Pajak	Terbitnya PP 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Bidang Usaha Tertentu menggantikan PP 18 Tahun 2016, sehingga perlu mengatur terkait fasilitas di sektor KP	Dit. UI	BKPM (Direktorat Fasilitas), Kemenkeu (DJP)	2020
6.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Perwakilan Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri	Melaksanakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional	Setditjen PDSPKP	a. Biro Hukum dan Organisasi b. Kemenlu c. Kemenkumham	2022

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
7.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah pasal 41 Permen PAN RB Nomor 7 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan - Sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi, diklat fungsional/teknis, dan diklat penjenjangan 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro SDMA b. Biro Hukum dan Organisasi c. KemenPANRB d. BKN e. Kemenkumham 	2021
8.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Assistensi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah pasal 40 Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan - Sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi, diklat fungsional/teknis, dan diklat penjenjangan 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro SDMA b. Biro Hukum dan Organisasi c. KemenPANRB d. BKN e. Kemenkumham 	2021
9.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah perubahan PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan - Sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi, diklat 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro SDMA b. Biro Hukum dan Organisasi c. KemenPANRB d. BKN 	2022

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
		fungsional/teknis, dan diklat penjenjangan		e. KemenKumHAM	
10.	Perubahan Atas Permen KP No 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan	KUR telah mengalami beberapa kali perubahan skema melalui Permenko No 8 tahun 2018 yang telah direvisi melalui Permenko No. 6 tahun 2019, serta tambahan aturan KUR khusus pandemi Covid-19 melalui Permenko No. 6 dan 8 tahun 2020.	Dit. UI	a. Biro Hukum dan Organisasi b. Kemenhumham	2020
11.	Perubahan Atas Permen KP No. 58 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2019 tentang Percepatan kemudahan berusaha, mengamanatkan agar dapat mengurangi jumlah, penyederhanan prosedur dan persyaratan penerbitan perijinan berusaha. - Menjalankan amanat Permen KP No. 8 tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan Dan Perikanan 	Dit. LOGISTIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenko Bidang Perekonomian b. Kementerian Perdagangan c. Lingkup KKP (Sekretariat Jenderal, Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen PSDKP, dan BKIPM) 	2020

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
		<p>Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki tata kelola penyelenggaraan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikana (RPHP) yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. - Mengakomodir pengaturan pengendalian pemasukan ikan hidup konsumsi. 			
12.	Perubahan Atas Permen KP No 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan	Terbitnya Permen KP 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Permendagri 90 Tahun 2019	Dit. UI	BKPM	2020
13.	Perubahan atas Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata cara Penerbitan	Kebutuhan organisasi untuk peningkatan layanan	Dit. PBM	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan organisasi b. Pusat Data dan Informasi c. Kemenkumham 	2020

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
	Sertifikat Kelayakan Pengolahan				
14.	Perubahan atas Permen KP No 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara pemberian Surat persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makrel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai tambah Hasil Perikanan - Kebutuhan organisasi untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan 	Dit. PBM	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan Organisasi b. BPOM c. Kemenkumham 	2024
15.	Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah perubahan PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan - Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi pemangku jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro SDMA b. Biro Hukum dan Organisasi c. KemenPANRB d. BKN e. KemenKumHAM 	2022

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
16.	Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pasar Ikan Modern	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan organisasi untuk operasionalisasi dan pengelolaan Pasar Ikan Modern - Tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional 	Dit. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan Organisasi b. Biro Umum dan PBJ c. Kemenkumham 	2023
17.	Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Usaha Pemasaran Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat dari UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 	Dit. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan Organisasi b. Pusat Data dan Informasi c. Kemenkumham 	2020
18.	Rancangan Permen Kp ttg Unit Pelaksana teknis di lingkungan Ditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan organisasi karena peralihan fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; - berkurangnya fungsi pelayanan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 	Setditjen PDSPKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Biro Hukum dan Organisasi b. Biro SDMA c. Kemenkumham 	2024

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (TAHUN 2020/2021/2022/2023/2024)
19.	Rancangan Permen Kp ttg Pedoman Kriteria klasifikasi UPT di lingkungan Ditjen PDSPKP	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Nonkementerian, apabila jumlah suatu jenis UPT di lingkungan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian mempunyai variasi dilihat dari volume/beban kerja, maka pada UPT tersebut dilakukan klasifikasi berdasarkan kriteria.	Setditjen PDSPKP	a. Biro Hukum dan Organisasi b. Biro SDMA c. Kemenkumham	2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiyarti

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO

Lampiran III : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

A. MATRIK PENDANAAN PEMBANGUNAN PDSPKP TAHUN 2020-2024

NO	PROGRAM	TAHUN (DALAM RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	196,2	271,2	384,6	394,8	356,3	1.603,1
2	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	42,4	46,3	54,3	63,3	70,8	277,0
3	Dukungan Manajemen	127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	Total	366,1	457,7	629,0	667,1	640,6	2.760,5

B. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN PDSPKP TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Total Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							366,0	457,7	629,0	667,1	640,6	2.760,5
SS 1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat											
	<i>Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) (nilai)</i>	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87						
SS 2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat											
	<i>Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)</i>	7,9	8,11	8,31	8,51	8,71						
	<i>Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)</i>	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00						

	<i>Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)</i>	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05						
SS 9	Tatakelola pemerintahan yang baik											
	<i>Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)</i>	70	71	72	73	74						
	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)</i>	88	89	89	90	90						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							196,2	271,2	384,6	394,8	356,3	1.603,1
SS2	<i>Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat</i>											
	<i>Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)</i>	5,21	5,49	5,79	6,1	6,43						
	<i>Kinerja Logistik Hasil Perikanan (indeks)</i>	52	54	56	58	60						
	<i>Pembiayaan usaha KP melalui kredit program (Rp Triliun)</i>	3	3,3	3,6	3,9	4,2						

SS.7	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat											
	Tingkat kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJ PDS (skala 1-5)	4	5	5	5	5						
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan							114,9	119,0	126,2	129,4	138,1	627,5
	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan	4	4	4	4	4	2,9	2,5	2,5	2,5	2,1	
	<i>Jumlah Peta Logistik Ikan yang disusun (dokumen)</i>	4	4	4	4	4						
	<i>Implementasi sistem telusur dan logistik Ikan Nasional (lokasi)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Hasil analisis pemantauan logistik ikan (dokumen)</i>	12	12	12	12	12						
	Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)	5	5	5	5	5	1,6	1,9	1,8	1,8	1,8	

	<i>Jumlah koridor rantai pasok hasil perikanan yang terkelola (koridor)</i>	5	5	5	5	5						
	<i>Layanan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (layanan)</i>	1	1	1	1	1						
	Pelaku usaha perikanan yang dibina dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan						0,7	1,8	0,8	0,8	1,5	
	<i>Jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan (pelaku usaha)</i>	100	25	30	35	40						
	Pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan						0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	
	<i>Jumlah pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka</i>	50	25	30	35	40						

	<i>distribusi dan transportasi hasil perikanan (pelaku usaha)</i>											
	Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan						61,3	75,0	81,0	83,0	85,0	
	<i>Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (unit)</i>	31	35	35	40	45						
	Sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan (unit)						30,0	31,7	33,0	35,1	42,1	
	<i>Jumlah Sarana Distribusi hasil perikanan yang disediakan (unit)</i>	41	41	41	45	50						
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan							19,3	19,5	19,8	21,0	22,2	101,8
	Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP						0,6	1,4	2,0	2,5	3,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan							19,3	19,5	19,8	21,0	22,2	101,8
	<i>Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)</i>	20	30	35	40	45						
	Terlaksananya Promosi Usaha dan Investasi						0,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
	<i>Jumlah promosi usaha dan investasi (dokumen)</i>	5	5	5	5	5						
	Penumbuhan wirausaha KP						1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	
	<i>Jumlah wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan (wirausaha)</i>	200	200	200	200	200						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu						12,0	4,0	3,0	3,0	3,0	

(SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang mandiri												
<i>Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak (tingkat kemandirian skala 1-5)</i>	4	5	5	5	5							
Fasilitasi akses pembiayaan kredit program (Dekonsentrasi)						0,4	1,2	1,2	1,2	1,2		
<i>Provinsi yang terfasilitasi akses pembiayaan kredit program (provinsi)</i>	10	34	34	34	34							
<i>Terselenggaranya Marine and Fisheries Business and Investment Forum</i>						0,4	2,5	2,5	2,5	2,5		
<i>Jumlah Marine and Fisheries Business and Investment Forum yang diselenggarakan (forum)</i>	12	12	12	12	12							
Pelaku usaha yang difasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasinya						3,7	6,0	6,5	7,0	7,5		

	<i>Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi (pelaku usaha)</i>	1510	1620	1730	1840	1950						
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							104,4	179	293	307	266,8	277,0
SS	Produk Olahan KP Berdaya Saing											
	<i>Volume Produk Olahan KP Berdaya Saing (Juta Ton)</i>	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50						
	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat											
SS	<i>Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)</i>	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00						
	<i>Konsumsi ikan (Kg/ Kap/ tahun)</i>	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05						
SS	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat											
	<i>Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan</i>	103,75	104	104,25	104,5	104,75						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan							62,0	132,7	238,7	244,4	196,0	873,8
	Pengadaan Moda Sarana Pemasaran	50	50	50	50	50	4,7	5,0	6,0	5,8	5,7	
	<i>Jumlah Sarana Pemasaran Roda 2/3 yang Disediakan (paket)</i>											
	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)						19,5	22,0	30,0	32,0	34,0	
	<i>Jumlah menu inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan yang dikembangkan (menu inovasi)</i>	68	68	68	68	68						
	<i>Jumlah lokasi promosi Gemarikan (lokasi)</i>	34	34	34	34	34						
	Keikutsertaan dalam Promosi Skala internasional						10,0	11,5	13,2	14,0	15,0	

	<i>Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (juta USD)</i>	250	275	300	325	350						
	Sarana dan Prasarana Pemasaran yang dibangun						18,3	30,0	31,2	34,3	38,0	
	<i>Jumlah Pasar Ikan yang dibangun (unit)</i>	4	2	2	2	2						
	<i>Jumlah Sentra Kuliner yang dibangun (unit)</i>	2	10	10	10	10						
	Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan						1,8	4,0	4,0	4,0	4,0	
	<i>Jumlah lokasi Pembinaan Pengelolaan Pasar Ikan (lokasi)</i>	11	17	23	29	34						
	<i>Jumlah Perlengkapan pedagang ikan (paket)</i>	25	25	25	25	25						
	<i>Pemeliharaan Pasar Ikan Modern (bulan)</i>	12	12	12	12	12						
	Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan						3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	

	konsumen dalam negeri (Provinsi)											
	<i>Peta preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)</i>	34	34	34	34	34						
	Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor yang disusun						1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
	<i>Jumlah dokumen pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor yang disusun (dokumen)</i>	12	12	12	12	12						
	Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional						-	55,0	150,0	150,0	95,0	
	<i>Pasar ikan bertaraf internasional yang dibangun (lokasi)</i>	0	3	3	3	3						

	Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan (Dekonsentrasi)						3,0	2,0	1,1	1,1	1,1	
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan							33,4	34,4	39,2	44,8	48,6	200,3
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan						1,9	0,70	0,70	0,70	0,70	
	<i>Jumlah RSNI produk hasil KP yang dirumuskan (RSNI)</i>	15	15	15	15	15						
	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan						2,6	9,0	12,0	15,0	16,0	
	<i>Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (sertifikat)</i>	2250	2500	2750	3000	3250						

	Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina (Unit)						3,3	2,4	2,0	2,0	2,0	
	<i>Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina (Unit)</i>	400	400	400	400	400						
	<i>Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP skala menengah dan besar yang dibina (Unit)</i>	100	100	100	100	100						
	Utilitas dan Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku UPI						1,9	1,5	1,5	1,5	1,6	
	<i>Persentase Utilitas UPI (persen)</i>	60	66	67	68	70						
	<i>Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku untuk UPI ICS (dokumen)</i>	2	2	2	2	2						

	Fasilitasi Sarana Rantai Dingin dan Pengolahan kepada UMKM						6,5	10,0	11,5	13,5	15,5	
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan yang disediakan (unit)</i>	400	500	500	500	500						
	Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina						1,30	1,35	1,40	1,60	1,80	
	<i>Jumlah Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam)</i>	28	28	28	28	28						
	Sarana dan Prasarana Unit Penanganan/ Pengolahan Ikan yang ditingkatkan fasilitasnya						6,8	2,50	1,90	1,70	1,80	
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Unit Penanganan/</i>	10	20	30	40	50						

	<i>Pengolahan Ikan yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)</i>											
	UPI bernilai tambah menuju Zero Waste						5,5	5,9	7,2	7,7	8,1	
	<i>Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste (lokasi)</i>	2	2	2	2	2						
	Layanan Pra Penerbitan SKP di daerah (Dekonsentrasi)						3,6	1,0	1,0	1,1	1,1	
	<i>Jumlah Layanan Pra Penerbitan SKP di daerah (provinsi)</i>	34	34	34	34	34						
Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan							9,0	11,9	15,1	18,5	22,2	76,7
	Rekayasa dan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan						2,0	2,2	2,5	3,3	3,8	

	<i>Jumlah produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang direkayasa (produk)</i>	10	10	10	10	10						
	<i>Jumlah produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang diujiterapkan (produk)</i>	5	5	5	5	5						
	Bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan						0,2	0,3	1,5	2,0	2,5	
	<i>Jumlah bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan (bahan RSNI)</i>	3	3	3	3	3						
	Layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan						1,2	1,8	2,1	2,5	2,8	
	<i>Jumlah layanan sertifikasi SNI produk</i>	60	70	80	90	100						

	<i>kelautan dan perikanan (produk)</i>											
	Data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan						1,4	1,5	1,7	2,2	2,5	
	<i>Jumlah data hasil pengujian nutrisi dan mutu produk kelautan dan perikanan (data uji)</i>	1000	1100	1200	1300	1400						
	Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis						3,5	5,0	5,5	6,3	7,0	
	<i>Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis (UMKM)</i>	18	20	22	24	26						
	<i>Jumlah Layanan bisnis pengembangan usaha (lokasi)</i>	4	4	4	4	4						
	Diseminasi informasi pengujian penerapan hasil kelautan dan perikanan						0,7	1,1	1,8	2,2	3,6	
	<i>Jumlah peserta diseminasi informasi</i>	500	600	700	800	900						

	<i>pengujian penerapan hasil kelautan dan perikanan (orang)</i>											
Program Dukungan Manajemen							127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan DJPDSPKP											
	<i>Nilai PM PRB Ditjen PDS (nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup DJPDS (kumulatif) (unit)</i>	2	3	3	4	5						
	<i>Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPDSPKP (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (RP MILIAR)					TOTAL ALOKASI (RP MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen							127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	<i>Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPDSPKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76						
	<i>Nilai PM SAKIP Lingkup DJPDSPKP (nilai)</i>	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	<i>Nilai Maturitas SPIP DJPDSPKP (level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup DJPDSPKP (%)</i>	82	84	86	88	90						
	<i>Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang</i>	60	65	70	75	80						

	<i>dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup DJPDSPKP (%)</i>											
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup DJPDSPKP (unit kerja)</i>	1	1	1	1	1						
	<i>Nilai IKPA Lingkup DJPDSPKP (nilai)</i>	88	89	89	90	90						
	<i>Nilai NKA Lingkup DJPDSPKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP							127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I						47,9	56,7	77,8	84,4	86,6	353,4
	<i>Nilai PM PRB Ditjen PDS (nilai)</i>	30	31	32	33	34						

	<i>Indeks Profesionalitas ASN (indeks)</i>	72	73	74	75	76						
	<i>Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi</i>	2	3	3	4	5						
	<i>Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Nilai PM SAKIP (nilai)</i>	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	<i>Nilai Maturitas SPIP (level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90						
	<i>Persentase Rekomendasi hasil</i>	60	65	70	75	80						

	<i>pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)</i>											
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)</i>	1	1	1	1	1						
	<i>Nilai IKPA (nilai)</i>	88	89	89	90	90						
	<i>Nilai NKA (nilai)</i>	85	86	87	88	89						
	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP Satuan Kerja Daerah						3,5	4,0	6,3	8,0	8,0	29,8
	Tersedianya dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DJPDSPKP Satuan Kerja Daerah yang efektif dan efisien	1	1	1	1	1						

	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						1,6	1,7	2,0	2,2	2,2	9,7
	<i>Persentase pemenuhan layanan internal/ overhead lingkup DJPSDPKP (%)</i>	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran						74,6	77,8	104,0	114,5	116,6	487,5
	<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup DJPSDPKP (bulan)</i>	12	12	12	12	12						

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiarti

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

NILANTO PERBOWO



Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat
Kementerian Kelautan dan Perikanan